PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAPPERIDA

HASNUR CENTRE
Bakti untuk Banua
Bakti untuk Bangsa

HRP
HAFECS
Research & Publication

OPTIMALISASI INOVASI DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Kajian Komprehensif Perspektif Tata Kelola dan Pelayanan Publik untuk Mendukung Sinkronisasi RPJMD, RKPD, dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAPORAN KAJIAN 2026

Pelaksana Kajian

1. **Junaidy, M.I.Kom., M.AB.** – Pakar Administrasi Publik
2. **Hairansyah, S.H., M.H.** – Pakar HAM dan Sosial Politik
3. **Farida Hayati, S.Pd.** – Pakar Pendidikan dan Evaluasi Program
4. **Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc.** – Peneliti HRP
5. **Raihani Raziqin, S.Tr.Kom.** – Peneliti HRP

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Optimalisasi Inovasi Daerah sebagai Instrumen Perencanaan Pembangunan Kajian Komprehensif kategori Asta Cita 7 untuk Mendukung Sinkronisasi RPJMD, RKPD, dan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Penyusun :

1. Junaidy, M.I.Kom., M.AB. – Pakar Administrasi Publik
2. Hairansyah, S.H., M.H. – Pakar HAM dan Sosial Politik
3. Farida Hayati, S.Pd. – Pakar Pendidikan dan Evaluasi Program
4. Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc. – Peneliti HRP
5. Raihani Raziqin, S.Tr.Kom. – Peneliti HRP

Barito Kuala, 10 Agustus 2026

Disetujui oleh:

Danang Bagus Yudistira, S.Si., M.Sc.
Coordinator of HAFECS Research and Publication

Farida Hayati, S.Pd.
Head Division and Researcher

Diketahui oleh:

Dr. Zulfikar Alimuddin
Director of HAFECS Research and Publication

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini disusun atas permintaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) untuk mengkaji secara komprehensif inovasi daerah pada kategori Asta Cita 7 sebagai alat perencanaan pembangunan. Dari total 214 inovasi daerah yang tercatat dalam rekapitulasi resmi, 100 inovasi (46,7%) tergolong dalam perspektif ini, menjadikannya perspektif terbesar dan paling relevan bagi fungsi perencanaan, evaluasi kebijakan, dan sinkronisasi dokumen pembangunan daerah yang diampu Bapperida.

Analisis statistik menunjukkan distribusi inovasi ke dalam sebelas sub-klaster tematik, didominasi oleh klaster Kesehatan, Pendidikan, dan SDM Aparatur (31 inovasi atau 24,6%), *E-Government* dan Administrasi Kependudukan Digital (25 inovasi atau 19,8%), serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat kecamatan (23 inovasi atau 18,3%). Pola ini menunjukkan bahwa transformasi digital pelayanan publik telah menjadi arus utama inovasi daerah, namun sebagian besar masih berjalan terfragmentasi antar-kecamatan dan antar-OPD tanpa standar saling terhubung antar-sistem data yang seragam.

Enam inovasi ditetapkan sebagai fokus kajian melalui matriks penilaian berbobot: MPP One Stop Smart Service (MOSSS), SILANTING, E-SAKIP, SAPA HSS, Klinik Arsip, dan SIMKuDa. Hasil skoring menunjukkan E-SAKIP dan MOSSS sebagai inovasi dengan tingkat kesiapan tata kelola tertinggi E-SAKIP karena integrasi penuh dengan Sistem Perencanaan, Keuangan, dan E-Kinerja yang dilengkapi otentikasi *Single Sign-On* dan verifikasi berbasis pengenalan wajah dan geolokasi, sementara MOSSS karena telah menyatukan 117 layanan dari 16 instansi pemerintah dalam satu lokasi pelayanan di Lantai III Pasar Losbatu Kandangan. Sebaliknya, SAPA HSS menempati peringkat terendah karena keterbatasan dokumentasi kelembagaan meskipun berfungsi sebagai kanal partisipasi publik yang strategis.

Analisis SWOT gabungan menegaskan bahwa kekuatan utama portofolio inovasi terletak pada capaian nasional yang telah diraih (Kabupaten HSS meraih prestasi terbaik nasional Jaringan Simpul Kearsipan Nasional 2025) dan kelembagaan yang kuat pada beberapa inovasi flagship, namun kelemahan struktural berupa dokumentasi yang minim (76% dari 100 inovasi tidak memiliki uraian dan manfaat yang terpublikasi) dan duplikasi aplikasi antar-kecamatan tanpa saling terhubung antar-sistem data menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Kajian ini merumuskan model optimalisasi untuk masing-masing dari enam inovasi fokus, mencakup penguatan saling terhubung antar-sistem data, standardisasi SOP

lintas-kecamatan, dan mekanisme evaluasi kinerja yang terukur. Kajian juga mengusulkan dua inovasi baru: (1) SIMONEV INOVASI, sistem monitoring dan evaluasi inovasi daerah terpadu yang memungkinkan Bapperida memantau status, tingkat kesiapan, dan keterkaitan RPJMD/RKPD dari seluruh 214 inovasi daerah secara *real-time*; dan (2) Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO), forum teknis berkala untuk standardisasi pertukaran data antar-sistem informasi perangkat daerah.

Dengan implementasi rekomendasi yang diusulkan, kajian ini meyakini Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memperkuat posisinya sebagai daerah dengan tata kelola administrasi publik yang efisien, terintegrasi, dan akuntabel, sekaligus memperkuat basis data bagi Bapperida dalam sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah ke depan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kajian Komprehensif mengenai Optimalisasi Inovasi Daerah sebagai Instrumen Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian ini disusun atas permintaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai bahan telaah teknokratis terhadap inovasi daerah pada kategori Asta Cita 7. Enam inovasi menjadi fokus utama kajian, yaitu MPP One Stop Smart Service (MOSSS), SILANTING, E-SAKIP, SAPA HSS, Klinik Arsip, dan SIMKuDa, yang secara kolektif merepresentasikan pilar-pilar utama administrasi publik modern: pelayanan terpadu satu pintu, digitalisasi administrasi kependudukan, akuntabilitas kinerja instansi, partisipasi dan pengaduan publik, manajemen kearsipan pemerintahan, serta tata kelola keuangan desa.

Penyusunan kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berupa analisis statistik deskriptif terhadap data rekapitulasi 100 inovasi daerah, serta pendekatan kualitatif berupa penilaian substansi terhadap enam inovasi terpilih menggunakan matriks penilaian berbobot yang transparan. Kajian juga mengkaji kesesuaian inovasi-inovasi tersebut terhadap visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029, sebagai bentuk dukungan langsung terhadap fungsi sinkronisasi perencanaan yang diampu Bapperida.

Disadari bahwa kajian ini memiliki keterbatasan, terutama karena 76% dari 100 inovasi pada perspektif ini masih tercatat sebagai nama program program tanpa uraian dan manfaat yang terpublikasi secara lengkap dalam basis data rekapitulasi. Keterbatasan tersebut disampaikan secara transparan dalam kajian ini agar dapat menjadi catatan perbaikan tata kelola dokumentasi inovasi daerah ke depan, sekaligus menjadi salah satu rekomendasi utama kajian ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan seluruh perangkat daerah yang telah memberikan data, masukan, dan kontribusi pemikiran dalam penyusunan kajian ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi sinkronisasi RPJMD, RKPD, dan percepatan reformasi birokrasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Barito Kuala, 3 Agustus 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN **2**
RINGKASAN EKSEKUTIF **3**
KATA PENGANTAR **5**
DAFTAR ISI **6**
DAFTAR GAMBAR **13**
DAFTAR TABEL **14**
BAB I PENDAHULUAN **19**
1.1 Latar Belakang Strategis 19
1.2 Landasan Filosofis dan Normatif 19
1.2.1 *Good Governance* dan Reformasi Birokrasi sebagai Paradigma 19
1.2.2 Visi "SEMANGAT" dan Kedudukan Bapperida 20
1.2.3 Inovasi Daerah sebagai Instrumen Perencanaan 20
1.3 Landasan Yuridis 20
1.4 Rumusan Masalah 21
1.5 Tujuan Kajian 21
1.6 Ruang Lingkup 22
1.6.1 Lingkup Substansi 22
1.6.2 Lingkup Data dan Populasi 22
1.6.3 Lingkup Kelembagaan 22
1.6.4 Lingkup Spasial 22
1.6.5 Lingkup Waktu 22
1.6.6 Lingkup Integrasi Kebijakan 22
1.7 Metodologi 23
1.7.1 Pendekatan Kajian 23
1.7.2 Sumber Data 23
1.7.3 Teknik Analisis 23
1.7.4 Kerangka Penilaian Kualitatif 23
1.8 Kerangka Analitis Perspektif Administrasi Publik dan Model 24
1.8.1 Ciri Khas Perspektif Keilmuan 24
1.8.2 Bentuk Rencana Kajian: Model Audit Tata Kelola dan Evaluasi 24
1.8.3 Metode Kajian 27
1.8.4 Bentuk Data Utama 28
1.8.5 Bentuk dan Susunan Laporan 30

BAB II GAMBARAN UMUM DAN DIAGNOSIS TATA KELOLA ADMINISTRASI PUBLIK **35**
2.1 Profil Wilayah dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah 35

2.2 Kedudukan Bapperida dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.....35
2.3 Kerangka Kebijakan Inovasi Daerah 36
2.4 Populasi Data Inovasi Menurut Asta Cita dan Posisi Kategori.....36
2.5 Distribusi Inovasi Menurut Sub-Klaster Tematik.....37
2.6 Identifikasi Kesenjangan Struktural.....39
2.6.1 Kesenjangan Dokumentasi Data.....39
2.6.2 Duplikasi dan Fragmentasi Antar-Kecamatan.....39
2.6.3 Kesenjangan Interoperabilitas Sistem.....39

BAB III PEMETAAN DAN SELEKSI ENAM INOVASI PRIORITAS.....41
3.1 Kerangka Reklasifikasi Inovasi 41
3.2 Proses Bertahap Pemilihan Enam Inovasi Prioritas.....41
3.2.1 Tahap 1: Prioritisasi Sub-Klaster.....41
3.2.2 Tahap 2: Penentuan Inovasi Flagship per Sub-Klaster Terpilih.....42
3.2.3 Tahap 3: Validasi Melalui Matriks Skoring Berbobot 43
3.3 Analisis Rantai Layanan Administrasi Publik 43
3.4 Matriks Penilaian dan Pembobotan Kriteria 44
3.5 Hasil Skoring dan Penetapan Enam Inovasi Prioritas.....44
3.6 Profil Ringkas Enam Inovasi Prioritas.....45
3.7 Keterkaitan Fungsional dan Sistemik Antar-Enam Inovasi 45
3.7.1 Relasi Hierarkis-Evaluatif 46
3.7.2 Relasi Fungsional-Transaksional.....46
3.7.3 Relasi Arsip-Sumber.....46
3.7.4 Relasi Umpan Balik (*Feedback Loop*) 46
3.8 Katalog Profil Seluruh Inovasi Administrasi Publik 47
3.8.1 TIM Pemantau dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan 47
3.8.2 SIPASUM HSS.....48
3.8.3 SIMKERDA 49
3.8.4 Si EKKa.....50
3.8.5 Lakasilah Tuan Hudah Gerah 50
3.8.6 SIDALI 51
3.8.7 KETUPAT SETDA 52
3.8.8 SI HADRAH.....52
3.8.9 Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil 53
3.8.10 ePropemperda 54
3.8.11 ParlemenGO! 55
3.8.12 SEHATI.....56
3.8.13 SAPA HSS.....56
3.8.14 PANTING MARENA 57
3.8.15 MENTANG-MENTANG.....58

3.8.16 DIAJAK MESRA 59
3.8.17 INOVASI SILANTING.....59
3.8.18 SIM PKB 60
3.8.19 PAPI ALIN 61
3.8.20 KAPAS BARA 62
3.8.21 SITERANG PPID HSS.....62
3.8.22 MPP One Stop Smart Service.....63
3.8.23 KLINIK ARSIP 64
3.8.24 SIMFONI ARSIP.....65
3.8.25 JAGOAN ARSIP 66
3.8.26 ARTIS PD.....67
3.8.27 AKSI SEKOLAH LITERAT.....67
3.8.28 SINERGI AKSI PUSTAKA.....68
3.8.29 LIWAR HSS.....69
3.8.30 E-SAKIP.....70
3.8.31 SENADA+.....71
3.8.32 SI KETUPAD 73
3.8.33 SIP-CORPU HSS.....73
3.8.34 Kula Upik Angkinang.....74
3.8.35 SI JULAKK SANI Kec. Angkinang.....75
3.8.36 SIAP KADARAT 76
3.8.37 KOPER DESA.....77
3.8.38 SEWARGA DASEL.....78
3.8.39 OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU79
3.8.40 SIPADI 80
3.8.41 SI UTARA 80
3.8.42 Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK.....81
3.8.43 SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026.....82
3.8.44 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital 83
3.8.45 Master Data Admistrasi SPPD.....83
3.8.46 SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL.....84
3.8.47 LAMANK Kec. Kandangan 84
3.8.48 REKAN SI MAMET 87
3.8.49 SISTER.....88
3.8.50 KASI AMBIL 89
3.8.51 AKSI MONALISA.....90
3.8.52 SI TAMU SIMPUR 91
3.8.53 SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN 93
3.8.54 Sistem Informasi Data Kecamatan 94
3.8.55 SIMKuDa.....95

3.8.56 SiSuKa PD 97
3.8.57 BAHANTAR 98
3.8.58 JEMPOL PBB 99
3.8.59 GasanKU = Gerakan Administrasi Santun Kandangan Utara 100
3.8.60 SIGMA KAMBOJA 101
3.8.61 e SURAT KETERANGAN PINDAH 102
3.8.62 e SURAT KUASA KEPENGURUSAN 102
3.8.63 e SURAT KETERANGAN BEDA NAMA 102
3.8.64 e SURAT KETERANGAN AHLI WARIS 103
3.8.65 ADEK PUAS MAS 103
3.8.66 e SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU 104
3.8.67 e SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU 105
3.8.68 e SURAT KETERANGAN PENGHASILAN 105
3.8.69 SI PETENISKU 105
3.8.70 e SURAT KEMATIAN LAMA 107
3.8.71 e SURAT KEMATIAN BARU 107
3.8.72 BASTIK 3 AH 107
3.8.73 e SURAT KETERANGAN JANDA/DUDA 108
3.8.74 e SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH 108
3.8.75 e SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH 109
3.8.76 e SURAT KETERANGAN AHLI WARIS KEMATIAN 109
3.8.77 e SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH 109
3.8.78 e SURAT PERNYATAAN JUAL BELI 110
3.8.79 e SURAT KETERANGAN HIBAH 110
3.8.80 e SURAT KETERANGAN DOMISILI KANTOR 110
3.8.81 ISMA BADASTARKU 110
3.8.82 SI-PIKAT 111
3.8.83 Peduli Umpeg 112
3.8.84 SI IDAH PEDALAMAN 113
3.8.85 e-RKBMD 114
3.8.86 Aksi IPSRS 115
3.8.87 Isma Badastar 116
3.8.88 SIEVAK 117
3.8.89 ES-KREM HASAN BASRY 119
3.8.90 SIPETI 121
3.8.91 BERANAK 123
3.8.92 E-Skakmat 124
3.8.93 SOPIA 126
3.8.94 ROKET 127

3.8.95 SIBUNGA....128
3.8.96 ANNOR....129
3.8.97 SILAKSA....129
3.8.98 SAPA QR....130
3.8.99 BUKU TAMU DIGITAL....131
3.8.100 LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu Pintu untuk....131

BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 134
4.1 Gambaran Umum Permasalahan....134
4.2 Permasalahan Hulu: Permohonan dan Verifikasi Layanan 134
4.3 Permasalahan Hilirisasi: Penerbitan, Publikasi, dan....134
4.4 Permasalahan SDM dan Kelembagaan Aparatur....134
4.5 Permasalahan Infrastruktur dan Interoperabilitas Sistem....135
4.6 Analisis Mendalam Enam Inovasi Prioritas....135
4.6.1 MPP One Stop Smart Service (MOSSS)....135
4.6.1.1 Identitas Inovasi....136
4.6.1.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat....136
4.6.1.3 Rancang Bangun Inovasi....136
4.6.1.4 Capaian Inovasi....138
4.6.1.5 Kendala dan Tantangan Implementasi....139
4.6.1.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC)....139
4.6.1.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan....140
4.6.2 SILANTING....140
4.6.2.1 Identitas Inovasi....141
4.6.2.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat....141
4.6.2.3 Rancang Bangun Inovasi....141
4.6.2.4 Capaian Inovasi....143
4.6.2.5 Kendala dan Tantangan Implementasi....144
4.6.2.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC)....144
4.6.2.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan....145
4.6.3 E-SAKIP....145
4.6.3.1 Identitas Inovasi....146
4.6.3.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat....146
4.6.3.3 Rancang Bangun Inovasi....147
4.6.3.4 Capaian Inovasi....148
4.6.3.5 Kendala dan Tantangan Implementasi....149
4.6.3.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC)....149
4.6.3.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan....150
4.6.4 SAPA HSS....150
4.6.4.1 Identitas Inovasi....151

4.6.4.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat.....152
4.6.4.3 Rancang Bangun Inovasi 152
4.6.4.4 Capaian Inovasi 153
4.6.4.5 Kendala dan Tantangan Implementasi.....154
4.6.4.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC).....154
4.6.4.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 155
4.6.5 Klinik Arsip 155
4.6.5.1 Identitas Inovasi.....156
4.6.5.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat.....156
4.6.5.3 Rancang Bangun Inovasi 157
4.6.5.4 Capaian Inovasi 158
4.6.5.5 Kendala dan Tantangan Implementasi.....159
4.6.5.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC).....159
4.6.5.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 160
4.6.6 SIMKuDa.....160
4.6.6.1 Identitas Inovasi.....161
4.6.6.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat.....161
4.6.6.3 Rancang Bangun Inovasi 161
4.6.6.4 Capaian Inovasi 162
4.6.6.5 Kendala dan Tantangan Implementasi.....164
4.6.6.6 Visi dan Teori Perubahan (ToC).....164
4.6.6.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan 165
4.7 Analisis Komparatif Enam Inovasi 165
4.8 Analisis SWOT Gabungan.....166
4.9 Rangkuman Pemeriksaan kondisi 167

BAB V VISI DAN ARAH PENGUATAN ADMINISTRASI PUBLIK 2026–2030 169

5.1 Arah Umum Penguatan Administrasi Publik.....169
5.2 Visi Penguatan Administrasi Publik 2030 169
5.3 Prinsip Pengembangan.....169
5.4 Strategi per Sub-Klaster Tematik.....169
5.5 Model Pengembangan Terpadu 170
5.6 Tahapan Pengembangan 170
5.6.1 Fase I (2026–2027): Standardisasi dan Dokumentasi 170
5.6.2 Fase II (2028–2030): Integrasi dan Konsolidasi.....170
5.7 Dampak yang Diharapkan.....170
5.8 Integrasi Kebijakan Daerah.....171
5.8.1 Visi “SEMANGAT”, Misi Pembangunan, dan Keterkaitan 171
5.8.2 Pemetaan Enam Inovasi Fokus terhadap Sasaran dan Indikator 172

5.8.3 Pemetaan Enam Inovasi Fokus terhadap Pilar Visi SEMANGAT .173
5.8.4 Catatan Kesenjangan dan Peluang Penguatan 173

BAB VI DESAIN MODEL TATA KELOLA TERPADU 176

6.1 Model Sistem Tata Kelola Administrasi Publik Terpadu 176
6.2 Model Optimalisasi per Inovasi 176
6.2.1 Model Optimalisasi MOSSS.....176
6.2.2 Model Optimalisasi SILANTING 177
6.2.3 Model Penguatan E-SAKIP.....178
6.2.4 Model SAPA HSS 178
6.2.5 Model Klinik Arsip.....179
6.2.6 Model SIMKuDa 180
6.3 Skema Kelembagaan Lintas OPD.....180
6.4 Rekomendasi Inovasi Baru 181
6.4.1 SIMONEV INOVASI: Sistem Monitoring dan Evaluasi Inovasi...181
6.4.2 Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO).....182

BAB VII RENCANA AKSI DAN MATRIKS IMPLEMENTASI 184

7.1 Program Fase I (2026–2027): Standardisasi dan Dokumentasi 184
7.2 Program Fase II (2028–2030): Integrasi dan Konsolidasi 184
7.3 Peta Jalan Implementasi.....184
7.4 Matriks Prioritas Implementasi.....185
7.5 Risiko dan Mitigasi Implementasi 186

BAB VIII PROYEKSI DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN.....188

8.1 Pendahuluan.....188
8.2 Proyeksi Dampak terhadap Efisiensi Layanan Publik 188
8.3 Proyeksi Dampak Kelembagaan dan Interoperabilitas 188
8.4 Kontribusi terhadap RPJMD, RKPD, dan SAKIP Kabupaten 188
8.5 Skenario Keberlanjutan.....189
8.6 Ringkasan Dampak Utama 190

BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN 192

9.1 Kesimpulan 192
9.2 Saran 192
9.2.1 Bagi Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Selatan 193
9.2.2 Bagi Perangkat Daerah Pengampu Inovasi.....193
9.2.3 Bagi Penelitian Lanjutan.....193
Lampiran 1. Rekapitulasi Lengkap 100 Inovasi kategori Asta Cita 7.....196
Lampiran 2. Instrumen Penilaian Kualitatif Enam Inovasi.....203

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Distribusi Inovasi per Sub-Klaster Tematik 38
Gambar 2.2 Porsi Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik HSS 38
Gambar 3.1 Peta Keterkaitan Fungsional Antar-Enam Inovasi Prioritas 45
Gambar 4.1 Ilustrasi MPP One Stop Smart Service (MOSSS).....135
Gambar 4.2 Ilustrasi SILANTING.....140
Gambar 4.3 Ilustrasi E-SAKIP.....145
Gambar 4.4 Ilustrasi SAPA HSS 151
Gambar 4.5 Ilustrasi Klinik Arsip.....155
Gambar 4.6 Skor Kualitatif Tim Kajian atas Enam Inovasi Fokus 165
Gambar 4.7 Analisis SWOT Gabungan Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan 166
Gambar 6.1 Model Sistem Tata Kelola Administrasi Publik Terpadu Tiga.....176
Gambar 6.2 Ilustrasi Model Optimalisasi MOSSS 177
Gambar 6.3 Ilustrasi Model Optimalisasi SILANTING.....177
Gambar 6.4 Ilustrasi Model Penguatan E-SAKIP.....178
Gambar 6.5 Ilustrasi Model SAPA HSS.....179
Gambar 6.6 Ilustrasi Model Klinik Arsip 179
Gambar 6.7 Ilustrasi Model SIMKuDa.....180
Gambar 7.1 Peta Jalan Implementasi Rekomendasi Administrasi Publik 185

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Bentuk dan Susunan Laporan 34
Tabel 2.1 Populasi Inovasi Daerah Kabupaten HSS Menurut Kategori Asta.....39
Tabel 2.2 Distribusi Inovasi Asta Cita 7 Menurut Sub-Klaster Kelembagaan 40
Tabel 3.1 Justifikasi Pemilihan Inovasi Flagship per Sub-Klaster 45
Tabel 3.2 Titik Kritis Rantai Layanan pada Enam Inovasi Fokus 46
Tabel 3.3 Bobot Kriteria Penilaian Inovasi.....47
Tabel 3.4 Skor Komposit Tertimbang Enam Inovasi Prioritas 47
Tabel 3.5 Enam Inovasi Fokus Kajian dan Sub-Klaster Tematiknya 48
Tabel 3.6 Posisi Fungsional Enam Inovasi dalam Ekosistem Administrasi 50
Tabel 3.7 Profil Inovasi TIM Pemantau dan Evaluasi Kinerja 51
Tabel 3.8 Profil Inovasi SIPASUM HSS 52
Tabel 3.9 Profil Inovasi SIMKERDA.....53
Tabel 3.10 Profil Inovasi Si EKKa 54
Tabel 3.11 Profil Inovasi Lakasilah Tuan Hudah Gerah.....55
Tabel 3.12 Profil Inovasi SIDALI.....56
Tabel 3.13 Profil Inovasi KETUPAT SETDA.....57
Tabel 3.14 Profil Inovasi SI HADRAH 58
Tabel 3.15 Profil Inovasi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala.....59
Tabel 3.16 Profil Inovasi ePropemperda.....60
Tabel 3.17 Profil Inovasi ParlemenGO!.....61
Tabel 3.18 Profil Inovasi SEHATI.....62
Tabel 3.19 Profil Inovasi SAPA HSS 63
Tabel 3.20 Profil Inovasi PANTING MARENA 64
Tabel 3.21 Profil Inovasi MENTANG-MENTANG 65
Tabel 3.22 Profil Inovasi DIAJAK MESRA.....66
Tabel 3.23 Profil Inovasi INOVASI SILANTING 67
Tabel 3.24 Profil Inovasi SIM PKB 68
Tabel 3.25 Profil Inovasi PAPI ALIN.....69
Tabel 3.26 Profil Inovasi KAPAS BARA.....70
Tabel 3.27 Profil Inovasi SITERANG PPID HSS 70
Tabel 3.28 Profil Inovasi MPP One Stop Smart Service 71
Tabel 3.29 Profil Inovasi KLINIK ARSIP.....72
Tabel 3.30 Profil Inovasi SIMFONI ARSIP 73
Tabel 3.31 Profil Inovasi JAGOAN ARSIP 74
Tabel 3.32 Profil Inovasi ARTIS PD 75
Tabel 3.33 Profil Inovasi AKSI SEKOLAH LITERAT 76
Tabel 3.34 Profil Inovasi SINERGI AKSI PUSTAKA 77
Tabel 3.35 Profil Inovasi LIWAR HSS 78

Tabel 3.36 Profil Inovasi E-SAKIP 79
Tabel 3.37 Profil Inovasi SENADA+ 81
Tabel 3.38 Profil Inovasi SI KETUPAD 82
Tabel 3.39 Profil Inovasi SIP-CORPU HSS 83
Tabel 3.40 Profil Inovasi Kula Upik Angkinang 85
Tabel 3.41 Profil Inovasi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang 86
Tabel 3.42 Profil Inovasi SIAP KADARAT 87
Tabel 3.43 Profil Inovasi KOPER DESA 89
Tabel 3.44 Profil Inovasi SEWARGA DASEL 90
Tabel 3.45 Profil Inovasi OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU 90
Tabel 3.46 Profil Inovasi SIPADI 91
Tabel 3.47 Profil Inovasi SI UTARA 92
Tabel 3.48 Profil Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi 93
Tabel 3.49 Profil Inovasi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 94
Tabel 3.50 Profil Inovasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis 95
Tabel 3.51 Profil Inovasi Master Data Admistrasi SPPD 95
Tabel 3.52 Profil Inovasi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL 96
Tabel 3.53 Profil Inovasi LAMANK Kec. Kandangan 96
Tabel 3.54 Profil Inovasi REKAN SI MAMET 100
Tabel 3.55 Profil Inovasi SISTER 101
Tabel 3.56 Profil Inovasi KASI AMBIL 103
Tabel 3.57 Profil Inovasi AKSI MONALISA 104
Tabel 3.58 Profil Inovasi SI TAMU SIMPUR 105
Tabel 3.59 Profil Inovasi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN 107
Tabel 3.60 Profil Inovasi Sistem Informasi Data Kecamatan 109
Tabel 3.61 Profil Inovasi SIMKuDa 111
Tabel 3.62 Profil Inovasi SiSuKa PD 113
Tabel 3.63 Profil Inovasi BAHANTAR 115
Tabel 3.64 Profil Inovasi JEMPOL PBB 117
Tabel 3.65 Profil Inovasi GasanKU = Gerakan Administrasi Santun 118
Tabel 3.66 Profil Inovasi SIGMA KAMBOJA 119
Tabel 3.67 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN PINDAH 120
Tabel 3.68 Profil Inovasi e SURAT KUASA KEPENGURUSAN 121
Tabel 3.69 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN BEDA NAMA 121
Tabel 3.70 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN AHLI WARIS 121
Tabel 3.71 Profil Inovasi ADEK PUAS MAS 121
Tabel 3.72 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU 124
Tabel 3.73 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU 124

Tabel 3.74 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN PENGHASILAN.....124
Tabel 3.75 Profil Inovasi SI PETENISKU 125
Tabel 3.76 Profil Inovasi e SURAT KEMATIAN LAMA.....127
Tabel 3.77 Profil Inovasi e SURAT KEMATIAN BARU 127
Tabel 3.78 Profil Inovasi BASTIK 3 AH.....127
Tabel 3.79 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN JANDA/DUDA.....129
Tabel 3.80 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH.....129
Tabel 3.81 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH.....129
Tabel 3.82 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN AHLI WARIS KEMATIAN 129
Tabel 3.83 Profil Inovasi e SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG 130
Tabel 3.84 Profil Inovasi e SURAT PERNYATAAN JUAL BELI 130
Tabel 3.85 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN HIBAH.....130
Tabel 3.86 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA KANTOR 131
Tabel 3.87 Profil Inovasi ISMA BADASTARKU 131
Tabel 3.88 Profil Inovasi SI-PIKAT 131
Tabel 3.89 Profil Inovasi Peduli Umpeg.....132
Tabel 3.90 Profil Inovasi SI IDAH PEDALAMAN 133
Tabel 3.91 Profil Inovasi e-RKBMD 134
Tabel 3.92 Profil Inovasi Aksi IPSRS.....135
Tabel 3.93 Profil Inovasi Isma Badastar 136
Tabel 3.94 Profil Inovasi SIEVAK 138
Tabel 3.95 Profil Inovasi ES-KREM HASAN BASRY 140
Tabel 3.96 Profil Inovasi SIPETI.....142
Tabel 3.97 Profil Inovasi BERANAK 144
Tabel 3.98 Profil Inovasi E-Skakmat 146
Tabel 3.99 Profil Inovasi SOPIA 148
Tabel 3.100 Profil Inovasi ROKET 150
Tabel 3.101 Profil Inovasi SIBUNGA 152
Tabel 3.102 Profil Inovasi ANNOR.....152
Tabel 3.103 Profil Inovasi SILAKSA 153
Tabel 3.104 Profil Inovasi SAPA QR 154
Tabel 3.105 Profil Inovasi BUKU TAMU DIGITAL 155
Tabel 3.106 Profil Inovasi LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu 155
Tabel 4.1 MPP One Stop Smart Service (MOSSS) 159
Tabel 4.2 MPP One Stop Smart Service (MOSSS) (Kekuatan) 160
Tabel 4.3 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 160

Tabel 4.4 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 161
Tabel 4.5 Capaian Inovasi 162
Tabel 4.6 Capaian Inovasi 163
Tabel 4.7 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 7) 163
Tabel 4.8 SILANTING (Unit Pelaksana:) 164
Tabel 4.9 SILANTING (Kekuatan) 165
Tabel 4.10 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 165
Tabel 4.11 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 166
Tabel 4.12 Capaian Inovasi 167
Tabel 4.13 Capaian Inovasi 168
Tabel 4.14 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 14) 169
Tabel 4.15 E-SAKIP (Unit Pelaksana:) 170
Tabel 4.16 E-SAKIP (Kekuatan) 171
Tabel 4.17 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 171
Tabel 4.18 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 172
Tabel 4.19 Capaian Inovasi 173
Tabel 4.20 Capaian Inovasi 174
Tabel 4.21 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 21) 174
Tabel 4.22 SAPA HSS (Unit Pelaksana:) 175
Tabel 4.23 SAPA HSS (Kekuatan) 176
Tabel 4.24 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 176
Tabel 4.25 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 177
Tabel 4.26 Capaian Inovasi 178
Tabel 4.27 Capaian Inovasi 179
Tabel 4.28 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 28) 179
Tabel 4.29 Klinik Arsip (Unit Pelaksana:) 180
Tabel 4.30 Klinik Arsip (Kekuatan) 181
Tabel 4.31 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 181
Tabel 4.32 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 182
Tabel 4.33 Capaian Inovasi 183
Tabel 4.34 Capaian Inovasi 184
Tabel 4.35 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 35) 185
Tabel 4.36 SIMKuDa (Unit Pelaksana:) 186
Tabel 4.37 SIMKuDa (Kekuatan) 186
Tabel 4.38 Identitas Inovasi (Nama Inovasi) 186
Tabel 4.39 Rancang Bangun Inovasi (Aktor) 187
Tabel 4.40 Capaian Inovasi 188
Tabel 4.41 Capaian Inovasi 189
Tabel 4.42 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 42) 190
Tabel 5.1 Strategi Penguatan per Sub-Klaster Tematik 196

Tabel 5.2 Pemetaan Enam Inovasi Fokus terhadap Sasaran dan Indikator 198
Tabel 5.3 Pemetaan Enam Inovasi Fokus terhadap Pilar Visi SEMANGAT.....199
Tabel 6.1 Model Optimalisasi MOSSS.....203
Tabel 6.2 Model Optimalisasi SILANTING (Bagian 2).....204
Tabel 6.3 Model Penguatan E-SAKIP (Bagian 3) 204
Tabel 6.4 Model SAPA HSS (Bagian 4).....205
Tabel 6.5 Model Klinik Arsip (Bagian 5) 206
Tabel 6.6 Model SIMKuDa (Bagian 6).....207
Tabel 6.7 Skema Peran Kelembagaan Lintas OPD.....207
Tabel 7.1 Legenda Program pada Peta Jalan Implementasi.....211
Tabel 7.2 Matriks Prioritas Implementasi Rekomendasi 211
Tabel 7.3 Risiko dan Strategi Mitigasi.....212
Tabel 8.1 Proyeksi Dampak Kelembagaan (Pita Kualitatif).....214
Tabel 8.2 Target Kuantitatif IKU RPJMD yang Relevan dengan Enam Inovasi 215
Tabel 8.3 Skenario Keberlanjutan Implementasi Rekomendasi 216
Tabel 8.4 Lampiran 1. Rekapitulasi Lengkap 100 Inovasi kategori Asta.....222

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Strategis

Perencanaan pembangunan daerah yang efektif memerlukan basis data yang akurat mengenai inovasi tata kelola pemerintahan yang telah dan sedang berjalan di lapangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai perangkat daerah yang mengampu fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan, memerlukan pemetaan komprehensif terhadap inovasi administrasi publik agar dapat disinkronkan secara optimal ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan dokumen rekapitulasi resmi "Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita", Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat memiliki 214 inovasi daerah yang dikelompokkan ke dalam delapan kategori Asta Cita, yaitu delapan misi Presiden periode 2025-2029 yang ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029. Kategori Asta Cita 7 - memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba - menjadi rumah bagi 100 inovasi atau 46,7% dari seluruh populasi. Kategori inilah yang menjadi ruang lingkup kajian administrasi publik ini.

Kajian ini disusun untuk menjawab kebutuhan Bapperida atas telaah teknokratis yang runtut mulai dari pemeriksaan kondisi berbasis data, pemetaan dan seleksi inovasi prioritas, analisis permasalahan mendalam, perumusan visi dan strategi, desain model tata kelola, hingga rencana aksi dan proyeksi dampak dengan enam inovasi fokus yang merepresentasikan pilar-pilar utama administrasi publik: MPP *One Stop Smart Service* (MOSSS), SILANTING, E-SAKIP, SAPA HSS, Klinik Arsip, dan SIMKuDa.

1.2 Landasan Filosofis dan Normatif

1.2.1 *Good Governance* dan Reformasi Birokrasi sebagai Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik modern mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)* yang mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Paradigma ini sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional yang menekankan pada

penataan kelembagaan, penguatan tata laksana, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.2.2 Visi "SEMANGAT" dan Kedudukan Bapperida

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 mengusung visi "Membangun Desa, Menata Kota, untuk Mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis (SEMANGAT)." Pilar Teknologis secara jelas relevan dengan agenda transformasi digital administrasi publik, sementara Bapperida sebagai perangkat daerah yang mengoordinasikan perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam memastikan setiap inovasi administrasi publik terintegrasi dengan baik ke dalam dokumen perencanaan resmi.

1.2.3 Inovasi Daerah sebagai Instrumen Perencanaan

Inovasi daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dimaksudkan sebagai instrumen untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan daya saing daerah. Dalam konteks kajian ini, inovasi administrasi publik perlu dipandang bukan sekadar capaian teknis OPD secara individual, melainkan sebagai instrumen kolektif yang harus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah yang disusun Bapperida.

1.3 Landasan Yuridis

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

- Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
- Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029.

1.4 Rumusan Masalah

- Bagaimana gambaran umum kelembagaan dan distribusi statistik inovasi daerah Kabupaten HSS pada kategori Asta Cita 7?
- Bagaimana kerangka pemetaan dan seleksi terhadap enam inovasi yang menjadi fokus penguatan administrasi publik?
- Permasalahan dan tantangan apa yang dihadapi pada level permohonan layanan (hulu), penerbitan dan publikasi (hilirisasi), SDM aparatur, dan saling terhubung antar-sistem sistem dari keenam inovasi tersebut?
- Bagaimana visi dan arah strategis penguatan administrasi publik Kabupaten HSS periode 2026–2030, serta model tata kelola terpadu yang dapat mendukung sinkronisasi RPJMD dan RKPD?
- Apa rencana aksi, matriks implementasi, serta proyeksi dampak dan keberlanjutan dari rekomendasi yang diusulkan?

1.5 Tujuan Kajian

- Memetakan gambaran umum kelembagaan dan menganalisis secara statistik distribusi inovasi daerah pada kategori Asta Cita 7;
- Menyusun kerangka pemetaan, pembobotan, dan seleksi terhadap enam inovasi prioritas yang relevan dengan penguatan administrasi publik;
- Menganalisis secara mendalam permasalahan dan tantangan keenam inovasi pada level permohonan, penerbitan, SDM, dan saling terhubung antar-sistem sistem, termasuk kesesuaiannya terhadap RPJMD;
- Merumuskan visi, strategi, dan model tata kelola terpadu untuk penguatan administrasi publik Kabupaten HSS periode 2026–2030 yang mendukung fungsi sinkronisasi Bapperida;

- Menyusun rencana aksi, matriks implementasi, dan proyeksi dampak serta keberlanjutan dari rekomendasi yang diusulkan.

1.6 Ruang Lingkup

1.6.1 Lingkup Substansi

Kajian ini membatasi substansi analisis pada inovasi daerah yang berorientasi pada administrasi publik dan tata kelola pemerintahan (pelayanan terpadu, digitalisasi adminduk, akuntabilitas kinerja, kearsipan, keuangan desa, pengaduan publik), tidak mencakup inovasi pada ranah sosial-HAM-politik yang telah dikaji pada kajian sebelumnya, kecuali untuk keperluan referensi silang.

1.6.2 Lingkup Data dan Populasi

Populasi data kajian adalah 100 inovasi yang tercatat pada kategori Asta Cita 7 dalam dokumen "Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita" Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seluruh populasi diprofilkan pada Subbab 3.8, sedangkan enam inovasi prioritas dianalisis mendalam pada Bab IV.

1.6.3 Lingkup Kelembagaan

Kajian mencakup peran Bapperida, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Sekretariat Daerah/Diskominfo, serta seluruh kecamatan sebagai pemangku kepentingan utama keenam inovasi fokus.

1.6.4 Lingkup Spasial

Analisis spasial mencakup seluruh 11 kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan penekanan pada pola replikasi inovasi pelayanan terpadu satu pintu yang telah muncul di berbagai kecamatan secara independen.

1.6.5 Lingkup Waktu

Kajian menggunakan data rekapitulasi inovasi tahun 2025–2026 sebagai basis analisis, dengan proyeksi dan rencana aksi disusun untuk periode 2026–2030, selaras dengan periode RPJMD Kabupaten HSS Tahun 2025–2029.

1.6.6 Lingkup Integrasi Kebijakan

Kajian mengkaji keterkaitan keenam inovasi terhadap visi RPJMD Kabupaten HSS 2025–2029 pada level visi (visi-level alignment) serta menyusun rekomendasi konkret bagi fungsi sinkronisasi RKPD yang diampu Bapperida.

1.7 Metodologi

1.7.1 Pendekatan Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan gabungan (*mixed-method*): analisis statistik deskriptif untuk memetakan distribusi populasi data, analisis kualitatif deskriptif-evaluatif untuk mengkaji substansi enam inovasi terpilih, serta analisis kebijakan (*policy analysis*) untuk menilai kesesuaian terhadap RPJMD dan merumuskan rekomendasi bagi Bapperida.

1.7.2 Sumber Data

- Data primer sekunder: dokumen rekapitulasi "Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita" Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Data pelengkap: publikasi resmi OPD terkait (DPMPTSP, Disdukcapil, Dispersip, Bapperida), Kementerian PANRB, dan pemberitaan media resmi Pemkab HSS;
- Kerangka kebijakan: visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029.

1.7.3 Teknik Analisis

- Analisis frekuensi dan porsi untuk memetakan distribusi 100 inovasi ke dalam sebelas sub-klaster tematik;
- Matriks penilaian dan pembobotan kriteria untuk seleksi dan penetapan enam inovasi prioritas (dijelaskan pada Bab III);
- Penilaian kualitatif berskala (1–5) oleh tim kajian terhadap empat dimensi evaluatif untuk keenam inovasi fokus;
- Analisis SWOT gabungan untuk merumuskan strategi penguatan;
- Analisis pemetaan kebijakan (*policy mapping*) terhadap kesesuaian inovasi dengan pilar visi RPJMD;
- Perumusan model optimalisasi menggunakan pendekatan alur proses (*process flow*) dan peta jalan (peta jalan) implementasi.

1.7.4 Kerangka Penilaian Kualitatif

Instrumen penilaian kualitatif dalam kajian ini terdiri atas empat dimensi berskala 1 (rendah) hingga 5 (tinggi): (1) efisiensi proses layanan, (2) tingkat digitalisasi, (3) kejelasan kelembagaan/SOP, dan (4) keterbukaan dan akuntabilitas

publik. Rincian definisi operasional setiap skala disajikan pada Lampiran 2 kajian ini.

1.8 Kerangka Analitis Perspektif Administrasi Publik dan Model Audit Tata Kelola

Untuk memperjelas landasan keilmuan dan kerangka kerja teknis yang digunakan, subbab ini menguraikan ciri khas cara pandang administrasi publik dalam mengkaji inovasi daerah, bentuk rencana kajian yang diadopsi sebagai model audit tata kelola dan evaluasi implementasi kebijakan, metode dan data utama yang digunakan, serta bentuk dan susunan laporan yang menjadi acuan penyusunan dokumen ini.

1.8.1 Ciri Khas Perspektif Keilmuan

Sudut pandang administrasi publik menempatkan inovasi daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan, bukan semata sebagai capaian teknis atau kebaruan teknologi yang berdiri sendiri. Pertanyaan pokok yang diajukan bukan sekadar apakah suatu inovasi menarik atau berbasis teknologi, melainkan:

- Apakah inovasi telah menjadi bagian dari proses kerja resmi pemerintahan, bukan inisiatif informal yang berjalan di luar tata laksana baku;
- Apakah pembagian kewenangan dan tanggung jawab pelaksananya dirumuskan secara jelas;
- Apakah inovasi terhubung dan tercantum dalam dokumen perencanaan resmi (RPJMD, RKPD, Renstra, Renja) serta dokumen penganggaran;
- Apakah inovasi terbukti meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat;
- Apakah inovasi dapat bertahan dan tetap berjalan ketika terjadi pergantian pimpinan atau operator pelaksana;
- Apakah tersedia mekanisme pengawasan, pengaduan, dan evaluasi yang melekat pada inovasi tersebut;
- Apakah inovasi berkontribusi mengurangi kerumitan birokrasi, bukan justru menambah lapisan prosedur baru.

Cara pandang ini menempatkan inovasi daerah sebagai instrumen reformasi birokrasi dan penciptaan nilai publik (public value creation), sehingga penilaian keberhasilannya tidak cukup diukur dari kebaruan gagasan semata, melainkan dari tingkat kesiapan tata kelola dan dampak nyatanya terhadap kualitas pelayanan.

1.8.2 Bentuk Rencana Kajian: Model Audit Tata Kelola dan Evaluasi Implementasi Kebijakan

Format kajian ini mengikuti model audit tata kelola (*governance audit*) dan evaluasi implementasi kebijakan, yang dilaksanakan melalui empat tahap berjenjang sebagai berikut.

Tahap 1 — Pemeriksaan Legalitas dan Kelembagaan

Tahap ini mengkaji dasar hukum dan struktur kelembagaan setiap inovasi, dengan data yang diperiksa mencakup:

- Keputusan pembentukan inovasi;
- Regulasi pendukung;
- Standar operasional prosedur (SOP);
- Struktur tim pelaksana;
- Pemilik proses (process owner);
- Pembagian peran antarpihak;
- Sumber anggaran;
- Keterlibatan mitra kerja sama;
- Integrasi inovasi dengan dokumen perencanaan resmi.

Penjelasan Akademik: *Tahap ini berpijak pada teori otoritas legal-rasional (legal-rational authority) dari Max Weber, yang menegaskan bahwa keberlangsungan sebuah inisiatif dalam birokrasi modern hanya terjamin apabila memiliki landasan hukum dan struktur kewenangan yang jelas, bukan sekadar mengandalkan inisiatif pribadi pimpinan (personalistic governance). Pemeriksaan terhadap SK pembentukan, regulasi pendukung, dan pembagian peran bertujuan memastikan inovasi telah beralih dari gagasan informal menjadi bagian dari struktur formal organisasi (institutionalization), sehingga risiko inovasi terhenti akibat pergantian pimpinan atau operator dapat diminimalkan.*

Tahap 2 — Pemetaan Proses Pelayanan

Tahap ini dilakukan dengan membandingkan kondisi proses pelayanan sebelum dan sesudah inovasi diterapkan, ditinjau dari:

- Proses pelayanan sebelum inovasi;
- Proses pelayanan setelah inovasi;
- Jumlah tahapan layanan;
- Waktu penyelesaian layanan;

- Jumlah petugas yang terlibat;
- Titik pengambilan keputusan;
- Potensi duplikasi proses;
- Potensi hambatan birokrasi yang masih tersisa.

Penjelasan Akademik: *Tahap ini mengadopsi prinsip Business Process Reengineering (BPR) sebagaimana dikembangkan oleh Hammer dan Champy, yaitu membandingkan kondisi proses kerja sebelum dan sesudah perubahan (as-is vs to-be) untuk mengidentifikasi langkah yang tidak memberi nilai tambah (non-value-adding steps) serta titik kemacetan (bottleneck) dalam alur layanan. Dengan memetakan jumlah tahapan, waktu penyelesaian, dan titik pengambilan keputusan, tim kajian dapat menilai secara objektif apakah inovasi benar-benar menyederhanakan birokrasi atau justru menambah lapisan prosedur baru.*

Tahap 3 — Evaluasi Kematangan Organisasi

Tahap ini menilai tingkat kesiapan kelembagaan pelaksana inovasi pada sepuluh aspek berikut:

- Kepemimpinan;
- Kelembagaan;
- Sumber daya manusia (SDM);
- Pendanaan;
- Standar operasional prosedur (SOP);
- Koordinasi lintas-unit;
- Pengawasan;
- Pengaduan;
- Dokumentasi;
- Keberlanjutan.

Penjelasan Akademik: *Kerangka penilaian pada tahap ini diadaptasi dari model tingkat kesiapan organisasi (organizational maturity model) yang lazim digunakan dalam audit tata kelola, seperti pendekatan Capability Maturity Model (CMMI) yang dimodifikasi untuk konteks pemerintahan. Sepuluh dimensi yang dinilai — mulai dari kepemimpinan hingga keberlanjutan — mencerminkan asumsi teoretis bahwa keberhasilan inovasi tata kelola tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh interaksi berbagai elemen kelembagaan secara simultan,*

sehingga penilaian harus bersifat multidimensional dan tidak dapat disederhanakan menjadi satu indikator tunggal.

Tahap 4 — Penilaian Kinerja Pelayanan

Tahap ini mengukur kinerja layanan aktual melalui indikator utama sebagai berikut:

- Kecepatan pelayanan;
- Ketepatan pelayanan;
- Tingkat penyelesaian layanan;
- Kepastian prosedur;
- Jumlah pengaduan yang diterima;
- Waktu respons terhadap pengaduan;
- Tingkat kepuasan pengguna layanan;
- Konsistensi pelaksanaan antarunit dan antarwilayah.

Penjelasan Akademik: *Indikator kinerja pada tahap ini merujuk pada model SERVQUAL yang dikembangkan Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, yang mengukur kualitas layanan melalui dimensi keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), dan kepastian (assurance). Pendekatan ini konsisten dengan prinsip New Public Management yang menekankan pengukuran kinerja berbasis hasil (outcome-based performance measurement), bukan sekadar input atau proses, sehingga kinerja pelayanan publik dapat dibandingkan secara objektif antarwaktu dan antarwilayah.*

1.8.3 Metode Kajian

Kerangka analitis pada subbab 1.8.1 dan 1.8.2 dioperasionalkan melalui sembilan metode kajian berikut, yang melengkapi pendekatan *mixed-method* sebagaimana telah diuraikan pada subbab 1.7:

- Analisis dokumen;
- Pemetaan proses bisnis;
- Wawancara dengan pimpinan dan pelaksana;
- Analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*);
- Penilaian tingkat kesiapan (maturity assessment);
- Analisis target dan realisasi;
- Analisis kesenjangan kebijakan (*policy gap analysis*);

- Analisis data pengaduan;
- Observasi pelayanan secara langsung.

Penjelasan Akademik atas Sembilan Metode Kajian

Kesembilan metode di atas dipilih karena masing-masing memiliki landasan metodologis yang saling melengkapi (metode campuran/*mixed-method*), sebagaimana dijelaskan berikut.

- **Analisis dokumen —** metode penelitian dokumenter *(documentary research)* yang mengkaji dokumen resmi sebagai sumber data primer maupun sekunder, lazim digunakan dalam studi kebijakan publik untuk menelusuri jejak formal sebuah kebijakan atau program.
- **Pemetaan proses bisnis** — teknik *business process mapping* yang memvisualisasikan alur kerja secara sistematis (misalnya dengan notasi BPMN) untuk mengidentifikasi titik inefisiensi dan duplikasi proses.
- **Wawancara dengan pimpinan dan pelaksana** — metode wawancara semi-terstruktur *(semi-structured interview)* dalam tradisi penelitian kualitatif, yang menggali perspektif aktor kunci yang tidak selalu tertangkap dalam dokumen tertulis.
- **Analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis)*** — merujuk pada teori *stakeholder* Freeman, yang memetakan aktor berdasarkan tingkat kekuatan (*power*) dan kepentingan (*interest*) terhadap keberhasilan inovasi.
- **Penilaian tingkat kesiapan (*maturity assessment*) —** metodologi asesmen bertingkat yang mengukur kesiapan institusional pada skala ordinal, sebagaimana dijelaskan pada Tahap 3 subbab 1.8.2.
- **Analisis target dan realisasi** — teknik *gap analysis* yang membandingkan capaian aktual dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja.
- **Analisis kesenjangan kebijakan (*policy gap analysis*) —** pendekatan yang lazim dalam studi implementasi kebijakan *(policy implementation studies*), mengkaji jarak antara kebijakan yang dirancang (*policy as designed*) dan kebijakan yang dijalankan (*policy as implemented).*
- **Analisis data pengaduan** — metode analisis konten terhadap data keluhan masyarakat, digunakan sebagai indikator tidak langsung (*proxy indicator*) atas kualitas layanan yang dirasakan warga.
- **Observasi pelayanan secara langsung** — metode observasi partisipatif maupun non-partisipatif yang memungkinkan tim kajian memverifikasi

temuan dokumen dan wawancara dengan kondisi aktual di lapangan (triangulasi data).

1.8.4 Bentuk Data Utama

Data utama yang menjadi rujukan dalam penerapan kerangka audit tata kelola ini mencakup:

- Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja;
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan realisasi anggaran;
- Standar operasional prosedur (SOP);
- Surat keputusan (SK) pembentukan tim;
- Data volume pelayanan;
- Data waktu penyelesaian layanan;
- Hasil survei kepuasan masyarakat;
- Log atau catatan pengaduan;
- Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah;
- Skor atau dokumen Indeks Inovasi Daerah (IID) maupun *Indeks Good Governance* (IGA), apabila tersedia.

Penjelasan Akademik atas Bentuk Data Utama

Kesepuluh bentuk data di atas dipilih karena secara akademik merepresentasikan bukti (*evidence*) bagi masing-masing dimensi audit tata kelola sebagaimana dijelaskan berikut.

- **Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja** — merupakan hierarki dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi rujukan untuk menilai keselarasan (*policy coherence*) inovasi dengan arah kebijakan resmi.
- **Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan realisasi anggaran** — mencerminkan prinsip akuntabilitas keuangan (*financial accountability)* dalam teori administrasi publik, yaitu keterkaitan antara alokasi sumber daya dan capaian program.
- **Standar operasional prosedur (SOP)** — bukti formal atas standardisasi proses kerja, sejalan dengan prinsip birokrasi rasional *Weber* yang menekankan aturan tertulis dan konsisten.
- **Surat keputusan (SK) pembentukan tim** — dasar legitimasi kelembagaan atas pelaksana inovasi, sejalan dengan prinsip *legal-rational authority* pada Tahap 1 subbab 1.8.2.

- **Data volume pelayanan** — indikator throughput yang lazim digunakan dalam manajemen operasi (*operations management*) untuk mengukur kapasitas dan beban layanan.
- **Data waktu penyelesaian layanan** — indikator efisiensi proses yang sejalan dengan prinsip *lean government*, yaitu meminimalkan waktu tunggu tanpa mengorbankan kualitas.
- **Hasil survei kepuasan masyarakat** — instrumen pengukuran *customer satisfaction index* (CSI) yang menjadi bagian dari model SERVQUAL sebagaimana dijelaskan pada Tahap 4 subbab 1.8.2.
- **Log atau catatan pengaduan** — mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) yang menjadi bagian dari prinsip akuntabilitas horizontal dalam teori *good governance*.
- **Hasil evaluasi kinerja perangkat daerah** — dokumen yang mencerminkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.
- **Skor atau dokumen IID maupun IGA** — instrumen benchmarking eksternal yang memungkinkan perbandingan kinerja tata kelola antardaerah secara nasional, apabila tersedia.

1.8.5 Bentuk dan Susunan Laporan

Mengikuti kerangka audit tata kelola pada subbab 1.8.2, laporan kajian ini pada prinsipnya dapat pula disusun dalam format Laporan Audit Tata Kelola dan Kinerja Inovasi, dengan tujuh bagian pokok sebagai berikut. Substansi ketujuh bagian tersebut telah terakomodasi dalam sistematika Bab I sampai dengan Bab IX kajian ini, sebagaimana dipetakan pada uraian singkat berikut.

Bagian 1 — Ringkasan Eksekutif

- Status tata kelola;
- Tingkat tingkat kesiapan kelembagaan;
- Masalah kritis;
- Keputusan utama;
- Rekomendasi prioritas.

Penjelasan Akademik: *Bagian ini berfungsi sebagai alat komunikasi ringkas bagi pengambil keputusan (decision-maker) yang umumnya memiliki keterbatasan waktu membaca laporan lengkap, sejalan dengan prinsip executive summary dalam manajemen strategis.*

Bagian 2 — Posisi Inovasi dalam Sistem Pemerintahan

- Dasar hukum;
- Organisasi perangkat daerah (OPD) pengampu;
- Pemilik proses;
- Hubungan dengan RPJMD dan Asta Cita;
- Hubungan dengan program dan anggaran terkait.

Penjelasan Akademik: *Bagian ini menegaskan derajat keterlekatan institusional (institutional embeddedness) inovasi dalam struktur formal pemerintahan, sebagai kelanjutan dari pertanyaan pokok pada subbab 1.8.1 mengenai ciri khas perspektif administrasi publik.*

Bagian 3 — Peta Proses Pelayanan

- Proses sebelum inovasi;
- Proses setelah inovasi;
- Titik perubahan (change point);
- Waktu dan tahapan layanan;
- Potensi inefisiensi yang tersisa.

Penjelasan Akademik: *Bagian ini menyajikan visualisasi hasil pemetaan proses sebagaimana dijelaskan pada Tahap 2 subbab 1.8.2, agar perubahan proses kerja dapat dipahami secara intuitif oleh pembaca non-teknis, termasuk pimpinan daerah dan anggota DPRD.*

Bagian 4 — Audit Kematangan

Hasil audit tingkat kesiapan disajikan dalam bentuk *scorecard* sebagaimana Tabel 1.1, yang memuat skor tiap aspek kelembagaan, bukti pendukung, masalah yang ditemukan, dan tindakan lanjutan yang direkomendasikan.

Tabel 1.1 Bentuk dan Susunan Laporan

Aspek	Skor	Bukti	Masalah	Tindakan
Kepemimpinan	1–5	SK penunjukan, komitmen pimpinan	Diisi tim audit	Diisi tim audit
Kelembagaan	1–5	SK tim, struktur organisasi	Diisi tim audit	Diisi tim audit
SDM Pelaksana	1–5	Data kompetensi, pelatihan	Diisi tim audit	Diisi tim audit
Pendanaan	1–5	DPA, realisasi anggaran	Diisi tim audit	Diisi tim audit

Aspek	Skor	Bukti	Masalah	Tindakan
SOP	1–5	Dokumen SOP terbit	Diisi tim audit	Diisi tim audit
Koordinasi Lintas-OPD	1–5	Notulen rapat, nota kesepahaman	Diisi tim audit	Diisi tim audit
Pengawasan	1–5	Laporan hasil pengawasan internal	Diisi tim audit	Diisi tim audit
Pengaduan	1–5	Log pengaduan, tindak lanjut	Diisi tim audit	Diisi tim audit
Dokumentasi	1–5	Arsip uraian dan manfaat inovasi	Diisi tim audit	Diisi tim audit
Keberlanjutan	1–5	Rencana kerja lintas tahun anggaran	Diisi tim audit	Diisi tim audit

Tabel 1.1 Contoh Format Scorecard Audit Kematangan Kelembagaan Inovasi

Penjelasan Akademik: *Bagian ini merupakan output kuantitatif dari Tahap 3 (evaluasi tingkat kesiapan organisasi) pada subbab 1.8.2, disajikan dalam bentuk scorecard agar memudahkan perbandingan antarinovasi maupun evaluasi berkala (periodic review) di masa mendatang.*

Bagian 5 — Kinerja Pelayanan

- Volume layanan;
- Waktu pelayanan;
- Tingkat penyelesaian layanan;
- Jumlah pengaduan;
- Tingkat kepuasan masyarakat.

Penjelasan Akademik: *Bagian ini menyajikan hasil Tahap 4 (penilaian kinerja pelayanan) pada subbab 1.8.2 secara terukur, konsisten dengan prinsip pengukuran kinerja berbasis bukti (evidence-based performance measurement).*

Bagian 6 — Risiko Tata Kelola

- Ketergantungan pada pimpinan tertentu;
- Ketergantungan pada operator tertentu;
- Koordinasi lintas-unit yang masih lemah;
- Regulasi pendukung yang belum memadai;
- Anggaran yang belum terjamin keberlanjutannya.

Penjelasan Akademik: *Bagian ini mengadaptasi kerangka manajemen risiko (risk management framework), seperti pendekatan COSO Enterprise Risk Management, untuk mengidentifikasi faktor yang dapat mengganggu keberlanjutan inovasi setelah masa jabatan pimpinan atau operator tertentu berakhir.*

Bagian 7 — Rekomendasi Administratif

Rekomendasi administratif dikelompokkan menjadi:

- Perbaikan regulasi;
- Perbaikan proses;
- Penguatan organisasi;
- Integrasi perencanaan;
- Penguatan monitoring;
- Keputusan tindak lanjut, yakni melanjutkan, menggabungkan, mereplikasi, atau menghentikan inovasi.

Penjelasan Akademik: *Bagian ini merumuskan dampak kebijakan (policy implications) dari seluruh temuan audit, dikelompokkan menurut jenis intervensi administratif agar mudah ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan, sejalan dengan prinsip actionable recommendations dalam evaluasi kebijakan publik.*

BAB 2
GAMBARAN UMUM

OPTIMALISASI INOVASI DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - PERSPEKTIF TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB II
GAMBARAN UMUM DAN DIAGNOSIS TATA KELOLA ADMINISTRASI PUBLIK

2.1 Profil Wilayah dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memiliki luas wilayah 1.804,94 km² yang terbagi ke dalam 11 kecamatan dan 148 desa/kelurahan, dengan populasi diproyeksikan mencapai 238.413 jiwa pada tahun 2025. Struktur pemerintahan daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, sejumlah badan (termasuk Bapperida), dinas teknis, serta kecamatan yang masing-masing memiliki kewenangan menyelenggarakan pelayanan administratif kepada masyarakat sesuai urusan yang diampu.

Penyelenggaraan pelayanan publik terpadu di Kabupaten HSS ditandai dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang terletak di Lantai III Pasar Losbatu Kandangan, diresmikan pertama kali melalui *soft launching* pada 17 Januari 2022 oleh Bupati HSS, dan *grand launching* pada 31 Mei 2022 yang dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan dan perwakilan Kementerian PANRB. MPP ini menyediakan 117 layanan dari 16 instansi pemerintah, menjadikan Kabupaten HSS sebagai kabupaten ketiga di Kalimantan Selatan yang memiliki MPP.

2.2 Kedudukan Bapperida dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapperida) Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengampu fungsi perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Bapperida berperan sebagai integrator kebijakan yang memastikan seluruh program dan inovasi perangkat daerah, termasuk 100 inovasi pada kategori Asta Cita 7, selaras dengan dokumen perencanaan resmi (RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah).

Dalam konteks kajian ini, Bapperida memiliki dua kepentingan utama: pertama, memastikan inovasi administrasi publik yang telah berjalan tercatat dan terevaluasi secara sistematis sebagai bahan evaluasi RKPD tahunan; kedua, mengidentifikasi kesenjangan dan duplikasi inovasi antar-OPD/kecamatan agar alokasi sumber daya pembangunan lebih efisien.

2.3 Kerangka Kebijakan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan inovasi daerah di Kabupaten HSS diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah, yang diimplementasikan melalui platform SENADA PLUS — Sistem Informasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kerangka ini melengkapi regulasi sektoral lain yang relevan dengan administrasi publik, seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

2.4 Populasi Data Inovasi Menurut Asta Cita dan Posisi Kategori Asta Cita 7

Berdasarkan dokumen rekapitulasi resmi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat memiliki 214 inovasi daerah yang tersebar pada delapan kategori Asta Cita. Sebarannya adalah Asta Cita 1 sebanyak 2 inovasi, Asta Cita 2 sebanyak 11 inovasi, Asta Cita 3 sebanyak 20 inovasi, Asta Cita 4 sebanyak 70 inovasi, Asta Cita 5 belum terisi, Asta Cita 6 sebanyak 8 inovasi, Asta Cita 7 sebanyak 100 inovasi, dan Asta Cita 8 sebanyak 3 inovasi.

Tabel 2.1 Populasi Inovasi Daerah Kabupaten HSS Menurut Kategori Asta

Perspektif	**Jumlah Inovasi**	**Porsi**
Asta Cita 1 - Ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	2	0,9%
Asta Cita 2 - Pertahanan keamanan dan kemandirian bangsa	11	5,1%
Asta Cita 3 - Lapangan kerja, kewirausahaan, industri kreatif, infrastruktur	20	9,3%
Asta Cita 4 - Pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan	70	32,7 %
Asta Cita 5 - Hilirisasi dan industrialisasi	0	0,0%
Asta Cita 6 - Membangun dari desa dan pemerataan ekonomi	8	**3,7%**
Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, birokrasi, antikorupsi	100	**46,7 %**
Asta Cita 8 - Keharmonisan lingkungan, alam, budaya, dan toleransi	3	**1,4%**
TOTAL	214	**100 %**

Asta Cita 7 menjadi rumah bagi 100 inovasi atau 46,7% dari total populasi, menjadikannya kategori dengan jumlah inovasi terbanyak. Dominasi ini menunjukkan bahwa inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejauh ini paling banyak bergerak pada digitalisasi tata kelola dan pelayanan administrasi di lingkungan pemerintahan sendiri. Seluruh 100 inovasi tersebut diprofilkan secara lengkap pada Subbab 3.8.

2.5 Distribusi Inovasi Menurut Sub-Klaster Tematik

Adapun untuk keperluan analisis administrasi publik yang lebih tajam, ke-100 inovasi dikelompokkan ke dalam sebelas sub-klaster tematik berdasarkan substansi nama, fungsi, dan kategori Asta Cita asalnya. Hasil pengelompokan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Distribusi Inovasi Asta Cita 7 Menurut Sub-Klaster Kelembagaan

Sub-Klaster Tematik	Jumlah	Porsi
Kecamatan	27	27,0%
Kelurahan	25	25,0%
Dinas Teknis	15	15,0%
Rumah Sakit Daerah	14	14,0%
Sekretariat Daerah	9	9,0%
Badan Daerah	5	5,0%
Sekretariat DPRD	2	2,0%
Pengawasan Internal	2	2,0%
Belum Teridentifikasi	1	1,0%
TOTAL	100	100%

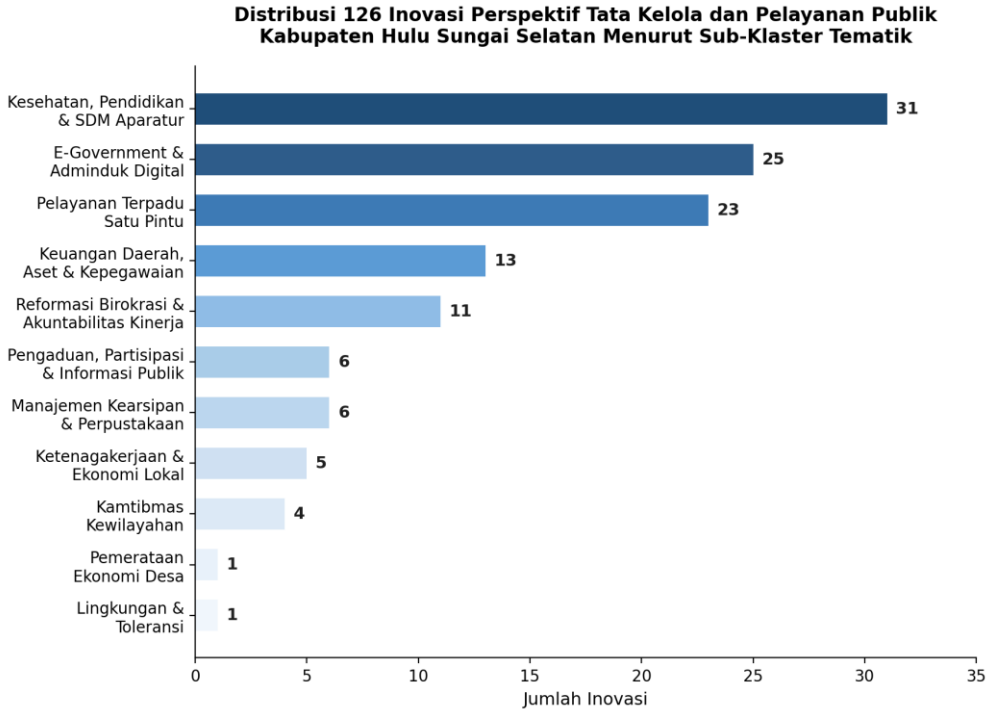

Gambar 2.1 Grafik Distribusi Inovasi per Sub-Klaster Tematik

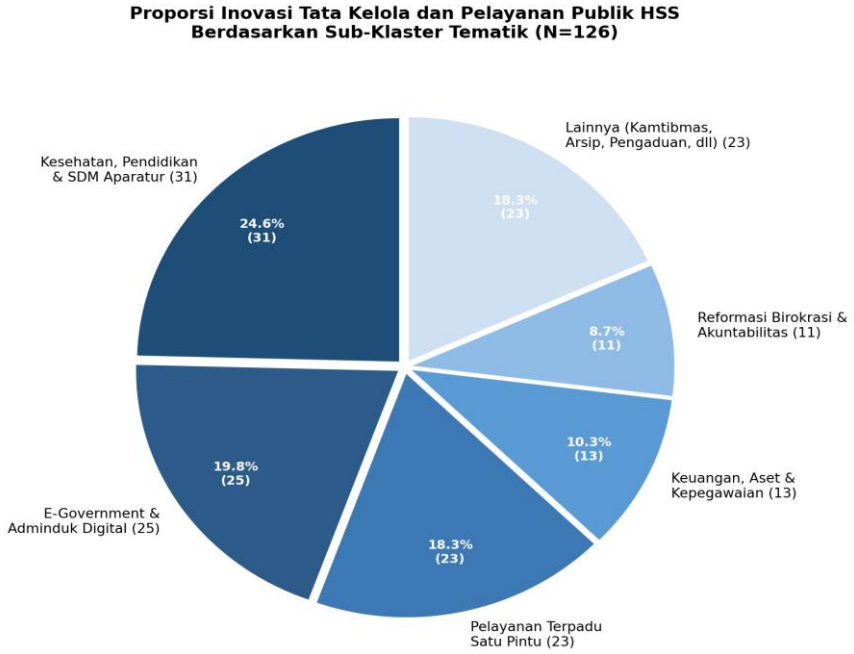

Gambar 2.2 Porsi Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan Publik HSS

Dominasi klaster Kesehatan, Pendidikan, dan SDM Aparatur (24,6%) mencerminkan besarnya porsi inovasi pelayanan dasar yang dikelola OPD teknis (Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pendidikan). Klaster *E-Government* dan Adminduk Digital (19,8%) serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (18,3%) bersama-sama mencakup 38,1% populasi, menegaskan bahwa transformasi digital dan

konsolidasi layanan telah menjadi arus utama reformasi birokrasi daerah. Klaster Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (8,7%) relatif kecil dari sisi jumlah namun memiliki bobot strategis tinggi karena mencakup instrumen inti pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah seperti E-SAKIP.

2.6 Identifikasi Kesenjangan Struktural

2.6.1 Kesenjangan Dokumentasi Data

Sebanyak 18 dari 100 inovasi atau 18% belum memiliki uraian substansi maupun manfaat pada dokumen rekap, sehingga hanya tercatat sebagai nama program program. Kondisi ini membatasi penilaian mutu rancangan dan menjadi salah satu temuan utama kajian mengenai kesenjangan kelengkapan metadata inovasi daerah.

2.6.2 Duplikasi dan Fragmentasi Antar-Kecamatan

Klaster Pelayanan Terpadu Satu Pintu menunjukkan pola menarik: puluhan kecamatan mengembangkan aplikasi/sistem pelayanan administratifnya masing-masing secara independen (SIAP KADARAT di Daha Barat, SI UTARA di Daha Utara, SIPATIN KECAPANG di Kalumpang, SIPOLA di Daha Selatan, dan lain-lain) tanpa kerangka standar teknis yang seragam. Pola ini berisiko menimbulkan duplikasi biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, serta kesulitan saling terhubung antar-sistem data antar-kecamatan.

2.6.3 Kesenjangan Interoperabilitas Sistem

Meskipun beberapa sistem unggulan (E-SAKIP, SILANTING, SIMKuDa) telah terhubung dengan sistem nasional masing-masing (E-Kinerja, SIAK, Siskeudes), belum ditemukan bukti saling terhubung antar-sistem data lintas-sistem tersebut pada level kabupaten. Akibatnya, Bapperida dan OPD terkait masih perlu melakukan kompilasi manual data kinerja dari berbagai sistem yang berjalan sendiri-sendiri (silo data).

BAB 3
PEMETAAN INOVASI

OPTIMALISASI INOVASI DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN - PERSPEKTIF TATA KELOLA
DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB III
PEMETAAN DAN SELEKSI ENAM INOVASI PRIORITAS

3.1 Kerangka Reklasifikasi Inovasi

Reklasifikasi inovasi dalam kajian ini dilakukan dengan mengkaji nama/nama program program dan kategori Asta Cita asal setiap entri data, mengingat 76% entri tidak memiliki uraian dan manfaat yang terdokumentasi (lihat subbab 2.6.1). Proses reklasifikasi menghasilkan sebelas sub-klaster tematik sebagaimana disajikan pada Bab II, yang selanjutnya menjadi dasar penentuan kriteria seleksi inovasi prioritas kajian.

3.2 Proses Bertahap Pemilihan Enam Inovasi Prioritas

Pemilihan enam inovasi prioritas tidak dilakukan secara acak, melainkan melalui tiga tahap seleksi berjenjang agar dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis kepada Bapperida sebagai pemohon kajian.

3.2.1 Tahap 1: Prioritisasi Sub-Klaster

Dari sebelas sub-klaster tematik yang telah dipetakan pada Tabel 2.2, tim kajian menyeleksi klaster yang layak dijadikan representasi utama berdasarkan tiga kriteria: (a) bobot populasi yang signifikan atau strategis terhadap fungsi inti administrasi publik, (b) merepresentasikan fungsi pemerintahan yang berbeda secara struktural sehingga keenamnya tidak saling tumpang tindih, dan (c) memiliki sekurang-kurangnya satu inovasi "flagship" dengan jejak dokumentasi atau publikasi resmi yang dapat ditelusuri di luar basis data rekapitulasi.

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, lima sub-klaster tidak dipilih sebagai representasi utama, dengan justifikasi sebagai berikut:

- Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur (31 inovasi, klaster terbesar) — tidak dipilih karena secara substansi merupakan ranah pelayanan sektoral (kesehatan, pendidikan) yang lebih tepat dikaji tersendiri secara spesifik, bukan representasi administrasi publik generik yang menjadi fokus Bapperida dalam kajian ini;
- Kamtibmas Kewilayahan (4 inovasi) — tidak dipilih karena inovasi utamanya (Bina Persada) telah dikaji secara mendalam pada kajian Perspektif HAM, Sosial, dan Politik sebelumnya, sehingga pemilihan ulang berisiko duplikasi analisis;

- Ketenagakerjaan & Ekonomi Lokal (5 inovasi), Pemerataan Ekonomi Desa (1 inovasi), dan Lingkungan & Toleransi (1 inovasi) — tidak dipilih karena populasinya sangat kecil dan lebih relevan terhadap Perspektif Ekonomi atau Perspektif HAM-Sosial-Politik dibandingkan kategori Asta Cita 7 yang menjadi fokus kajian ini.

Enam sub-klaster yang lolos tahap prioritisasi — Pelayanan Terpadu Satu Pintu, E-Government & Adminduk Digital, Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja, Pengaduan/Partisipasi & Informasi Publik, Manajemen Kearsipan & Perpustakaan, serta Keuangan Daerah/Aset & Kepegawaian — secara kolektif merepresentasikan siklus penuh administrasi publik: dari pelayanan langsung kepada warga, akuntabilitas kinerja internal, partisipasi dan pengaduan publik, hingga pengelolaan dokumen dan keuangan.

3.2.2 Tahap 2: Penentuan Inovasi Flagship per Sub-Klaster Terpilih

Pada masing-masing dari enam sub-klaster terpilih, tim kajian menetapkan satu inovasi "flagship" menggunakan tiga kriteria: (a) memiliki jejak digital atau publikasi resmi yang dapat ditelusuri di luar basis data rekapitulasi — bukan sekadar nama program kosong; (b) diampu oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dengan mandat yang jelas atas fungsi tersebut; dan (c) memiliki cakupan sekurang-kurangnya tingkat kabupaten, bukan inisiatif tunggal tingkat kecamatan/desa, kecuali secara alamiah memang beroperasi pada level tersebut.

Tabel 3.1 Justifikasi Pemilihan Inovasi Flagship per Sub-Klaster

Sub-Klaster	Inovasi Terpilih	Alasan Dipilih Dibanding Kandidat Lain dalam Klaster
Pelayanan Terpadu Satu Pintu	MOSSS	Beroperasi tingkat kabupaten (bukan hanya 1 kecamatan seperti SIAP KADARAT, SI UTARA, dkk.); didukung endorsement langsung Kementerian PANRB dan Gubernur
E-Government & Adminduk Digital	SILANTING	Merupakan platform utama Disdukcapil yang menaungi berbagai layanan adminduk, bukan program tunggal seperti PANTING MARENA atau MENTANG-MENTANG
Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja	E-SAKIP	Instrumen wajib nasional (Perpres 29/2014) dengan jejak digital paling lengkap (situs resmi aktif, integrasi SSO) dibanding SIMKERDA atau Si EKKa
Pengaduan, Partisipasi & Informasi Publik	SAPA HSS	Satu-satunya kanal pengaduan resmi tingkat kabupaten dalam klaster ini, lebih representatif dibanding PADUMASAL yang sifatnya lebih internal-OPD
Manajemen Kearsipan & Perpustakaan	Klinik Arsip	Layanan konsultasi lintas-OPD (bukan sistem internal tunggal seperti SIMFONI ARSIP), terkait langsung dengan prestasi nasional kearsipan 2025

Sub-Klaster	Inovasi Terpilih	Alasan Dipilih Dibanding Kandidat Lain dalam Klaster
Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian	SIMKuDa	Representasi keuangan pada level pemerintahan terendah (desa) yang paling langsung bersinggungan dengan transparansi publik, dibanding sistem internal seperti SI KETUPAD atau SIBUNGA

3.2.3 Tahap 3: Validasi Melalui Matriks Skoring Berbobot

Hasil pemilihan tahap 1 dan tahap 2 selanjutnya divalidasi ulang secara kuantitatif melalui matriks skoring empat dimensi berbobot (efisiensi proses, digitalisasi, kelembagaan, akuntabilitas) sebagaimana disajikan pada subbab 3.4 dan 3.5, agar keputusan seleksi tidak bersifat subjektif semata dan dapat ditelusuri metodologinya oleh Bapperida maupun pihak lain yang mengkaji kajian ini di kemudian hari.

3.3 Analisis Rantai Layanan Administrasi Publik

Analisis rantai layanan mengkaji tahapan generik yang dilalui pemohon layanan administratif: (1) permohonan/pengajuan, (2) verifikasi data dan berkas, (3) pemrosesan oleh OPD berwenang, (4) penerbitan dokumen/keputusan, dan (5) evaluasi serta publikasi capaian. Penelusuran terhadap keenam inovasi fokus menunjukkan titik kritis (bottleneck) paling umum terjadi pada tahap verifikasi (khususnya pada inovasi kecamatan yang masih manual) serta tahap evaluasi dan publikasi (pada SAPA HSS dan SIMKuDa yang minim capaian terpublikasi).

Tabel 3.2 Titik Kritis Rantai Layanan pada Enam Inovasi Fokus

Inovasi	Tahap Rantai Layanan Paling Lemah	Sifat Kelemahan
MOSSS	Interoperabilitas Data Lintas-16 Instansi	Integrasi data antar-instansi dalam MPP belum sepenuhnya digital
SILANTING	Adopsi & Pelatihan Aparatur	Bimtek pengoperasian baru dilaksanakan September 2025
E-SAKIP	Evaluasi Eksternal Berkala	Tergantung siklus evaluasi AKIP oleh Inspektorat/Kemenpan RB
SAPA HSS	Evaluasi & Publikasi	SLA dan status tindak lanjut aduan belum dipublikasikan
Klinik Arsip	Digitalisasi Arsip Lama	Alih media arsip vital masih berjalan bertahap per-OPD
SIMKuDa	Publikasi & Transparansi Publik	Capaian realisasi APBDes belum dipublikasikan merata

3.4 Matriks Penilaian dan Pembobotan Kriteria

Berbeda dengan kajian Perspektif HAM, Sosial, dan Politik yang memprioritaskan jangkauan kelompok rentan, kajian administrasi publik ini memprioritaskan efisiensi proses dan kejelasan kelembagaan sebagai kriteria utama, mengingat fokus kajian pada tata kelola dan pelayanan publik secara umum.

Tabel 3.3 Bobot Kriteria Penilaian Inovasi

Kriteria	**Bobot**
Efisiensi Proses Layanan	30%
Kejelasan Kelembagaan/SOP	30%
Tingkat Digitalisasi	20%
Keterbukaan & Akuntabilitas Publik	20%
TOTAL	**100%**

3.5 Hasil Skoring dan Penetapan Enam Inovasi Prioritas

Berdasarkan pembobotan pada Tabel 3.3 dan skor kualitatif tim kajian (skala 1–5) terhadap setiap kriteria pada Bab IV — diperoleh skor komposit tertimbang sebagai berikut.

Tabel 3.4 Skor Komposit Tertimbang Enam Inovasi Prioritas

Inovasi	**Skor Komposit Tertimbang**	**Peringkat**
E-SAKIP	4,70	1
MPP One Stop Smart Service (MOSSS)	4,60	2
Klinik Arsip	3,50	3
SILANTING	3,30	4
SIMKuDa	2,80	5
SAPA HSS	2,20	6

Hasil skoring menegaskan bahwa E-SAKIP dan MOSSS merupakan inovasi dengan tingkat kesiapan tata kelola tertinggi di antara populasi 100 inovasi yang dianalisis, didukung oleh integrasi sistem yang kuat (E-SAKIP) dan konsolidasi layanan fisik lintas-instansi (MOSSS). SAPA HSS menempati peringkat terendah karena keterbatasan dokumentasi kelembagaan, meskipun tetap dipertahankan sebagai fokus kajian karena signifikansinya sebagai satu-satunya kanal partisipasi dan pengaduan publik yang representatif dalam populasi data — sebagaimana ditegaskan pada Tahap 2 proses seleksi (subbab 3.2).

3.6 Profil Ringkas Enam Inovasi Prioritas

Tabel 3.5 Enam Inovasi Fokus Kajian dan Sub-Klaster Tematiknya

Inovasi	Perangkat Daerah Pengampu	Sub-Klaster Tematik
MOSSS	DPMPTSP (Mal Pelayanan Publik)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SILANTING	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	*E-Government* & Adminduk Digital
E-SAKIP	Bapperida/Bagian Organisasi Setda	Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja
SAPA HSS	Diskominfo/Sekretariat Daerah	Pengaduan, Partisipasi & Informasi Publik
Klinik Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Manajemen Kearsipan & Perpustakaan
SIMKuDa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian

3.7 Keterkaitan Fungsional dan Sistemik Antar-Enam Inovasi

Meskipun keenam inovasi dikembangkan secara independen oleh OPD yang berbeda dan pada mulanya tidak dirancang sebagai satu sistem terpadu, penelusuran tim kajian menemukan bahwa keenamnya sesungguhnya membentuk satu ekosistem administrasi publik yang saling terhubung melalui empat pola relasi fungsional, sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 3.1.

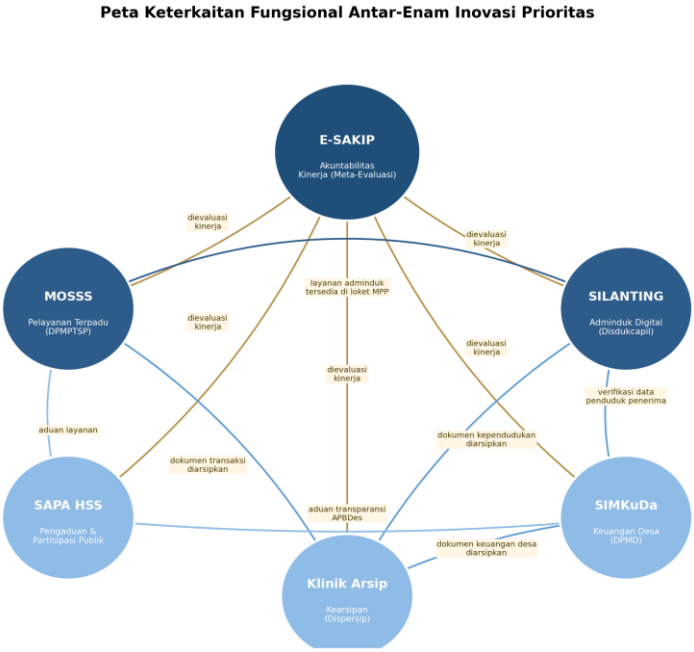

Gambar 3.1 Peta Keterkaitan Fungsional Antar-Enam Inovasi Prioritas

3.7.1 Relasi Hierarkis-Evaluatif

E-SAKIP tidak sejajar dengan lima inovasi lainnya, melainkan berada satu lapisan di atasnya sebagai instrumen meta-akuntabilitas. Kinerja DPMPTSP (pengampu MOSSS), Disdukcapil (pengampu SILANTING), Diskominfo (pengampu SAPA HSS), Dispersip (pengampu Klinik Arsip), dan DPMD (pengampu SIMKuDa) pada akhirnya dievaluasi dan dilaporkan melalui siklus SAKIP yang sama. Dengan demikian, keberhasilan E-SAKIP secara tidak langsung mencerminkan dan memengaruhi kualitas pelaporan kinerja kelima inovasi lainnya.

3.7.2 Relasi Fungsional-Transaksional

SILANTING dan MOSSS memiliki keterkaitan transaksional langsung: layanan administrasi kependudukan yang dihasilkan SILANTING merupakan salah satu dari 117 layanan yang tersedia di loket MOSSS, mengingat Disdukcapil merupakan salah satu dari 16 instansi mitra Mal Pelayanan Publik. Selain itu, SIMKuDa memerlukan data kependudukan yang telah diverifikasi melalui SILANTING untuk memastikan ketepatan sasaran penerima program keuangan desa (misalnya penerima Dana Desa atau bantuan berbasis keluarga).

3.7.3 Relasi Arsip-Sumber

Seluruh dokumen dan bukti transaksi yang dihasilkan oleh MOSSS, SILANTING, dan SIMKuDa — baik dokumen perizinan, dokumen kependudukan, maupun dokumen keuangan desa — pada akhirnya menjadi objek pengelolaan Klinik Arsip sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip. Dengan kata lain, Klinik Arsip berperan sebagai "muara" dokumentasi dari transaksi yang dihasilkan tiga inovasi lainnya.

3.7.4 Relasi Umpan Balik (*Feedback Loop*)

SAPA HSS berfungsi sebagai kanal pengaduan lintas-layanan yang dapat menampung keluhan masyarakat terkait kualitas layanan MOSSS, kendala akses SILANTING, maupun transparansi realisasi APBDes yang dipantau SIMKuDa. Dengan demikian, SAPA HSS menjadi mekanisme umpan balik warga (*citizen feedback loop*) yang secara fungsional menyilang seluruh lima inovasi lainnya, meskipun secara kelembagaan berdiri sendiri di bawah Diskominfo.

Tabel 3.6 merangkum posisi fungsional keenam inovasi dalam satu kerangka ekosistem administrasi publik, yang menjadi dasar penting bagi perumusan Model Sistem Tata Kelola Terpadu pada Bab VI.

Tabel 3.6 Posisi Fungsional Enam Inovasi dalam Ekosistem Administrasi

Posisi dalam Ekosistem	Inovasi	Peran Fungsional
Pelayanan Lini Depan (Front-Line Service)	MOSSS, SILANTING	Menghasilkan layanan dan dokumen langsung kepada warga
Lapisan Keuangan Akar Rumput	SIMKuDa	Tata kelola keuangan tingkat desa, bergantung pada data SILANTING
Kustodian Dokumen (Records Custodianship)	Klinik Arsip	Mengelola arsip yang dihasilkan MOSSS, SILANTING, dan SIMKuDa
Meta-Akuntabilitas	E-SAKIP	Mengevaluasi kinerja seluruh OPD pengampu kelima inovasi lainnya
Umpan Balik Warga (Citizen Feedback)	SAPA HSS	Menampung aduan lintas-layanan terkait kelima inovasi lainnya

Dampak penting dari temuan keterkaitan ini adalah bahwa optimalisasi keenam inovasi tidak dapat dilakukan secara terisolasi per-OPD, melainkan memerlukan koordinasi lintas-sektor yang jelas — sebuah kebutuhan yang secara langsung dijawab melalui usulan Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO) dan *dashboard* SIMONEV INOVASI pada Bab VI.

3.8 Katalog Profil Seluruh Inovasi Administrasi Publik

Sub-bab ini memuat profil seluruh 100 inovasi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tercatat pada kategori Asta Cita 7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Kategori ini merupakan rumah utama inovasi administrasi publik dan sekaligus kategori dengan jumlah inovasi terbanyak, yakni 100 dari 214 inovasi daerah atau 46,7%. Profil disusun mengikuti format baku profil inovasi daerah dan diurutkan sesuai urutan pada dokumen rekap. Setiap profil dilengkapi ilustrasi yang menandai sub-klaster kelembagaan pengelolanya.

Enam inovasi prioritas yang dianalisis mendalam pada Subbab 3.6 dan Bab IV merupakan bagian dari katalog ini. Penyajian katalog secara utuh dimaksudkan agar Bapperida memiliki basis data profil yang lengkap sebagai rujukan pembinaan, replikasi, dan pemutakhiran metadata inovasi daerah pada periode berikutnya.

3.8.1 TIM Pemantau dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri

Tabel 3.7 Profil Inovasi TIM Pemantau dan Evaluasi Kinerja

1	**Nama Inovasi**	TIM Pemantau dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Bagian Organisasi
3	**PIC/Narahubung**	Alfian Dharmawan

4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Sekretariat Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan publik melalui pembentukan tim independen/mandiri untuk memantau, menguji, dan menilai kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh perangkat daerah dan unit layanan. Program ini berfokus pada evaluasi berkala terhadap standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi petugas, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat guna memastikan seluruh unit pelayanan mematuhi asas transparansi, akuntabilitas, serta kepastian hukum sesuai standar pelayanan publik yang berlaku.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Objektivitas & Transparansi Penilaian: Menghasilkan potret kinerja unit pelayanan yang objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan melalui pengawasan mandiri yang terstruktur. Peningkatan Mutu Pelayanan Secara Berkelanjutan: Menjadi sarana deteksi dini atas celah/kelemahan pelayanan sehingga perbaikan standar dan prosedur layanan (SOP) dapat segera ditindaklanjuti oleh unit kerja. Mendorong Budaya Kinerja Berorientasi Pelayanan: Memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas garda terdepan untuk terus meningkatkan kualitas responsivitas, keramahan, dan ketepatan waktu dalam melayani warga. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Memastikan keluhan serta aspirasi pengguna layanan tertangani secara efektif, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pemerintah daerah terus meningkat.

3.8.2 SIPASUM HSS

Tabel 3.8 Profil Inovasi SIPASUM HSS

1	**Nama Inovasi**	SIPASUM HSS (Sistem Informasi Pendaftaran Fasilitas Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Bagian Umum
3	**PIC/Narahubung**	Anzar Aminuddin
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Sekretariat Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi tata kelola pelayanan publik berbasis platform digital terpadu yang dirancang untuk mempermudah, mempercepat, dan melegalkan proses pendaftaran serta pemanfaatan sarana dan fasilitas umum milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh masyarakat, instansi, maupun organisasi. Sistem ini menyediakan informasi ketersediaan tempat, jadwal penggunaan, syarat administrasi, hingga mekanisme pendaftaran secara transparan dan *online*.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Transparansi & Kepastian Jadwal: Memudahkan masyarakat dan organisasi dalam mengecek ketersediaan serta

		mengajukan izin penggunaan fasilitas umum tanpa risiko bentrok jadwal. Efisiensi & Kepastian Prosedur (Paperless): Memangkas rantai birokrasi perizinan penggunaan fasilitas umum sehingga proses pendaftaran menjadi lebih cepat, teratur, dan dapat dipantau secara *real-time*. Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah: Membantu pengelola aset/pemerintah daerah dalam merekapitulasi data pemanfaatan fasilitas umum secara tertib dan transparan. Meningkatkan Kepuasan Layanan Publik: Memberikan kemudahan aksesibilitas bagi warga yang ingin memanfaatkan ruang dan fasilitas publik untuk kegiatan kemasyarakatan, sosial, budaya, maupun olahraga.

3.8.3 SIMKERDA

Tabel 3.9 Profil Inovasi SIMKERDA

1	**Nama Inovasi**	SIMKERDA (Sistem Inovasi Kerja Sama Daerah
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Bagian Pemerintahan
3	**PIC/Narahubung**	Fredy Musyadat
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Sekretariat Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan dan tata kelola pemerintahan berbasis platform digital terpadu yang dirancang untuk mengelola, memfasilitasi, serta memantau seluruh proses kerja sama daerah. Sistem ini mencakup tahapan pengusulan, verifikasi administrasi, pemetaan potensi naskah kesepakatan (MoU/KSD), pelaksanaan perjanjian kerja sama (PKS), hingga evaluasi pelaksanaan kerja sama antar-daerah maupun kerja sama dengan pihak ketiga (swasta, akademisi, dan organisasi) secara transparan dan terintegrasi.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Peningkatan Efisiensi & Tertib Administrasi: Memangkas alur birokrasi dan meminimalisir potensi dokumen kerja sama yang tercecer melalui pengelolaan berkas digital terpusat. Monitoring & Evaluasi *Real-Time*: Memudahkan pimpinan dan tim kerja sama daerah dalam memantau masa berlaku kesepakatan, realisasi komitmen, serta evaluasi kemanfaatan kerja sama secara berkala. Meningkatkan Sinergi & Peluang Kemitraan: Membuka transparansi potensi kerja sama daerah bagi investor, perguruan tinggi, maupun daerah lain untuk berkolaborasi membangun daerah. Akuntabilitas & Kepastian Hukum: Memastikan setiap naskah kerja sama daerah telah melalui tahapan kajian, pengkajian hukum, dan verifikasi standar operasional secara cermat.

3.8.4 Si EKKa

Tabel 3.10 Profil Inovasi Si EKKa

1	**Nama Inovasi**	Si EKKa (Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Kecamatan)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Bagian Pemerintahan
3	**PIC/Narahubung**	Fredy Musyadat
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Sekretariat Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi tata kelola pemerintahan berbasis platform digital terpadu yang dirancang untuk mempermudah pencatatan, pelaporan, pemantauan, dan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Aplikasi ini mengintegrasikan indikator-indikator capaian kinerja program, efektivitas pelayanan publik kecamatan, penyerapan anggaran, hingga pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pelimpahan kewenangan secara *real-time* dan transparan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Objektivitas & Akuntabilitas Evaluasi Kinerja: Menyajikan data penilaian kinerja kecamatan yang terukur, akurat, dan berbasis bukti (evidence-based) guna mendukung evaluasi secara berkala. Efisiensi Administrasi & Pelaporan: Mengurangi beban pelaporan manual berbasis kertas (paperless) serta mempercepat penyampaian laporan kinerja dari kecamatan ke pemerintah kabupaten. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Wilayah: Membantu para Camat dalam memetakan capaian kinerja, mendeteksi hambatan operasional, dan melakukan perbaikan mutu layanan secara mandiri. Pengambilan Kebijakan Tepat Sasaran: Memudahkan pimpinan daerah (Bupati/Sekda) dan perangkat daerah pembina dalam merumuskan kebijakan pembinaan, pengawasan, serta pengalokasian sumber daya bagi kecamatan secara proporsional.

3.8.5 Lakasilah Tuan Hudah Gerah

Tabel 3.11 Profil Inovasi Lakasilah Tuan Hudah Gerah

1	**Nama Inovasi**	Lakasilah Tuan Hudah Gerah
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Bagian Hukum
3	**PIC/Narahubung**	Rusmaliah
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Sekretariat Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan publik dan konsultasi hukum/administrasi berbasis pendekatan yang ramah, responsif, dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Mengusung nama lokal yang komunikatif ("Lakasilah" yang bermakna cepat/segera),

		inovasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum, solusi atas permasalahan keperdataan/administrasi warga, serta edukasi publik secara inklusif. Melalui alur konsultasi yang memangkas kerumitan birokrasi, masyarakat mendapatkan kejelasan (menjadi cerah) atas hak, kewajiban, dan tata cara penyelesaian masalah hukum maupun regulasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Mempermudah Akses Bantuan & Konsultasi Publik: Memberikan ruang konsultasi yang ramah, inklusif, dan mudah diakses oleh warga dari berbagai lapisan tanpa rasa canggung atau ragu. Peningkatan Literasi & Kesadaran Hukum Warga: Membantu masyarakat memahami aturan, prosedur administrasi, dan hak-hak hukumnya sehingga penyelesaian masalah warga menjadi terarah (cerah). Penyelesaian Masalah Secara Cepat & Responsif: Menekan hambatan birokrasi melalui pemberian rekomendasi atau solusi yang cepat, tepat, dan transparan (lakasilah). Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Aparatur: Membangun citra positif pemerintah daerah dan aparatur hukum/layanan sebagai mitra solusi warga yang empatik, profesional, dan melayani.

3.8.6 SIDALI

Tabel 3.12 Profil Inovasi SIDALI

1	**Nama Inovasi**	SIDALI (Sistem Informasi Tim Pengendalian Inflasi)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
3	**PIC/Narahubung**	Heru Kurnia Azra
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Sekretariat Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi tata kelola ekonomi daerah dan pemantauan harga berbasis platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan (Ekobang) Sekretariat Daerah untuk mendukung kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Aplikasi ini berfungsi untuk mencatat, mengolah, dan memetakan data perkembangan harga bahan pokok, ketersediaan pasokan komoditas, hingga neraca pangan secara *real-time* guna merumuskan langkah intervensi pengendalian inflasi daerah yang cepat, tepat, dan terukur.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Pemantauan Harga & Pasokan Secara *Real-Time*: Memudahkan pemantauan pergerakan harga kebutuhan pokok serta ketersediaan stok pangan di pasar-pasar wilayah secara akurat. Ekskalasi & Intervensi Dini (Early Warning System): Memberikan sinyal peringatan dini atas kenaikan harga atau kelangkaan barang sehingga pemerintah daerah dapat segera merencanakan operasi pasar atau pasar murah secara presisi.

		Pengambilan Kebijakan Berbasis Data (Data-Driven Policy): Membantu Bupati dan pengambil keputusan yang tergabung dalam TPID dalam merumuskan strategi penanganan inflasi sesuai kondisi lapangan. Menjaga Stabilitas Ekonomi & Daya Beli Masyarakat: Membantu menekan angka inflasi daerah demi menjaga keterjangkauan harga pangan dan daya beli masyarakat luas.

3.8.7 KETUPAT SETDA

Tabel 3.13 Profil Inovasi KETUPAT SETDA

1	**Nama Inovasi**	KETUPAT SETDA (Kesatuan Tugas Pelaporan Terintegrasi Sekretariat Daerah)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Bagian Perencanaan dan Keuangan
3	**PIC/Narahubung**	Miftah Haris
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Sekretariat Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi tata kelola administrasi dan pelaporan internal berbasis tim kerja khusus serta sistem pelaporan terpadu di lingkungan Sekretariat Daerah. Inovasi ini menyatukan alur pencatatan, konsolidasi, hingga sinkronisasi laporan kinerja, kegiatan, dan realisasi program kerja dari seluruh bagian di bawah Sekretariat Daerah ke dalam satu mekanisme koordinasi terintegrasi untuk meningkatkan transparansi, kecermatan, dan ketepatan waktu pelaporan instansi.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Integrasi & Pemusatan Data Pelaporan: Menghilangkan ego sektoral/sepotong-sepotong antar-bagian dengan menghimpun seluruh dokumen dan data pelaporan kegiatan ke dalam satu alur kerja yang teratur. Percepatan & Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan: Memangkas keterlambatan penyampaian laporan periodik kepada pimpinan maupun instansi pembina melalui mekanisme kerja kesatuan tugas yang terstruktur. Peningkatan Akuntabilitas & Akurasi Data: Meminimalisir risiko duplikasi data atau kekeliruan administrasi melalui proses verifikasi dan penyelarasan laporan secara silang. Mendukung Pengambilan Keputusan Pimpinan: Memudahkan pimpinan (Sekretaris Daerah / Bupati) dalam memantau rekapitulasi progres kinerja dan penyerapan program di lingkungan Sekretariat Daerah secara menyeluruh (comprehensive view).

3.8.8 SI HADRAH

Tabel 3.14 Profil Inovasi SI HADRAH

1	**Nama Inovasi**	SI HADRAH (Sistem Informasi Hibah dan Rekomendasi Daerah)

2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Bagian Kesejahteraan Rakyat
3	**PIC/Narahubung**	Fitri
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Sekretariat Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan publik dan tata kelola administrasi berbasis platform digital terpadu yang dirancang untuk mengelola proses pengusulan, verifikasi, hingga penerbitan rekomendasi dan pencairan bantuan hibah/bantuan keuangan daerah. Sistem ini memfasilitasi organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengajukan proposal bantuan secara transparan, mudah dipantau (*real-time*), serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Transparansi & Akuntabilitas Pengelolaan Hibah: Menjamin seluruh alur pengajuan, verifikasi kelayakan, hingga penyaluran hibah daerah tercatat secara terbuka, teratur, dan dapat dipertanggungjawabkan (auditable). Mempermudah & Mempercepat Layanan Pengusulan: Memudahkan organisasi kemasyarakatan dan lembaga penerima dalam mengunggah berkas persyaratan serta memantau status rekomendasi tanpa harus datang berkali-kali ke kantor dinas. Mencegah Duplikasi & Pengajuan Ganda: Membantu tim verifikator pemerintah daerah dalam memetakan serta memvalidasi penerima hibah guna menghindari potensi bantuan ganda (overlapping) atau ketidaklayakan administrasi. Efisiensi Administrasi & Tata Kelola Digital: Memangkas rantai birokrasi manual, mengurangi penggunaan kertas (paperless), dan mempercepat penerbitan surat rekomendasi hibah daerah secara presisi.

3.8.9 Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah

Tabel 3.15 Profil Inovasi Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala

1	**Nama Inovasi**	Media Pengamanan dan Pengawalan Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
3	**PIC/Narahubung**	Meily
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Sekretariat Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi sistem koordinasi dan media informasi terpadu yang dirancang untuk mendukung kelancaran, ketertiban, serta kepastian pengamanan dan pengawalan agenda kegiatan Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati). Sistem/platform ini mengintegrasikan pemutakhiran jadwal kegiatan dinas,

		pemetaan rute perjalanan, mitigasi potensi gangguan keamanan/kerawanan wilayah, hingga mekanisme komunikasi langsung antara Tim Pengamanan/Pengawalan (Satpol PP/Ajudan/Protokol) dengan pihak kepolisian dan instansi terkait secara *real-time*.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Peningkatan Kepastian & Efektivitas Pengawalan: Memastikan seluruh rangkaian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berjalan lancar, aman, dan tepat waktu melalui perencanaan rute serta koordinasi lapangan yang presisi. Kesiapsiagaan & Mitigasi Risiko Tanggap Cepat: Memudahkan tim pengamanan dalam mendeteksi dan merespon potensi hambatan lalu lintas, gangguan ketertiban, maupun situasi darurat selama kunjungan kerja. Koordinasi Lintas Sektor yang Terintegrasi: Memperkuat sinergi dan kecepatan komunikasi antara bagian protokol, tim pengamanan dalam/luar, Satpol PP, serta aparat kepolisian/TNI. Efisiensi & Kepastian Informasi Agenda: Mengurangi risiko miskomunikasi alur perjalanan atau perubahan agenda dinas pimpinan secara mendadak melalui sistem penyampaian informasi yang terpusat dan mudah diakses tim pengawal.

3.8.10 ePropemperda

Tabel 3.16 Profil Inovasi ePropemperda

1	**Nama Inovasi**	ePropemperda
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Sekretariat DPRD
3	**PIC/Narahubung**	Diewa
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Sekretariat DPRD
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi tata kelola legislasi berbasis sistem informasi terpadu yang dikembangkan oleh Sekretariat DPRD untuk mengelola, menyelaraskan, serta memantau data dan progres/tahapan pembentukan Peraturan Daerah secara digital. Sistem ini dirancang untuk menyusun alat perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) secara tertib, terukur, dan tersistematis, sehingga seluruh proses penyusunan Ranperda antara DPRD bersama Pemerintah Daerah dan Kemenkumham dapat berjalan transparan serta memprioritaskan regulasi yang berdampak bagi masyarakat.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Peningkatan Efisiensi & Tertib Administrasi Legislasi: Mempermudah pemantauan alur dan tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah dari pengusulan hingga penetapan tanpa hambatan birokrasi manual. Mencegah Tumpang Tindih Regulasi: Memastikan penyusunan peraturan daerah memperhatikan skala prioritas,

		harmonisasi hukum, serta tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Meningkatkan Transparansi & Aksesibilitas Publik: Memudahkan masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam memantau perkembangan dan keterbukaan informasi produk hukum daerah yang sedang dibahas. Memperkuat Sinergi Lintas Instansi: Mengoptimalkan koordinasi, fasilitasi, dan sinkronisasi kerja antara Sekretariat DPRD, Pemerintah Daerah, dan Kanwil Kemenkumham/Kementerian terkait.

3.8.11 ParlemenGO!

Tabel 3.17 Profil Inovasi ParlemenGO!

1	**Nama Inovasi**	ParlemenGO!
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Sekretariat DPRD
3	**PIC/Narahubung**	Diewa
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Sekretariat DPRD
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan publik dan keterbukaan informasi berbasis platform digital interaktif yang dikembangkan oleh Sekretariat DPRD untuk mendekatkan wakil rakyat dengan masyarakat. Aplikasi/sistem ini menyediakan kanal terpadu bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan (e-Aspirasi), memantau agenda persidangan/kunjungan kerja DPRD, mengunduh produk hukum daerah, serta mengakses siaran/informasi kegiatan parlemen secara cepat, transparan, dan dapat diakses kapan saja melalui perangkat *mobile*/smartphone.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Mempermudah Akses Aspirasi & Pengaduan Warga: Masyarakat dapat menyuarakan masukan, kritik, dan usulan pembangunan kepada anggota DPRD tanpa terhalang jarak dan prosedur birokrasi yang rumit. Meningkatkan Transparansi & Akuntabilitas Parlemen: Membuka akses publik terhadap kegiatan persidangan, hasil penjaringan aspirasi (reses), hingga penetapan regulasi daerah. Respon Cepat & Pemantauan Progres: Memudahkan masyarakat dalam memantau tindak lanjut (status/progress) atas aspirasi yang telah disampaikan kepada fraksi atau komisi terkait. Mendorong Partisipasi Politik Inklusif: Mengajak kelompok muda, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan serta pengawalan kebijakan pembangunan daerah.

3.8.12 SEHATI

Tabel 3.18 Profil Inovasi SEHATI

1	**Nama Inovasi**	SEHATI (SINERGITAS PENCEGAHAN GRATIFIKASI)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Inspektorat Daerah
3	**PIC/Narahubung**	RIza
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Pengawasan Internal
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan yang bersih berbasis penguatan ekosistem integritas dan pencegahan korupsi melalui sinergi lintas perangkat daerah, aparatur, serta elemen masyarakat. Program ini mengintegrasikan mekanisme pelaporan gratifikasi yang ramah dan aman (Whistleblowing System / Pelaporan Gratifikasi), sosialisasi serta edukasi masif mengenai budaya antikorupsi, dan pembentukan Agen Integritas di unit-unit layanan publik guna meminimalisir serta mencegah praktik penerimaan gratifikasi, suap, dan benturan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Memperkuat Budaya Integritas & Antikorupsi: Mendorong kesadaran dan kepatuhan ASN serta pejabat publik untuk secara proaktif menolak dan melaporkan setiap bentuk penerimaan gratifikasi yang dianggap suap. Kemudahan & Perlindungan Pelaporan: Menyediakan sarana pelaporan gratifikasi yang akuntabel, rahasia, dan mudah diakses sehingga memberikan rasa aman bagi pelapor (whistleblower). Peningkatan Kualitas & Kebersihan Layanan Publik: Menghilangkan praktik pungutan liar (pungli), imbalan jasa yang tidak sah, serta penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan masyarakat. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi & MCP KPK: Mendukung peningkatan capaian Indeks Tata Kelola Pemerintahan, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), dan Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK di daerah.

3.8.13 SAPA HSS

Tabel 3.19 Profil Inovasi SAPA HSS

1	**Nama Inovasi**	SAPA HSS (Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Inspektorat Daerah
3	**PIC/Narahubung**	RIza
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Pengawasan Internal
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan publik terpadu berbasis kanal pengaduan masyarakat yang dirancang untuk menampung, mengelola,

		serta menindaklanjuti keluhan, aspirasi, permintaan informasi, dan masukan warga Hulu Sungai Selatan terhadap layanan pemerintah daerah. Sistem ini terintegrasi langsung dengan unit kerja terkait guna memastikan setiap laporan yang masuk mendapatkan respons yang cepat, transparan, terukur, dan dapat dipantau perkembangannya secara *real-time*.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Mempermudah Akses Laporan & Pengaduan Warga: Memberikan sarana komunikasi yang mudah, responsif, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau aspirasi tanpa prosedur yang rumit. Percepatan Tindak Lanjut (Quick Response): Memangkas hambatan koordinasi antar-instansi sehingga aduan/masalah publik (seperti fasilitas umum rusak, masalah sosial, atau keluhan layanan) dapat direspon dan ditangani dengan cepat. Meningkatkan Transparansi & Akuntabilitas: Memungkinkan pelapor untuk memantau progres penanganan aduan secara terbuka sehingga menciptakan sistem pengawasan publik yang transparan. Bahan Evaluasi Kebijakan & Kinerja Birokrasi: Menyediakan basis data aduan yang terstruktur sebagai rujukan pimpinan daerah dalam mengevaluasi efektivitas kinerja unit layanan publik serta menentukan prioritas pembangunan.

3.8.14 PANTING MARENA

Tabel 3.20 Profil Inovasi PANTING MARENA

1	**Nama Inovasi**	PANTING MARENA (PERCEPATAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL MELALUI PERANGKAT DESA DIKANTOR DESA KABUPATEN)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	**PIC/Narahubung**	Eko
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan administrasi kependudukan (Adduk) berbasis jemput bola dan kolaborasi tingkat lokal yang memperdayakan Perangkat Desa/Kelurahan sebagai fasilitator aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui inovasi ini, masyarakat tidak perlu lagi mengantre di kantor Disdukcapil atau Kecamatan, melainkan dapat melakukan proses verifikasi dan aktivasi IKD secara cepat, mudah, dan dekat cukup di Kantor Desa/Kelurahan setempat melalui pendampingan petugas desa yang telah dilatih.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Percepatan Cakupan Target IKD: Mengakselerasi persentase cakupan kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di daerah secara masif melalui pemanfaatan jaringan jaringan aparatur desa/kelurahan.

		Kemudahan & Aksesibilitas Bagi Warga: Mendekatkan tempat pelayanan IKD ke lingkungan permukiman warga, menghemat waktu, serta menekan biaya transportasi masyarakat (terutama masyarakat desa terpencil). Penguatan Sinergi Pemkab & Pemerintah Desa: Memperkuat kapasitas serta peran aktif aparatur desa dalam mendukung transformasi digital dan ekosistem *e-Government* daerah. Efisiensi Pelayanan Disdukcapil: Menghindari penumpukan antrean pemohon IKD di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maupun kantor Kecamatan.

3.8.15 MENTANG-MENTANG

Tabel 3.21 Profil Inovasi MENTANG-MENTANG

1	**Nama Inovasi**	MENTANG-MENTANG (MELAHIRKAN TENANG, DOKUMEN DATANG) V2
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	**PIC/Narahubung**	Eko
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan publik terpadu di bidang administrasi kependudukan dan kesehatan yang merupakan pengembangan (upgrading) dari versi sebelumnya. Program ini memberikan kemudahan bagi ibu melahirkan di fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, maupun klinik bersalin) untuk langsung mendapatkan paket dokumen kependudukan secara terintegrasi—seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) baru, dan Kartu Identitas Anak (KIA)—sebelum pulang ke rumah. Versi kedua (V2) menghadirkan pemutakhiran sistem integrasi data yang lebih cepat, perluasan cakupan mitra faskes, serta kemudahan pengiriman dokumen secara langsung demi kenyamanan dan ketenangan keluarga baru.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Kemudahan & Ketenangan Bagi Orang Tua Baru: Ibu dan keluarga dapat fokus pada proses pemulihan dan perawatan bayi (melahirkan tenang) tanpa perlu repot mengurus administrasi ke kantor dinas kependudukan. Penerbitan Dokumen Terintegrasi & Cepat (3-in-1): Sekali proses, warga langsung mendapatkan beberapa dokumen kependudukan sekaligus (Akta Kelahiran, KK terbaru, dan KIA) secara akurat. Peningkatan Cakupan Kepemilikan Dokumen Anak: Mengakselerasi persentase kepemilikan Akta Kelahiran dan KIA sejak bayi baru lahir guna menjamin hak-hak sipil anak di daerah. Penguatan Sinergi Faskes & Disdukcapil: Memperkuat kolaborasi sistemik dan pengintegrasian data layanan antara

		fasilitas kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3.8.16 DIAJAK MESRA

Tabel 3.22 Profil Inovasi DIAJAK MESRA

1	**Nama Inovasi**	DIAJAK MESRA (Difasilitasi Antar Jemput Akta Kematian Melalui Serikat Kematian)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	**PIC/Narahubung**	Eko
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan publik yang empatik dan jemput bola di bidang administrasi kependudukan melalui kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Pengurus Serikat Kematian / Rukun Kematian di tingkat desa/kelurahan. Inovasi ini hadir untuk memberikan kemudahan bagi keluarga yang sedang berduka dengan memproses dan menyerahkan dokumen kependudukan (Akta Kematian, Kartu Keluarga baru, serta KTP-el status perubahan) secara langsung kepada ahli waris tanpa perlu mengurus sendiri ke kantor pelayanan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Pelayanan Berbelas Kasih & Memudahkan Masyarakat: Memberikan kepedulian dan kenyamanan bagi keluarga duka sehingga tidak dibebani urusan administrasi saat menghadapi musibah. Peningkatan Akurasi & Pemutakhiran Data Kependudukan: Mempercepat pembersihan (cleansing) dan perapian data penduduk (database) secara *real-time*, mendeteksi angka kematian secara presisi, serta mencegah salah sasaran bantuan sosial/data pemilih. Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Lokal: Mengoptimalkan peran serta pengurus Serikat/Rukun Kematian dan perangkat desa sebagai fasilitator pelayanan kependudukan di garis terdepan. Penerbitan Dokumen Terintegrasi (Paket Layanan): Menyerahkan beberapa dokumen kependudukan yang terdampak sekaligus (Akta Kematian, perbaikan KK, dan perubahan status KTP pasangan) secara cepat dan tepat.

3.8.17 INOVASI SILANTING

Tabel 3.23 Profil Inovasi INOVASI SILANTING

1	**Nama Inovasi**	INOVASI SILANTING (SISTEM LAYANAN TERINTEGRASI SECARA DARING) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

3	**PIC/Narahubung**	Eko
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan publik berbasis platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memberikan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan secara *online*. Melalui aplikasi SILANTING, masyarakat maupun perangkat desa/kecamatan dapat mengajukan permohonan berbagai dokumen administrasi kependudukan (seperti KTP-el, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan perpindahan penduduk) secara mandiri, praktis, dan dapat diakses dari mana saja tanpa harus datang dan mengantre langsung di kantor dinas.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Mempermudah & Mempercepat Layanan Kependudukan: Masyarakat dapat mengajukan permohonan penerbitan dokumen Adduk secara fleksibel dari rumah atau fasilitas desa setempat melalui jaringan internet. Efisiensi Waktu & Biaya Operasional Warga: Menghemat biaya transportasi serta memangkas waktu tempuh warga (terutama warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan kabupaten). Pemberdayaan Aparatur Desa/Kecamatan: Memperkuat peran perangkat desa dan kecamatan sebagai fasilitator layanan kependudukan daring di tingkat lokal melalui sistem yang terintegrasi. Transparansi & Akuntabilitas Tata Kelola Adduk: Memudahkan pemantauan status proses (tracking) permohonan secara *real-time*, meminimalisir praktik percaloan, dan mendukung transformasi *e-Government* daerah.

3.8.18 SIM PKB

Tabel 3.24 Profil Inovasi SIM PKB

1	**Nama Inovasi**	SIM PKB (Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Perhubungan
3	**PIC/Narahubung**	m. iqyan firdaus
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan publik dan tata kelola berbasis platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan untuk modernisasi proses pengujian berkala kendaraan bermotor (uji kir). Sistem ini mengintegrasikan pendaftaran uji secara *online*, penjadwalan pendaftaran, pencatatan hasil uji secara otomatis dari alat uji mekanis, hingga integrasi pembayaran digital (e-

7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Peningkatan Keselamatan Lalu Lintas & Kelaikan Kendaraan: Memastikan seluruh kendaraan angkutan barang dan orang yang beroperasi memenuhi standar teknis kelaikan jalan secara objektif dan akurat. Efisiensi & Bebas Antrean (Paperless/Digital): Memudahkan pemilik/pengemudi kendaraan dalam mendaftar dan memilih jadwal uji dari rumah/lokasi kerja tanpa harus mengantre lama di lokasi pengujian. Pencegahan Pungli & Transparansi Hasil Uji: Meminimalisir interaksi langsung dan praktik manipulasi data/sogokan melalui digitalisasi alur pembayaran serta pencatatan hasil uji otomatis (*real-time*). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD): Mendorong ketertiban dan akuntabilitas retribusi pengujian kendaraan bermotor melalui sistem pembayaran nontunai yang tercatat secara tepat.

3.8.19 PAPI ALIN

Tabel 3.25 Profil Inovasi PAPI ALIN

1	**Nama Inovasi**	PAPI ALIN
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Perhubungan
3	**PIC/Narahubung**	m. iqyan firdaus
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan publik dan tanggap cepat keselamatan jalan berbasis kanal pengaduan digital yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan. PAPI ALIN memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan secara langsung kerusakan, gangguan operasional, atau malfungsi pada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL/lampu lalu lintas) serta sarana prasarana perlengkapan jalan lainnya. Dengan mengintegrasikan sistem pelaporan berbasis foto/lokasi *real-time* dan sistem respon petugas teknis, inovasi ini memastikan setiap aduan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti untuk menjaga kelancaran dan keselamatan berlalu lintas.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Hadirnya inovasi PAPI ALIN memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu pelayanan keselamatan jalan dan efisiensi kinerja Dinas Perhubungan. Melalui pemanfaatan kanal pengaduan ini, potensi kemacetan dan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan atau padamnya lampu lalu lintas dapat ditekan secara dramatis. Hal ini tercipta berkat mekanisme quick response yang memangkas rantai birokrasi, sehingga laporan masyarakat yang masuk beserta koordinat lokasi dan bukti foto dapat langsung diterima oleh tim teknis di lapangan untuk ditindaklanjuti secara presisi. Di samping itu, PAPI ALIN berhasil mendorong partisipasi aktif warga sebagai mitra pemerintah dalam menjaga fasilitas

		umum, menciptakan ruang pengawasan publik yang inklusif dan transparan. Dari sisi tata kelola internal, keberadaan inovasi ini membantu Dinas Perhubungan dalam memetakan serta merekapitulasi riwayat kerusakan sarana lalu lintas secara digital dan terstruktur, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi pemeliharaan aset daerah serta memupuk kepercayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan aparatur pemerintah daerah.

3.8.20 KAPAS BARA

Tabel 3.26 Profil Inovasi KAPAS BARA

1	**Nama Inovasi**	KAPAS BARA
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Perhubungan
3	**PIC/Narahubung**	m. iqyan firdaus
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.21 SITERANG PPID HSS

Tabel 3.27 Profil Inovasi SITERANG PPID HSS

1	**Nama Inovasi**	SITERANG PPID HSS
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
3	**PIC/Narahubung**	Yogo
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 – Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi keterbukaan informasi 62asyar dan tata 62asyar pemerintahan berbasis platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Aplikasi/sistem ini dirancang untuk memfasilitasi pelayanan permohonan informasi 62asyar, pengajuan keberatan, serta penyediaan daftar informasi 62asyar (berkala, serta-merta, dan setiap saat) dari seluruh Perangkat Daerah secara terpusat, cepat, akurat, dan dapat diakses secara mandiri oleh 62asyarakat luas secara online.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Kehadiran inovasi SITERANG PPID HSS memberikan dampak besar terhadap penguatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi 62asyar di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Melalui platform ini, 62asyarakat dapat mengajukan permohonan informasi serta memantau status penyelesaiannya secara real-time tanpa perlu datang langsung ke kantor dinas, sehingga menghemat waktu, biaya, serta memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit.

		Di samping itu, inovasi ini mendorong terwujudnya tata 63asyar pemerintahan yang bersih (good governance) dengan mewajibkan seluruh Perangkat Daerah menyatukan dan mengintegrasikan pengelolaan dokumen 63asyar ke dalam satu pintu. Hal ini tidak hanya mempermudah pemenuhan hak rasa ingin tahu warga negara sesuai amanat undang-undang, tetapi juga meningkatkan kepercayaan 63asyarakat (public trust) serta mengoptimalkan capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik di daerah.

3.8.22 MPP One Stop Smart Service

Tabel 3.28 Profil Inovasi MPP One Stop Smart Service

1	**Nama Inovasi**	MPP One Stop Smart Service (MOSSS)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	**PIC/Narahubung**	Bagus
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan publik terpadu dan modern berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan seluruh jenis perizinan, non-perizinan, serta layanan administrasi instansi vertikal maupun daerah di Mall Pelayanan Publik (MPP). MOSSS mengusung konsep smart service dengan menggabungkan sistem antrean elektronik pintar, pelayanan mandiri (self-service kiosk), konsultasi *online*, hingga integrasi pemrosesan dokumen secara digital dalam satu pintu, guna memberikan pengalaman pelayanan yang cepat, transparan, dan terukur bagi seluruh warga serta pelaku usaha.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan inovasi MPP One Stop Smart Service (MOSSS) membawa perubahan transformatif dalam meningkatkan kualitas dan kemudahan akses pelayanan publik di daerah. Dengan memusatkan dan memdigitalisasi seluruh jenis layanan dalam satu platform pintar, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengurus berbagai dokumen perizinan maupun administrasi secara efisien tanpa harus berpindah-pindah lokasi instansi, sehingga menghemat waktu dan biaya secara signifikan. Selain memangkas alur birokrasi yang rumit, MOSSS mendorong terciptanya kepastian standar pelayanan—mulai dari kepastian durasi, biaya, hingga kejelasan syarat—yang secara otomatis menekan potensi praktik percaloan dan pungutan liar. Dampak luasnya, kemudahan dan transparansi yang ditawarkan inovasi ini mampu menciptakan iklim investasi daerah yang lebih kondusif, meningkatkan kepuasan masyarakat (Public Satisfaction Index), serta memperkuat citra pemerintah daerah sebagai entitas yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan berbasis digital-governance.

3.8.23 KLINIK ARSIP

Tabel 3.29 Profil Inovasi KLINIK ARSIP

1	**Nama Inovasi**	KLINIK ARSIP
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**PIC/Narahubung**	Edy
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan pendampingan dan pembinaan tata kelola kearsipan terpadu yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) untuk membantu Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, hingga lembaga masyarakat dalam mengelola, menyelamatkan, dan merapikan arsip. Layanan "Klinik Arsip" berfungsi sebagai pusat konsultasi, pemeriksaan kondisi permasalahan kearsipan, bimbingan teknis (coaching clinic), serta pendampingan langsung dalam pembenahan arsip aktif, inaktif, maupun digitalisasi arsip guna mewujudkan tertib administrasi kearsipan yang akuntabel dan tersistematis.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Kehadiran inovasi KLINIK ARSIP memberikan dampak signifikan terhadap terciptanya budaya tertib arsip dan penyelamatan memori kolektif daerah. Melalui pendekatan konsultatif yang solutif, Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa kini dapat mengidentifikasi serta menyelesaikan berbagai kendala penataan dokumen—mulai dari penumpukan berkas yang tidak teratur, penataan jadwal retensi arsip (JRA), hingga penanganan arsip vital—secara lebih mudah, terarah, dan sesuai standar kearsipan nasional. Selain memangkas kerumitan tata kelola administrasi internal, inovasi ini secara nyata mempercepat proses pencarian dokumen kerja, meningkatkan keamanan kerahasiaan data, dan mencegah risiko kehilangan berkas penting yang bernilai hukum maupun historis. Dari sisi akuntabilitas pemerintahan, keberadaan Klinik Arsip mendukung peningkatan nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Daerah, mempermudah proses audit operasional maupun keuangan, serta mewujudkan transparansi tata kelola birokrasi berbasis data arsip yang valid dan terintegrasi.

3.8.24 SIMFONI ARSIP

Tabel 3.30 Profil Inovasi SIMFONI ARSIP

1	**Nama Inovasi**	SIMFONI ARSIP (SISTEM INFORMASI PEMBINAAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KINERJA ARSIP)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**PIC/Narahubung**	Edy
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

6	**Uraian Singkat**	Inovasi tata kelola pemerintahan dan pengawasan internal berbasis platform digital terpadu yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip). SIMFONI ARSIP hadir untuk mengintegrasikan proses pembinaan kearsipan, pencatatan dan pelaporan kegiatan arsiparis/pengelola arsip, hingga evaluasi nilai kinerja kearsipan seluruh Perangkat Daerah serta Pemerintah Desa. Sistem ini meruangkan alur kerja pengawasan yang sebelumnya manual menjadi tersistematis, terukur, dan berkesinambungan guna memastikan standar pengelolaan arsip daerah berjalan optimal secara *real-time*.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Kehadiran inovasi SIMFONI ARSIP memberikan dampak transformatif terhadap penguatan kualitas tata kearsipan dan akuntabilitas birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan mengalihrupakan alur pembinaan dan evaluasi ke dalam platform digital, instansi pengelola arsip dapat memantau tingkat kepatuhan serta perkembangan pengelolaan dokumen di setiap Perangkat Daerah secara transparan, akurat, dan tanpa terkendala jarak maupun keterbatasan fisik. Selain itu, inovasi ini memangkas waktu dan beban administrasi pelaporan kinerja para pengelola arsip/arsiparis melalui format pencatatan digital yang seragam dan mudah diverifikasi. Dari sisi perencanaan kebijakan, data evaluasi otomatis yang dihasilkan oleh SIMFONI ARSIP menjadi dasar rujukan yang valid bagi pimpinan dalam memberikan intervensi pembinaan yang tepat sasaran, mempercepat pencapaian target Indeks Pengawasan Kearsipan Daerah, serta menjamin keamanan dan ketertiban aset memori kolektif pemerintah daerah.

3.8.25 JAGOAN ARSIP

Tabel 3.31 Profil Inovasi JAGOAN ARSIP

1	**Nama Inovasi**	JAGOAN ARSIP
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**PIC/Narahubung**	Edy
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pengembangan sumber daya manusia dan tata kelola administrasi yang berfokus pada pembentukan, pelatihan, serta pemberdayaan "Agen Kearsipan" di setiap Perangkat Daerah hingga unit kerja terkecil. JAGOAN ARSIP memadukan pendekatan pembinaan SDM secara intensif dengan standardisasi penataan fisik dan digital dokumen, guna mencetak pilar-pilar pengelola arsip yang kompeten, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dalam mewujudkan tertib kearsipan daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Kehadiran inovasi JAGOAN ARSIP memberikan dampak positif yang nyata terhadap perubahan budaya kerja dan peningkatan kompetensi pengelola arsip di seluruh lingkungan pemerintah daerah. Melalui hadirnya Agen

		Kearsipan yang terlatih dan terstandardisasi di setiap unit kerja, masalah klasik seperti penumpukan dokumen yang tidak terstruktur, kerusakan berkas penting, hingga keterlambatan dalam pencarian arsip dapat diatasi secara proaktif dan berkelanjutan. Di samping itu, inovasi ini mampu membangun sinergi dan jejaring komunikasi yang kuat antar-pengelola arsip, sehingga proses harmonisasi tata kelola kearsipan—baik arsip aktif, inaktif, maupun arsip digital—dapat berjalan selaras dengan standar nasional. Dampak jangka panjangnya, keberadaan JAGOAN ARSIP secara konsisten meningkatkan nilai Audit Pengawasan Kearsipan, menjamin keamanan aset data pemerintah daerah, serta mendukung terwujudnya transparansi dan efisiensi birokrasi berbasis tata kelola dokumen yang andal.

3.8.26 ARTIS PD

Tabel 3.32 Profil Inovasi ARTIS PD

1	**Nama Inovasi**	ARTIS PD (AKUISISI ARSIP STATIS PERANGKAT DAERAH)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**PIC/Narahubung**	Edy
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan kearsipan dan penyelamatan memori kolektif daerah yang berfokus pada percepatan proses identifikasi, penyerahan, dan penyelamatan arsip statis dari seluruh Perangkat Daerah ke Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan). Program ARTIS PD menyediakan alur kerja yang tersistematis dan terpendampingi untuk memverifikasi, menilai, serta mengalihkelolakan dokumen-dokumen yang memiliki nilai guna sejarah, hukum, dan kebudayaan agar tersimpan secara aman, terawat, serta terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan permanen.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan inovasi ARTIS PD memberikan dampak vital dalam menyelamatkan aset memori kolektif dan riwayat perjalanan sejarah dinamika pemerintahan di daerah. Melalui mekanisme akuisisi yang terstruktur dan aktif (jemput bola), dokumen-dokumen bernilai sejarah dan hukum yang sebelumnya tersimpan secara tersebar atau berpotensi rusak di berbagai Perangkat Daerah dapat segera dipindahkan serta dirawat sesuai standar preservasi kearsipan nasional. Selain menjamin keamanan fisik dan keaslian berkas sejarah daerah, inovasi ini memberikan kemudahan aksesibilitas bagi akademisi, peneliti, maupun masyarakat umum yang membutuhkan informasi historis dan rujukan kebijakan pembangunan masa lalu secara transparan. Dari sisi akuntabilitas birokrasi, ARTIS PD secara nyata meningkatkan capaian Indeks Pengawasan Kearsipan Daerah,

		memangkas beban penyimpanan arsip inaktif di unit kerja, serta memastikan seluruh rekam jejak penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dipertanggungjawabkan antar-generasi.

3.8.27 AKSI SEKOLAH LITERAT

Tabel 3.33 Profil Inovasi AKSI SEKOLAH LITERAT

1	**Nama Inovasi**	AKSI SEKOLAH LITERAT (Akselerasi Standar dan Inovasi Akreditasi Perpustakaan Sekolah Dasar)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**PIC/Narahubung**	Edy
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 – Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pendampingan dan pemenuhan mutu perpustakaan berbasis kolaborasi terpadu yang dirancang untuk mempercepat peningkatan standar kualitas serta pencapaian akreditasi perpustakaan Sekolah Dasar (SD). AKSI SEKOLAH LITERAT memadukan bimbingan teknis tata 67embal perpustakaan, digitalisasi katalog dan layanan baca, hingga pengembangan inovasi kegiatan literasi sekolah. Program ini hadir untuk mentransformasi perpustakaan sekolah dari sekadar tempat penyimpanan buku menjadi pusat belajar yang modern, menarik, dan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Kehadiran inovasi AKSI SEKOLAH LITERAT memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penguatan budaya literasi dan mutu 67embali67nt di 67embali sekolah dasar. Melalui proses pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan, sekolah dasar dapat lebih cepat dan mudah melengkapi sarana, prasarana, serta sistem pengelolaan perpustakaan yang sesuai dengan 67embali67nt akreditasi nasional tanpa mengalami kebingungan administrasi. Selain meningkatkan secara nyata persentase perpustakaan SD yang terakreditasi dan berstandar nasional, inovasi ini mampu menghidupkan 67embali minat baca murid melalui wajah baru perpustakaan yang ramah anak, kreatif, dan berbasis teknologi. Dampak jangka panjangnya, keberadaan perpustakaan yang terakreditasi dan aktif tidak hanya mendukung efektivitas proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga membangun fondasi literasi yang kuat bagi generasi muda sejak usia dini serta meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di daerah. Catatan: Inovasi ini sangat tepat dikategorikan ke dalam Asta Cita 4 (Memperkuat Pembangunan Human Capital/SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, dan Literasi) serta Asta Cita 7 (Memperkuat Reformasi Birokrasi & Digitalisasi/Peningkatan Mutu Pelayanan Publik).

3.8.28 SINERGI AKSI PUSTAKA

Tabel 3.34 Profil Inovasi SINERGI AKSI PUSTAKA

1	**Nama Inovasi**	SINERGI AKSI PUSTAKA (Sistem Pembinaan Terintegrasi Perpustakaan Umum dan Khusus Menuju Standar Nasional Perpustakaan)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
3	**PIC/Narahubung**	Edy
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Dinas Teknis
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi tata kelola dan pemenuhan mutu perpustakaan terpadu yang dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk mengakselerasi peningkatan standar pengagregasian perpustakaan umum (seperti perpustakaan kecamatan/desa/kelurahan) serta perpustakaan khusus (instansi pemerintah/swasta). SINERGI AKSI PUSTAKA menggabungkan sistem pembinaan berkala, konsultasi penataan koleksi dan tata ruang, digitalisasi katalog, hingga pendampingan pemenuhan instrumen Akreditasi Perpustakaan secara terintegrasi agar seluruh perpustakaan mampu mencapai dan mempertahankan Standar Nasional Perpustakaan (SNP).
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Kehadiran inovasi SINERGI AKSI PUSTAKA memberikan dampak strategis dalam memperkuat fondasi kelembagaan dan kualitas layanan perpustakaan umum serta khusus di seluruh wilayah daerah. Melalui pola pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan, pengelola perpustakaan dapat memangkas kendala teknis dalam pemenuhan standar nasional—mulai dari manajemen koleksi, pengolahan bahan pustaka, pemanfaatan teknologi informasi, hingga penyediaan sarana prasarana yang inklusif. Di samping itu, inovasi ini berhasil mendorong peningkatan jumlah perpustakaan umum dan khusus yang tersertifikasi serta berstatus terakreditasi secara nasional. Dampak luasnya, terwujudnya kesetaraan mutu perpustakaan hingga ke tingkat desa dan instansi khusus tidak hanya mengoptimalkan akses informasi bagi masyarakat luas dan ASN, tetapi juga secara nyata mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) serta Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) di daerah.

3.8.29 LIWAR HSS

Tabel 3.35 Profil Inovasi LIWAR HSS

1	**Nama Inovasi**	LIWAR HSS
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3	**PIC/Narahubung**	Dicky Maulana

4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Badan Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	LIWAR HSS (Lindungi Warga Hulu Sungai Selatan) adalah inovasi sistem berbasis teknologi geospasial yang berfungsi sebagai Layanan Informasi dan Pendampingan Warga Hulu Sungai Selatan untuk membantu ketepatan sasaran pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Platform ini mengintegrasikan pemetaan data geospasial (Sistem Informasi Geografis/GIS) dengan basis data penanganan kesejahteraan masyarakat dan perencanaan daerah, guna memastikan seluruh kebijakan, program bantuan, serta pendampingan pembangunan terlaksana secara akurat, terukur, dan tepat sasaran.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan inovasi LIWAR HSS Berbasis Geospasial memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan akurasi program-program pembangunan serta perlindungan sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemanfaatan peta digital berbasis koordinat presisi memungkinkan pemerintah daerah memetakan profil warga dan kondisi wilayah secara *real-time*, sehingga penyaluran program pendampingan masyarakat maupun intervensi pembangunan tidak lagi salah sasaran. Selain meningkatkan presisi data penerima manfaat, LIWAR HSS memangkas sekat koordinasi antar-perangkat daerah melalui satu platform informasi terpadu yang transparan. Dari sisi tata kelola pemerintahan (*good governance*), visualisasi spasial yang dihasilkan oleh LIWAR HSS menjadi pijakan data yang valid (data-driven decision making) bagi pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan alokasi anggaran, mempercepat penanganan masalah kemasyarakatan, serta menjamin ketepatan sasaran pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

3.8.30 E-SAKIP

Tabel 3.36 Profil Inovasi E-SAKIP

1	**Nama Inovasi**	E-SAKIP
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3	**PIC/Narahubung**	Dicky Maulana
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Badan Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	E-SAKIP (Electronic Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan langkah transformasi digital dalam manajemen birokrasi yang mengubah proses akuntabilitas kinerja dari manual berbasis kertas menjadi sistem informasi terpadu berbasis web. Inovasi ini mematikan kebiasaan lama birokrasi yang berfokus pada serapan anggaran semata (input-oriented) dan mengarahkannya pada pencapaian hasil nyata yang dirasakan masyarakat (*outcome*-oriented). Through inovasi ini, seluruh siklus manajemen kinerja—mulai dari perencanaan strategis (e-Planning), penganggaran (e-

		Budgeting), pemantauan target, hingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)—terhubung dalam satu pintu secara terintegrasi. Secara teknis, inovasi e-SAKIP menghadirkan fitur digital cascading yang memeta sasaran strategis pimpinan tertinggi hingga ke level instansi terendah secara transparan. Setiap indikator kinerja utama (IKU) dilengkapi dengan dasbor pemantauan berbasis data *real-time*. Hal ini memudahkan pimpinan mengevaluasi keterkaitan antara anggaran yang dikeluarkannya dengan target kinerja yang ingin dicapai, sekaligus meminimalisir manipulasi data melalui sistem verifikasi bukti pendukung (evidence) secara digital.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan e-SAKIP memberikan dampak sistemik dan menyeluruh, baik pada internal efisiensi birokrasi maupun kualitas hasil pembangunan untuk masyarakat. Dari sisi efisiensi keuangan negara, inovasi ini terbukti efektif mencegah pemborosan anggaran dengan mengeliminasi program-program formalitas yang tidak memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Anggaran publik diikat secara ketat pada prinsip money follows program, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya. Dari segi manajemen internal dan budaya kerja, e-SAKIP mendorong terciptanya kepemimpinan berbasis data (data-driven decision making). Pimpinan instansi dapat dengan cepat melakukan intervensi jika menemukan program kerja yang melenceng dari target di tengah tahun berjalan. Bagi aparatur sipil negara (ASN), sistem ini memberikan kejelasan peran (clear line of sight), karena setiap individu mengetahui secara pasti bagaimana tugas harian mereka berkontribusi langsung pada pencapaian target organisasi. Pada akhirnya, dampak terbesar dari inovasi e-SAKIP dirasakan langsung oleh masyarakat. Kinerja pemerintah yang makin terukur dan transparan memastikan alokasi APBD/APBN benar-benar terarah untuk menyelesaikan masalah krusial di lapangan—seperti pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, hingga perbaikan kualitas pelayanan publik dasarnya. Transformation digital ini tidak hanya menaikkan nilai predikat akuntabilitas instansi, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi hasil.

3.8.31 SENADA+

Tabel 3.37 Profil Inovasi SENADA+

1	**Nama Inovasi**	SENADA+ (Sistem Informasi Inovasi Daerah)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
3	**PIC/Narahubung**	Dicky Maulana
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Badan Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

6	**Uraian Singkat**	SENADA+ (Sistem Informasi Inovasi Daerah) merupakan platform sistem informasi berbasis digital yang dirancang untuk mengelola, mendokumentasikan, serta memetakan seluruh ekosistem inovasi di lingkungan pemerintah daerah secara terintegrasi. Inovasi ini hadir untuk mentransformasi tata kelola pengembangan inovasi daerah yang sebelumnya sering kali bersifat sporadis, tidak terdata dengan baik, serta minim koordinasi antar-Perangkat Daerah. Melalui platform ini, seluruh proses ideasi, pengusulan, verifikasi, pendampingan, hingga tahap replikasi inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan dapat dipantau dan dikelola dalam satu pintu. Secara fungsional, SENADA+ bertindak sebagai bank data (database) inovasi daerah sekaligus alat bantu evaluasi kelayakan inovasi secara *real-time*. Platform ini memfasilitasi pengunggahan bukti fisik (evidence) dari setiap indikator keberhasilan inovasi, sehingga memudahkan tim penilai internal maupun eksternal untuk memverifikasi tingkat tingkat kesiapan inovasi. Selain itu, SENADA+ dirancang untuk menyelaraskan pengusulan inovasi daerah dengan instrumen penilaian nasional seperti Indeks Inovasi Daerah (IID) dari Kementerian Dalam Negeri maupun kompetisi inovasi pelayanan publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan SENADA+ membawa dampak positif yang signifikan terhadap iklim budaya kerja birokrasi dan kualitas pelayanan publik di daerah. Dari sisi tata kelola dan administrasi, inovasi ini menciptakan transparansi dan efisiensi tinggi dalam proses pemetaan serta penilaian inovasi. Pengumpulan berkas dan bukti pendukung yang dulunya membutuhkan penumpukan dokumen fisik kini terekam secara sistematis digital, mengurangi risiko kehilangan data historis inovasi dan mempercepat proses evaluasi berkala. Dari sudut pandang penguatan kapasitas daerah, SENADA+ terbukti meningkatkan angka partisipasi Perangkat Daerah dalam menciptakan karsa inovatif. Kehadiran platform ini mendorong terciptanya kompetisi yang sehat antar-unit kerja, karena status perkembangan dan skor tingkat kesiapan inovasi masing-masing unit dapat dipantau secara terbuka. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan skor Indeks Inovasi Daerah (IID) serta berpotensi menaikkan predikat daerah menjadi "Sangat Inovatif", yang pada akhirnya berujung pada potensi penerimaan alokasi Insentif Fiskal (Dana Insentif Daerah) dari pemerintah pusat. Pada skala pelayanan publik, SENADA+ memastikan bahwa inovasi yang dikembangkan tidak sekadar wacana atau proyek formalitas belakangan. Melalui proses monitoring keberlanjutan yang ada di dalam sistem, inovasi-inovasi unggulan—baik di bidang kesehatan, pendidikan, perizinan, maupun pemberdayaan ekonomi—dapat direplikasi dan dikembangkan lebih luas, sehingga dampak perbaikan layanannya dirasakan secara langsung dan merata oleh masyarakat.

3.8.32 SI KETUPAD

Tabel 3.38 Profil Inovasi SI KETUPAD

1	**Nama Inovasi**	SI KETUPAD (SISTEM INFORMASI KEUANGAN TERPADU PAJAK DAERAH)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3	**PIC/Narahubung**	M. Ali Alaydrus
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Badan Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SI KETUPAD (Sistem Informasi Keuangan Terpadu Pajak Daerah) merupakan inovasi pelayanan publik berbasis digital yang mengintegrasikan seluruh rantai proses pengelolaan pajak daerah—mulai dari pendataan, pendaftaran, penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan dan pengawasan—ke dalam satu platform terpadu. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas sistem tata kelola pajak daerah konvensional yang kerap terfragmentasi, memakan waktu lama, serta rentan terhadap kesalahan manusia (human error) dan ketidakakuratan data potensi penerimaan daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan SI KETUPAD memberikan dampak yang luas, terutama terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi birokrasi keuangan. Dari sisi efisiensi operasional dan transparansi, inovasi ini meminimalkan interaksi langsung antara petugas pajak dan wajib pajak. Transaksi pembayaran secara non-tunai (cashless) ini secara signifikan menekan potensi pungutan liar, kebocoran anggaran, maupun praktik penyimpangan dalam pengelolaan penerimaan daerah, sekaligus menciptakan akuntabilitas data penerimaan yang dapat diaudit secara *real-time*.

3.8.33 SIP-CORPU HSS

Tabel 3.39 Profil Inovasi SIP-CORPU HSS

1	**Nama Inovasi**	SIP-CORPU HSS
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	**PIC/Narahubung**	Masud Rahmat
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Badan Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SIP-CORPU HSS (Sistem Informasi Pemetaan Kompetensi & Corporate University) merupakan inovasi pelayanan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis sistem informasi yang digagas oleh BKPSDM Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini memadukan dua pendekatan utama: pemetaan potensi dan kompetensi pegawai (gap analysis) serta penerapan konsep Corporate University (Corpu) dalam satu platform terpadu. Inovasi ini hadir untuk mentransformasi metode pengembangan kompetensi ASN yang sebelumnya cenderung generik, tidak seragam, dan belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan riil organisasi maupun individu pegawai.

		Secara teknis, SIP-CORPU HSS memfasilitasi pendataan profil kompetensi ASN (manajerial, sosio-kultural, dan teknis) secara digital serta membandingkannya dengan standar kompetensi jabatan. Dari hasil pemetaan (profiling) tersebut, sistem secara otomatis merekomendasikan program pembelajaran dan pelatihan yang spesifik (personalized learning plan) sesuai kerangka Corporate University. Pendekatan Corpu memastikan pengembangan kompetensi tidak lagi hanya mengandalkan pelatihan klasikal di kelas, melainkan mencakup pembelajaran mandiri, magang, mentoring/coaching, hingga pembelajaran berbasis komunitas (community of practice) yang terintegrasi dan terpantau secara elektronik.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan SIP-CORPU HSS memberikan dampak strategis terhadap efisiensi tata kelola SDM aparatur dan akselerasi profesionalisme ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari sisi efisiensi dan efektivitas perencanaan, inovasi ini menekan pemborosan anggaran pelatihan dengan mengalihkan fokus pengkaderan dan Diklat menjadi tepat sasaran (data-driven training needs analysis). Pemerintah daerah tidak lagi mengirimkan ASN ke pelatihan tanpa pertimbangan rasional, melainkan berdasarkan kesenjangan kompetensi yang tercatat secara presisi pada sistem. Dari sudut pandang manajemen karier dan meritokrasi, SIP-CORPU HSS menjadi instrumen objektif dalam mendukung penerapan Sistem Merit. Data pemetaan kompetensi yang akurat dan terbarukan menjadi basis bagi pimpinan daerah dan Pansel dalam penataan jabatan, rotasi, mutasi, hingga promosi pegawainya secara adil dan transparan. Selain itu, konsep pembelajaran berkelanjutan berbasis Corpu mendorong terciptanya budaya organisasi pembelajar (learning organization) di mana setiap ASN termotivasi untuk terus meningkatkan kapasitas dirinya secara mandiri. Pada akhirnya, peningkatan kapasitas ASN yang terarah melalui SIP-CORPU HSS berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pegawai yang makin kompeten dan adaptif di bidang tugasnya masing-masing mampu mengeksekusi program-program strategis daerah secara lebih efektif, responsif, dan profesional demi kemajuan masyarakat HSS.

3.8.34 Kula Upik Angkinang

Tabel 3.40 Profil Inovasi Kula Upik Angkinang

1	**Nama Inovasi**	Kula Upik Angkinang
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Angkinang
3	**PIC/Narahubung**	Saubari
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan

5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	melakukan kunjungan lapangan bersama desa terhadap usulan prioritas yang akan disampaikan pada Musrenbang Kabupaten Tahun Berjalan
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dengan adanya inovasi Inovasi Kula Upik Angkinang ini maka memperjelas dan mempermudah bagi OPD untuk melihat kondisi lapangan dari usulan prioritas Kecamatan Angkinang

3.8.35 SI JULAKK SANI Kec. Angkinang

Tabel 3.41 Profil Inovasi SI JULAKK SANI Kec. Angkinang

1	**Nama Inovasi**	SI JULAKK SANI Kec. Angkinang (Sistem Informasi Jemput Bola Kecamatan - KUA Dispensasi Nikah Kecamatan Angkinang)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Angkinang
3	**PIC/Narahubung**	Saubari
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SI JULAKK SANI Kec. Angkinang (Sistem Informasi Jemput Bola Kecamatan - KUA Dispensasi Nikah Kecamatan Angkinang) merupakan suatu Inovasi Jemput Bola Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Nikah yang menjadi inisiatif dari Kecamatan Angkinang sebagai salah satu reward kepada pengguna layanan terutama Rekomendasi Dispensasi Nikah untuk memberikan pelayanan tambahan kepada masyarakat dalam mengurus Surat Rekomendasi yang dilakukan melalui sistem aplikasi WhatsApp selain pelayanan langsung melalui ruang PATEN di Kecamatan. Inovasi ini bekerjasama antara Kecamatan Angkinang dan KUA Angkinang sehingga pengguna layanan tidak perlu lagi untuk datang ke kantor kecamatan berkas akan di kirim ke petugas pelayanan kantor KUA lewat WA untuk di cetak.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Hasil inovasi dari penerapan SI JULAKK SANI dapat diukur melalui pencapaian nyata (output dan *outcome*) yang mengubah kualitas pelayanan di Kecamatan Angkinang. Hasil Kuantitatif (Output) Peningkatan Volume: Jumlah dokumen Rekomendasi Dispensasi Nikah yang diproses secara digital meningkat pesat. Kecepatan Durasi: Waktu penyelesaian dokumen pangkas dari hitungan hari menjadi hanya dalam hitungan jam. Tingkat Adopsi: Sebagian besar pemohon dispensasi nikah kini beralih menggunakan layanan WhatsApp dibanding datang langsung. Nilai IKM: Meningkatkan Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk pelayanan Kecamatan Angkinang.

		Hasil Kualitatif (*Outcome*) Kemudahan Layanan: Masyarakat merasakan kemudahan karena dapat mengurus dokumen penting dari rumah tanpa meninggalkan pekerjaan. Transparansi Proses: Validasi berkas menjadi lebih terbuka karena status verifikasi diinfokan langsung ke nomor WhatsApp pemohon. Sinergi Instansi: Terwujudnya integrasi data dan kolaborasi yang harmonis antara pihak Kecamatan Angkinang dengan KUA. Budaya Kerja: Aparatur kecamatan beralih ke budaya kerja digital (paperless) yang lebih adaptif dan responsif.

3.8.36 SIAP KADARAT

Tabel 3.42 Profil Inovasi SIAP KADARAT

1	**Nama Inovasi**	SIAP KADARAT (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kecamatan Daha Barat)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Daha Barat
3	**PIC/Narahubung**	Jali
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 – Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SIAP KADARAT (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kecamatan Daha Barat) merupakan inovasi pelayanan 75asyar berbasis digital yang dirancang untuk memodernisasi dan mempermudah pengurusan administrasi kependudukan serta perizinan di 75asyara kecamatan. Inovasi ini hadir sebagai jawaban atas tantangan geografis dan aksesibilitas wilayah Kecamatan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang 75asyarak wilayahnya dikelilingi perairan/rawa dan pemukiman yang terpisah dari pusat pemerintahan. Sebelum adanya sistem ini, warga harus menempuh perjalanan cukup jauh dan memakan waktu hanya untuk mengurus surat keterangan, rekomendasi, maupun dokumen administrasi dasar. Secara teknis, SIAP KADARAT mengintegrasikan alur pelayanan administrasi mulai dari 75asyara desa hingga kecamatan secara online. Melalui platform ini, 75asyarakat maupun petugas di 75asyara desa dapat mengajukan permohonan layanan, mengunggah berkas persyaratan, hingga memantau status pemrosesan dokumen secara real-time. Sistem ini memangkas birokrasi tatap muka berbelit-belit dengan menerapkan verifikasi berkas digital dan tanda tangan elektronik (TTE), sehingga dokumen yang telah disetujui dapat dicetak secara mandiri atau diambil langsung tanpa perlu berulang kali datang ke kantor kecamatan.

7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan SIAP KADARAT membawa dampak yang sangat nyata terhadap peningkatan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan 76asyar di wilayah Kecamatan Daha Barat. Dari sudut pandang 76asyarakat, inovasi ini secara signifikan menekan biaya transportasi dan menghemat waktu tempuh (cost & time saving). Warga yang tinggal di pelosok desa tidak lagi terbeban oleh kendala biaya dan jarak geografis untuk mendapatkan hak layanan administrasi yang cepat, tepat, dan transparan. Dari sisi tata 76asyar pemerintahan dan birokrasi, SIAP KADARAT menciptakan standar pelayanan yang jelas, terukur, dan akuntabel. Pengarsipan dokumen yang dulunya rentan rusak atau hilang kini tersimpan rapi dalam database digital. Hal ini meminimalisir risiko kesalahan manusia (human error), menekan potensi praktik pungutan liar (pungli), serta memberikan kemudahan bagi jajaran pimpinan kecamatan dalam mengawasi durasi dan jumlah permohonan layanan yang masuk secara transparan. Pada akhirnya, SIAP KADARAT berhasil mewujudkan prinsip decentralized & inclusive service delivery—meningkatkan kesetaraan akses pelayanan 76asyar hingga ke wilayah perdesaan dan perairan. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan indeks kepuasan 76asyarakat terhadap kinerja Pemerintah Kecamatan Daha Barat, tetapi juga menjadi bukti nyata bagaimana transformasi digital dapat mengatasi keterbatasan kondisi geografis daerah demi kesejahteraan warga.

3.8.37 KOPER DESA

Tabel 3.43 Profil Inovasi KOPER DESA

1	**Nama Inovasi**	KOPER DESA (KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN PEMERINTAHAN DESA)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Daha Barat
3	**PIC/Narahubung**	Jali
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi Koordinasi dan Pendampingan Pemerintah Desa merupakan upaya untuk meningkatkan sinergi antara kecamatan dengan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Inovasi ini dilakukan melalui kegiatan koordinasi rutin, pembinaan administrasi desa, serta pendampingan langsung kepada perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Melalui inovasi ini, kecamatan berperan aktif dalam memberikan arahan, konsultasi, serta solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa, seperti pengelolaan administrasi, penyusunan laporan, perencanaan pembangunan desa, dan pengelolaan program pemberdayaan masyarakat.

		Dengan adanya inovasi ini diharapkan kinerja pemerintah desa menjadi lebih tertib, efektif, dan akuntabel, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik serta pembangunan desa dapat terlaksana secara optimal.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Pelaksanaan inovasi koordinasi dan pendampingan pemerintahan desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan capaian kinerja pemerintah desa. Melalui koordinasi yang lebih terstruktur dan pendampingan yang berkelanjutan, pemerintah desa menjadi lebih memahami tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Dampak yang dihasilkan antara lain meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa, lebih cepatnya penyelesaian laporan dan dokumen desa, serta meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa. Selain itu, komunikasi antara kecamatan dan pemerintah desa menjadi lebih efektif sehingga berbagai permasalahan di desa dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan tepat. Dengan adanya inovasi ini, kinerja aparatur desa menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik serta mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang efektif.Tercapainya tertib Administrasi Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas di kecamatan Daha Utara, dan Memudahkan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas

3.8.38 SEWARGA DASEL

Tabel 3.44 Profil Inovasi SEWARGA DASEL

1	**Nama Inovasi**	SEWARGA DASEL (SERAP ASPIRASI WARGA) KECAMATAN DAHA SELATAN
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Daha Selatan
3	**PIC/Narahubung**	Juhriah
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SEWARGA DASEL (Serap Aspirasi Warga) merupakan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi publik yang digagas oleh Pemerintah Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini hadir sebagai wadah komunikasi dua arah yang menjembatani penyampaian aspirasi, aduan, usulan pembangunan, hingga kritik dari masyarakat perdesaan secara cepat dan terarah. Melalui kanal aduan digital dan penguatan forum tatap muka terintegrasi, SEWARGA DASEL memangkas sekat birokrasi yang selama ini membuat laporan warga lambat direspon atau terhenti di tingkat desa.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan SEWARGA DASEL memberikan dampak positif terhadap responsivitas pemerintah kecamatan dalam menindaklanjuti isu-isu krusial di masyarakat, seperti infrastruktur perairan, pelayanan dasar, dan penanganan sosial. Inovasi ini mendorong terciptanya transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik, karena warga dapat

		memantau status tindak lanjut atas aspirasi yang mereka sampaikan secara terbuka. Dari sisi perencanaan pembangunan, SEWARGA DASEL memastikan proses penyusunan program kerja kecamatan dan Musrenbang berbasis pada kebutuhan nyata (bottom-up approach), bukan sekadar asumsi pejabat. Selain itu, hadirnya ruang komunikasi yang inklusif ini mampu mempererat sinergi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan warga dalam menjaga kondusivitas serta mengakselerasi pembangunan di wilayah Kecamatan Daha Selatan.

3.8.39 OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA

Tabel 3.45 Profil Inovasi OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU

1	**Nama Inovasi**	OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA (SISTEM PELAYANAN *ONLINE* LANGSUNG AMBIL)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Daha Selatan
3	**PIC/Narahubung**	Juhriah
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SIPOLA (Sistem Pelayanan *Online* Langsung Ambil) merupakan inovasi pelayanan publik digital yang dikembangkan untuk mengoptimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini hadir untuk memutakhirkan proses pengurusan dokumen kependudukan dan perizinan yang sebelumnya mewajibkan warga datang langsung dan mengantre. Melalui mekanisme permohonan dan verifikasi berkas secara *online*, warga cukup mengajukan berkas dari rumah dan hanya perlu datang ke kantor kecamatan saat dokumen fisik telah selesai diproses untuk langsung diambil.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan SIPOLA memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat Kecamatan Daha Selatan, karena mengeliminasi waktu tunggu dan proses antrean yang panjang di kantor pelayanan. Inovasi ini mewujudkan pelayanan publik yang kepastian prosesnya terjamin, transparan, serta dapat diakses dengan mudah tanpa mengganggu aktivitas harian warga. Dari sisi tata kelola pemerintahan, SIPOLA berhasil meningkatkan tertib administrasi, mempercepat responsivitas aparatur kecamatan dalam memproses berkas, serta menekan risiko penumpukan fisik dokumen. Selain itu, pimpinan kecamatan dapat melakukan pengawasan alur pelayanan secara lebih terukur dan akuntabel, yang pada akhirnya meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap kinerja pelayanan publik di Kecamatan Daha Selatan.

3.8.40 SIPADI

Tabel 3.46 Profil Inovasi SIPADI

1	**Nama Inovasi**	SIPADI (SISTEM ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Daha Utara
3	**PIC/Narahubung**	Muhammad Noval
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SIPADI (Sistem Administrasi Perjalanan Dinas) merupakan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis aplikasi digital yang dirancang untuk mengintegrasikan dan memutakhirkan seluruh alur pengelolaan perjalanan dinas ASN. Inovasi ini hadir untuk mentransformasi proses administrasi perjalanan dinas yang sebelumnya bersifat manual, berbelit-belit, dan rentan terhadap ketidaksesuaian data. Melalui platform ini, mulai dari penerbitan Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), perhitungan rincian biaya secara otomatis, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dilakukan secara elektronik dan terpusat.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan SIPADI memberikan dampak langsung terhadap efisiensi dan transparansi penggunaan anggaran daerah. Inovasi ini secara signifikan memangkas waktu proses verifikasi serta pencairan dana perjalanan dinas, sekaligus mengeliminasi penggunaan kertas (paperless) dan risiko kesalahan perhitungan biaya harian maupun transportasi. Dari sisi akuntabilitas dan pengawasan, SIPADI mencegah terjadinya tumpang tindih (overlap) jadwal dinas pegawai maupun duplikasi anggaran. Pimpinan instansi serta pengawas internal (Inspektorat) dapat memantau riwayat, riil lokasi kegiatan, dan serapan anggaran perjalanan dinas secara *real-time*. Hal ini memastikan bahwa setiap perjalanan dinas ASN benar-benar efektif, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.8.41 SI UTARA

Tabel 3.47 Profil Inovasi SI UTARA

1	**Nama Inovasi**	SI UTARA (SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN TERPADU KECAMATAN DAHA UTARA)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Daha Utara
3	**PIC/Narahubung**	Muhammad Noval
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SI UTARA (Sistem Informasi dan Pelayanan Terpadu Kecamatan Daha Utara) merupakan inovasi pelayanan publik digital berbasis web yang dikembangkan oleh Pemerintah Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

		Inovasi ini hadir untuk memutakhirkan pengurusan administrasi kependudukan, perizinan, dan pelayanan umum masyarakat kawasan rawa/perairan. Melalui SI UTARA, alur pengajuan permohonan, unggah berkas persyaratan, verifikasi administrasi, hingga informasi progres dokumen dapat diakses secara mandiri oleh warga atau petugas desa tanpa harus berulang kali datang langsung ke kantor kecamatan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan SI UTARA memberikan dampak berupa penghematan waktu dan biaya transportasi bagi masyarakat Kecamatan Daha Utara yang sebagian wilayahnya terkendala akses geografis sungai dan rawa. Kehadiran sistem ini memberikan kepastian standar pelayanan yang transparan, cepat, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat perdesaan. Dari sisi penyelenggaraan birokrasi, SI UTARA mampu meningkatkan ketertiban pengarsipan data, meminimalisir kesalahan pencatatan (human error), serta menekan potensi praktik pungutan liar melalui proses permohonan yang transparan. Selain itu, pimpinan kecamatan dapat memantau volume dan durasi penyelesaian layanan secara real-time, sehingga responsivitas dan kualitas akuntabilitas pelayanan publik di Kecamatan Daha Utara terus meningkat.

3.8.42 Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang

Tabel 3.48 Profil Inovasi Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi

1	**Nama Inovasi**	Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang (SIPATIN KECAPANG)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Kalumpang
3	**PIC/Narahubung**	Endang Tambunan
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SIPATIN KECAPANG (Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang) merupakan inovasi tata kelola kelembagaan berbasis digital yang dikembangkan untuk memutakhirkan pengelolaan data administrasi dan kegiatan Tim Penggerak PKK di tingkat Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini hadir untuk mentransformasi pencatatan Dasawisma dan pelaporan 10 Program Pokok PKK yang sebelumnya dilakukan secara manual berbasis kertas. Melalui platform terpadu ini, seluruh rantai pendataan—mulai dari data keluarga, rekapitulasi kegiatan pokja, hingga dokumentasi inovasi kader di tingkat desa—dapat diinput, diverifikasi, dan dikelola secara elektronik.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan SIPATIN KECAPANG memberikan dampak signifikan berupa peningkatan akurasi dan validitas data keluarga maupun kegiatan PKK di Kecamatan Kalumpang. Inovasi ini memangkas beban kerja administratif para kader, menghemat waktu pelaporan berkala, serta mengeliminasi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik Dasawisma.

		Dari sisi efektivitas program, ketersediaan data stunting, kesehatan ibu-anak, dan profil ekonomi keluarga yang tersaji secara *real-time* memudahkan TP PKK kecamatan bersama pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tepat sasaran. Selain itu, SIPATIN KECAPANG mendokumentasikan serta memetakan berbagai program inovatif kader desa secara transparan, sehingga memicu semangat replikasi inovasi antar-desa demi peningkatan kesejahteraan keluarga di wilayah Kecamatan Kalumpang.

3.8.43 SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026

Tabel 3.49 Profil Inovasi SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026

1	**Nama Inovasi**	SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 (SI GADIS 2026)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Kalumpang
3	**PIC/Narahubung**	Endang Tambunan
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SI GADIS 2026 (Sistem Unggah Administrasi Desa Tahun 2026) merupakan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis platform digital yang dikembangkan untuk memutakhirkan proses pembinaan, pengawasan, dan verifikasi dokumen administrasi desa di tingkat kecamatan. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas lambatnya alur pemeriksaan fisik berkas administrasi pemerintahan desa—seperti dokumen perencanaan (APBDes/RPJMDes), laporan pertanggungjawaban, hingga administrasi kewilayahan—yang selama ini menumpuk dalam bentuk kertas (hardcopy). Melalui SI GADIS 2026, aparatur pemerintah desa dapat secara langsung mengunggah dokumen digital (softcopy) untuk diverifikasi dan dievaluasi secara berkala oleh tim kecamatan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan SI GADIS 2026 memberikan dampak signifikan terhadap percepatan alur verifikasi berkas dan efisiensi operasional. Pemerintah desa tidak lagi harus berulang kali melakukan perjalanan ke kantor kecamatan hanya untuk menyerahkan atau mervisi berkas fisik, sehingga menghemat biaya pencetakan kertas (paperless) serta waktu pengurusan secara drastis. Dari sisi akuntabilitas dan pengawasan, inovasi ini menciptakan pangkalan data (database) administrasi desa yang rapi, transparan, dan mudah diakses. Pimpinan kecamatan dan tim pembina desa dapat memantau kedisiplinan serta progres penyelesaian administrasi tiap desa secara *real-time*. Kehadiran SI GADIS 2026 ini mencegah terjadinya keterlambatan penyaluran atau penetapan anggaran desa, sekaligus meminimalisir risiko kehilangan dokumen penting penyelenggaraan pemerintahan desa.

3.8.44 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital

Tabel 3.50 Profil Inovasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis

1	**Nama Inovasi**	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital (PADUMASAL)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Kalumpang
3	**PIC/Narahubung**	Endang Tambunan
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital (PADUMASAL) adalah sebuah layanan pengaduan berbasis digital yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan di Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk dapat secara langsung memberikan penilaian, kritik dan saran terhadap pelayanan yang diterima . Penyelesaian pengaduan tersebut di tindaklajuti oleh tim Pengelola PADUMASAL selambat-lambatnya 3x24 jam dari laporan diterima dan tindak lanjut laporan tersebut segera di sampaikan kepada pimpinan sebagai bahan evaluasi kedepannya.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Tercapainya respon positif dari masyarakat terhadap pengelolaan pengaduan yang di proses dengan cepat dan jelas sehingga meningkatkan nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kecamatan kalumpang kabupaten hulu sungai selatan

3.8.45 Master Data Admistrasi SPPD

Tabel 3.51 Profil Inovasi Master Data Admistrasi SPPD

1	**Nama Inovasi**	Master Data Admistrasi SPPD (Mr.SPPD)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Kalumpang
3	**PIC/Narahubung**	Endang Tambunan
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Pembuatan Surat Tugas, SPPD, Laporan, Kwitansi, Realcost, dan Dokumentasi bisa hanya mengisi sheet data Master.Inovasi ini mengoptimalkan Pelayanan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas, Tersajinya Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas sesuai ketentuan, Tercapainya tertib Administrasi Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas, dan Memudahkan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Inovasi ini mengoptimalkan Pelayanan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas, Tersajinya Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas sesuai ketentuan, Tercapainya tertib Administrasi Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas , dan Memudahkan Pembuatan Surat Pertanggung Jawaban Perjalanan Dinas

3.8.46 SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL

Tabel 3.52 Profil Inovasi SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL

1	**Nama Inovasi**	SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL (SUSAN LAINTEN)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Kalumpang
3	**PIC/Narahubung**	Endang Tambunan
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Semua Pegawai dapat menilai Layanan Internal Pegawai secara *online* melalui Link yang disediakan, maka unit kerja dalam hal ini Sekretariat baik Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan maupun Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Sehingga Unit Kerja yang melaksanakan dapat mengetahui kekurangan dan kelemahannya dan dapat memeprbaiki nya. Pada akhirnya pelayanan dapat ditingkatkan dan target kinerja yang telah diteapkan dapat tercapai.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Inovasi ini dapat meningkatkan kinerja pelayanan pegawai dan target kepuasan layanan internal dapat tercapai kemudian dapat meningkatkan kinerja organisasi.

3.8.47 LAMANK Kec. Kandangan

Tabel 3.53 Profil Inovasi LAMANK Kec. Kandangan

1	**Nama Inovasi**	LAMANK Kec. Kandangan (Layanan Mandiri Antar Berkas Gratis) Kecamatan Kandangan
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Kandangan
3	**PIC/Narahubung**	Deasy +62 812-5050-647
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	**RANCANG BANGUN INOVASI LAMANK KECAMATAN KANDANGAN** LAMANK Kecamatan Kandangan merupakan inovasi pelayanan publik yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas, kemudahan, dan kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh masih adanya masyarakat yang mengalami kendala dalam mengambil berkas hasil pelayanan di kantor kecamatan. Kendala tersebut terutama dirasakan oleh lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, serta warga yang bertempat tinggal cukup jauh dari pusat pelayanan. Kondisi ini dapat menambah biaya, waktu, dan beban masyarakat dalam memperoleh dokumen pelayanan yang telah selesai diproses. LAMANK merupakan singkatan dari Layanan Mandiri Antar Berkas Gratis. Melalui inovasi ini, berkas hasil pelayanan administrasi yang telah selesai diproses di Kecamatan Kandangan diantarkan langsung ke alamat penerima tanpa

		dipungut biaya. Layanan diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat, prioritas penerima, dan kebijakan pelayanan yang ditetapkan oleh Kecamatan Kandangan. Masyarakat tetap dapat memilih mengambil berkas secara langsung atau menggunakan layanan pengantaran. Pelaksanaan LAMANK dimulai sejak masyarakat mengajukan pelayanan administrasi di kantor kecamatan. Petugas mencatat identitas, alamat, nomor kontak, jenis layanan, dan pilihan pengantaran berkas. Setelah dokumen selesai diverifikasi, ditandatangani, dan dinyatakan lengkap, petugas menghubungi pemohon untuk memastikan waktu serta lokasi pengantaran. Berkas kemudian diserahkan langsung kepada penerima atau anggota keluarga yang telah ditunjuk. Setiap pengantaran dicatat dalam buku kendali atau media pencatatan lainnya sebagai bukti pelayanan dan bahan evaluasi. Inovasi ini dilaksanakan oleh unsur pelayanan umum Kecamatan Kandangan dengan melibatkan petugas pelayanan, pengelola administrasi, dan petugas pengantaran. Koordinasi antarpetugas dilakukan untuk memastikan ketepatan dokumen, keamanan berkas, kejelasan alamat, serta ketepatan waktu pengantaran. Pelaksanaan layanan juga memperhatikan perlindungan data pribadi dan kerahasiaan dokumen masyarakat. LAMANK memberikan manfaat berupa penghematan waktu dan biaya transportasi, peningkatan akses pelayanan bagi kelompok rentan, pengurangan antrean pengambilan berkas, serta peningkatan kepuasan masyarakat. Inovasi ini juga mendorong aparatur kecamatan untuk memberikan pelayanan yang lebih aktif, responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan. Dalam pengembangannya, Kecamatan Kandangan melakukan pemantauan terhadap jumlah pengguna, ketepatan waktu pengantaran, jenis layanan, wilayah tujuan, keluhan, dan tingkat kepuasan penerima. Hasil pemantauan digunakan untuk memperbaiki standar operasional, pembagian tugas, jadwal pengantaran, dan kualitas komunikasi kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah terselenggaranya pelayanan administrasi yang lebih mudah, cepat, terjangkau, dan merata. Keberlanjutan LAMANK didukung melalui penetapan petugas, penyediaan sarana pengantaran, penganggaran operasional, sosialisasi layanan, dan evaluasi berkala. LAMANK memperkuat komitmen Kecamatan Kandangan dalam mewujudkan pelayanan prima melalui layanan antar berkas yang sederhana, praktis, inklusif, dan berkelanjutan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	**Manfaat Inovasi LAMANK Kecamatan Kandangan** Inovasi LAMANK memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh berkas hasil pelayanan administrasi tanpa

		harus datang kembali ke kantor Kecamatan Kandangan. Layanan ini membantu mengurangi waktu, biaya transportasi, dan tenaga yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengambil dokumen yang telah selesai diproses. LAMANK juga meningkatkan akses pelayanan bagi kelompok yang memiliki keterbatasan, terutama lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, masyarakat yang tinggal jauh dari kantor kecamatan, serta masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu. Melalui layanan pengantaran gratis, setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih mudah dan setara dalam menerima pelayanan administrasi. Bagi Kecamatan Kandangan, LAMANK membantu meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik. Inovasi ini dapat mengurangi antrean pengambilan berkas, mempercepat penyerahan dokumen kepada masyarakat, serta meningkatkan ketertiban pencatatan dan pemantauan penyelesaian layanan. Selain itu, LAMANK mendorong aparatur kecamatan untuk memberikan pelayanan yang lebih responsif, aktif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pelayanan tidak hanya selesai ketika dokumen diterbitkan, tetapi sampai dokumen tersebut diterima oleh masyarakat yang berhak. Secara umum, manfaat LAMANK meliputi meningkatnya kepuasan masyarakat, terwujudnya pelayanan yang inklusif, berkurangnya biaya dan waktu pelayanan, meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kecamatan, serta terciptanya pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, gratis, dan tepat sasaran. **Dampak Inovasi LAMANK Kecamatan Kandangan** Penerapan inovasi LAMANK memberikan dampak langsung terhadap peningkatan akses dan kualitas pelayanan administrasi di Kecamatan Kandangan. Masyarakat tidak perlu datang kembali ke kantor kecamatan untuk mengambil berkas yang telah selesai diproses. Kondisi ini mengurangi waktu tunggu, biaya transportasi, serta beban masyarakat dalam memperoleh dokumen pelayanan. Dampak paling nyata dirasakan oleh kelompok yang memiliki keterbatasan akses, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, masyarakat yang berdomisili jauh dari kantor kecamatan, dan masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu. Layanan pengantaran berkas secara gratis membuat pelayanan menjadi lebih inklusif dan memberikan kemudahan yang setara kepada seluruh masyarakat. Bagi penyelenggara pelayanan, LAMANK berdampak pada meningkatnya efektivitas proses pelayanan. Penyerahan dokumen dapat dilakukan dengan lebih tertib, terjadwal, dan terpantau. Inovasi ini juga membantu mengurangi

		penumpukan berkas yang belum diambil serta mengurangi antrean masyarakat pada loket pengambilan dokumen. LAMANK turut mendorong perubahan budaya kerja aparatur. Petugas tidak hanya berfokus pada penyelesaian administrasi, tetapi juga memastikan dokumen diterima oleh masyarakat secara tepat waktu dan tepat sasaran. Hal ini meningkatkan tanggung jawab, kedisiplinan, koordinasi, dan orientasi pelayanan aparatur Kecamatan Kandangan. Dalam jangka menengah, inovasi ini berpotensi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah kecamatan. Masyarakat memperoleh pengalaman pelayanan yang lebih mudah, cepat, ramah, dan responsif. Keluhan terkait kesulitan pengambilan berkas juga dapat dikurangi. Secara kelembagaan, LAMANK memperkuat citra Kecamatan Kandangan sebagai penyelenggara pelayanan publik yang adaptif dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Dampak akhirnya adalah terciptanya pelayanan administrasi yang lebih efektif, efisien, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3.8.48 REKAN SI MAMET

Tabel 3.54 Profil Inovasi REKAN SI MAMET

1	**Nama Inovasi**	REKAN SI MAMET (REKomendasi PencairAN SelesaI liMA MeniT)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Kandangan
3	**PIC/Narahubung**	Deasy +62 812-5050-647
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	REKAN SI MAMET (REKomendasi PencairAN SelesaI liMA MeniT) merupakan salah satu program inovasi layanan publik berbasis digital/efisiensi birokrasi, khususnya dalam mempercepat proses penerbitan surat rekomendasi pencairan dana anggaran atau bantuan keuangan. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Sebelum adanya inovasi ini, proses verifikasi berkas hingga pengerjaan surat rekomendasi pencairan kerap membutuhkan waktu jam hingga berhari-hari akibat alur birokrasi manual, pemeriksaan kelengkapan berkas yang rumit, atau antrean berkas fisik. Tujuan Utama: Memotong alur birokrasi (pangkas prosedur) sehingga permohonan rekomendasi pencairan yang telah memenuhi syarat lengkap dan valid dapat diselesaikan secara instan dalam waktu maksimal 5 menit.

		Key Features & Mekanisme Kerja Digitalisasi & Standarisasi Dokumen: Mengubah pemeriksaan berkas manual menjadi sistem verifikasi terintegrasi atau checklist digital standar, sehingga validator dapat langsung memeriksa keabsahan syarat permohonan. Standard Operating Procedure (SOP) Cepat: Penerapan jaminan kepastian waktu layanan (Service Level Agreement / SLA) selama 5 menit sejak berkas diverifikasi lengkap. Penerbitan Otomatis / Digital Signature: Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) atau otomasi template surat untuk mempercepat pengesahan dokumen tanpa menunggu proses penandatanganan manual secara basah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Manfaat & Dampak Inovasi Transparansi & Kepastian: Memberikan kejelasan waktu pelayanan bagi unit/pihak yang mengajukan rekomendasi. Akuntabilitas: Meminimalisasi potensi praktik pungli, perantara (calo), maupun keterlambatan birokrasi. Efisiensi Kinerja: Meningkatkan realisasi anggaran dan efektivitas kerja pegawai/dinas dalam merespons kebutuhan masyarakat/instansi terkait.

3.8.49 SISTER

Tabel 3.55 Profil Inovasi SISTER

1	**Nama Inovasi**	SISTER (Sistem Input Surat Tugas Terpadu)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Loksado
3	**PIC/Narahubung**	Karmila +62 853-4898-2769
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SISTER (Sistem Input Surat Tugas Terpadu) merupakan inovasi berbasis aplikasi digital yang dirancang untuk mengelola, memproses, dan menerbitkan Surat Tugas secara elektronik (e-surat/e-office), cepat, serta terintegrasi dalam lingkungan instansi atau pemerintah daerah. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Pembuatan Surat Tugas secara konvensional sering menghadapi kendala seperti alur verifikasi berjenjang yang lambat, risiko penomoran surat ganda (overlapping), penumpukan berkas fisik, serta penandatanganan manual yang tertunda saat pejabat penandatangan berada di luar kantor.

		Tujuan Utama: Meningkatkan efisiensi administrasi perkantoran melalui digitalisasi alur pengerjaan Surat Tugas dari tahap pengajuan (input), verifikasi, hingga penerbitan secara instan. Fitur Utama & Mekanisme Kerja Pengajuan & Penomoran Otomatis: Pengguna cukup memasukkan data personel, maksud perjalanan/tugas, lokasi, dan tanggal. Nomor surat dibuat secara otomatis oleh sistem untuk mencegah duplikasi penomoran. Tanda Tangan Elektronik (TTE): Terintegrasi dengan sertifikat digital atau sistem TTE (seperti BSrE) sehingga pejabat dapat menandatangani dokumen kapan saja dan di mana saja melalui perangkat seluler. Database & Arsip Digital Terpusat: Dokumen Surat Tugas tersimpan otomatis dalam basis data, memudahkan pencarian riwayat penugasan, pelaporan, hingga pembuatan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) lanjutan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Manfaat Inovasi Efisiensi Waktu & Biaya: Memangkas waktu penerbitan surat dari hitungan hari menjadi hitungan menit (paperless dan menghemat biaya cetak). Akuntabilitas & Validitas: Meminimalisasi risiko surat palsu atau nomor ganda karena terverifikasi oleh sistem digital secara terpusat. Kemudahan Pemantauan: Memudahkan pimpinan untuk memantau rekapitulasi distribusi penugasan pegawai secara *real-time*.

3.8.50 KASI AMBIL

Tabel 3.56 Profil Inovasi KASI AMBIL

1	**Nama Inovasi**	KASI AMBIL (BERKAS SELESAI, BARU DIAMBIL)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	KECAMATAN.PADANGBATUNG
3	**PIC/Narahubung**	-
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Ringkasan Inovasi: Kasi Ambil Gagasan Utama: Memanfaatkan media WhatsApp sebagai saluran komunikasi utama antara masyarakat dan pihak Kecamatan Padang Batung. Sistem ini mengubah pola pelayanan dari yang semula "datang untuk mengajukan" menjadi "datang hanya untuk mengambil hasil".

		Alur Pelayanan (Konsep WFH/Layanan Jarak Jauh): Konsultasi & Informasi: Masyarakat menghubungi WhatsApp resmi Kecamatan Padang Batung untuk menyampaikan jenis layanan administrasi yang dibutuhkan. Pengiriman Syarat & Formulir: Petugas mengirimkan daftar persyaratan dan blangko/formulir digital yang perlu diisi oleh pemohon. Verifikasi Awal: Pemohon mengisi formulir, melengkapi berkas, lalu mengirimkan foto/scan dokumen tersebut via WhatsApp untuk diverifikasi oleh petugas kecamatan. Proses Administrasi: Setelah dokumen digital dinyatakan lengkap dan valid, petugas langsung memproses penerbitan surat/dokumen yang diminta. Pengambilan Berkas (Kasi Ambil): Petugas menginformasikan via WhatsApp bahwa dokumen telah selesai. Pemohon cukup datang ke kantor kecamatan sekali saja untuk menyerahkan berkas fisik asli/formulir basah sekaligus mengambil dokumen yang sudah jadi.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Manfaat & Dampak Bagi Masyarakat Padang Batung Efisiensi Waktu & Biaya Transportasi: Masyarakat tidak perlu bolak-balik ke kantor kecamatan hanya untuk bertanya syarat, mengambil formulir, atau mengantre verifikasi. Mencegah Berkas Ditolak di Tempat: Kepastian kelengkapan berkas sudah dipastikan via WhatsApp sebelum masyarakat datang ke kantor. Mengurangi Antrean: Memutus penumpukan warga di ruang tunggu pelayanan umum kecamatan. Ramah Teknologi & Mudah Diakses: Menggunakan platform WhatsApp yang sudah sangat familiar dan digunakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat

3.8.51 AKSI MONALISA

Tabel 3.57 Profil Inovasi AKSI MONALISA

1	**Nama Inovasi**	AKSI MONALISA (APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI DESA)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Simpur
3	**PIC/Narahubung**	hj.ipah +62 821-5561-8984
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

6	**Uraian Singkat**	Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Proses pemantauan dan evaluasi administrasi serta realisasi keuangan/pembangunan desa secara konvensional seringkali memakan waktu lama, membutuhkan banyak tumpukan dokumen fisik, dan lambat dalam pelaporan perkembangan program di tingkat desa. Tujuan Utama: Menyediakan sistem kontrol berbasis aplikasi/digital terpadu agar Camat dan tim verifikator kecamatan dapat memantau realisasi kegiatan, pencairan dana desa, hingga kepatuhan administrasi seluruh desa di Kecamatan Simpur secara *real-time*, cepat, Fitur & Mekanisme Kerja Utama Input Reporting Digital: Pemerintah desa mengunggah (upload) laporan pertanggungjawaban (LPJ), realisasi APBDes, serta progres fisik kegiatan/pembangunan melalui platform aplikasi secara berkala. *Dashboard* Monitoring *Real-Time*: Pihak kecamatan dapat memantau indikator capaian tiap desa secara langsung melalui *dashboard*, sehingga progres desa yang lancar maupun yang mengalami kendala dapat teridentifikasi lebih awal. Evaluasi & Catatan Verifikasi Terintegrasi: Tim evaluasi kecamatan memberi catatan koreksi atau persetujuan dokumen langsung di dalam aplikasi tanpa perlu pengembalian berkas fisik berulang kali.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Meningkatkan Akuntabilitas APBDes: Meminimalisasi risiko penyimpangan pengelolaan keuangan dan ketidaksesuaian administrasi desa. Efisiensi Pembinaan: Tim kecamatan tidak perlu selalu turun ke lapangan hanya untuk verifikasi berkas awal, melainkan fokus pada pendampingan bagi desa yang membutuhkan. Percepatan Realisasi Anggaran: Proses evaluasi rekomendasi pencairan atau persetujuan laporan desa menjadi jauh lebih ringkas.

3.8.52 SI TAMU SIMPUR

Tabel 3.58 Profil Inovasi SI TAMU SIMPUR

1	**Nama Inovasi**	SI TAMU SIMPUR (SISTEM INFORMASI TAMU *ONLINE* KECAMATAN SIMPUR)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Simpur
3	**PIC/Narahubung**	hj.ipah +62 821-5561-8984
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan

5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	I TAMU SIMPUR (Sistem Informasi Tamu *Online* Kecamatan Simpur) merupakan inovasi tata kelola administrasi dan pelayanan publik berbasis digital yang dikembangkan di Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Inovasi ini mengubah sistem pencatatan buku tamu konvensional (kertas) menjadi sistem registrasi dan manajemen tamu secara digital/elektronik. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Pencatatan tamu secara manual menggunakan buku fisik sering mengalami kendala seperti risiko data terselip/rusak, tulisan tidak terbaca, sulitnya rekapitulasi data kunjungan bulanan/tahunan, serta kurang efisiennya sistem antrean dan pelaporan maksud kedatangan warga atau instansi luar. Tujuan Utama: Mewujudkan tertib administrasi perkantoran, meningkatkan keamanan kantor, mendata riwayat kunjungan masyarakat secara akurat, serta mempermudah rekapitulasi evaluasi kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Simpur. Fitur & Mekanisme Kerja Utama Registrasi Mandiri/Digital: Masyarakat atau tamu yang datang dapat menginput identitas (nama, NIK/alamat, instansi, dan maksud kedatangan) melalui perangkat tablet/touchscreen yang disediakan di meja pelayanan publik atau melalui pemindaian QR Code. Notifikasi & Terkoneksi ke Petugas/Seksi Terkait: Sistem secara otomatis mengarahkan maksud kunjungan tamu ke seksi/bidang yang dituju di kantor kecamatan, sehingga petugas terkait dapat langsung memproses atau menyambut kedatangan. Database & Rekapitulasi Otomatis: Seluruh data riwayat kunjungan tersimpan rapi secara digital (*real-time*), memudahkan pihak kecamatan untuk menarik statistik bulanan mengenai berapa jumlah warga yang datang, sektor pelayanan apa yang paling sering diakses, dan tren kebutuhan masyarakat
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Arsip Data Rapi & Aman: Menghilangkan tumpukan buku tamu fisik dan memudahkan pencarian riwayat kunjungan kapan saja. Dasar Pengambilan Keputusan: Data statistik tamu membantu Camat dan jajaran dalam mengevaluasi jenis pelayanan publik apa yang paling tinggi permintaannya di Kecamatan Simpur.

		Kesan Profesional & Modern: Menampilkan citra kantor pelayanan publik yang responsif, tertib, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

3.8.53 SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SUNGAI RAYA

Tabel 3.59 Profil Inovasi SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN

1	**Nama Inovasi**	SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SUNGAI RAYA (SELARAS)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Sungai Raya
3	**PIC/Narahubung**	Abdur Rahman 085822342045
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SELARAS (Sistem Verifikasi Elektronik Layanan Administrasi Masyarakat Sungai Raya) merupakan inovasi digitalisasi pelayanan publik dan tata kelola administrasi yang dikembangkan oleh Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Inovasi ini berfokus pada efisiensi dan transparansi alur verifikasi berkas permohonan administrasi masyarakat agar proses penerbitan dokumen pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan dapat dipantau. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Proses verifikasi dokumen pelayanan administrasi (seperti pengantar surat kependudukan, rekomendasi, atau perizinan mikro) di tingkat kecamatan secara manual sering kali membutuhkan alur pemeriksaan fisik berjenjang yang memakan waktu. Hal ini berisiko menyebabkan penumpukan berkas, kesalahan verifikasi (human error), atau ketidakpastian status permohonan bagi warga. Tujuan Utama: Memangkas waktu tunggu verifikasi berkas, menghilangkan hambatan birokrasi manual, serta memastikan seluruh dokumen permohonan masyarakat diverifikasi secara valid dan sistematis secara elektronik (paperless). Fitur & Mekanisme Kerja Utama Verifikasi Berkas Elektronik: Petugas verifikator kecamatan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan yang diunggah atau dikirim secara digital melalui sistem tanpa perlu memindahkan tumpukan berkas fisik dari meja ke meja. Validasi & Status *Real-Time*: Sistem memberikan penanda (status tracking) pada setiap tahapan pemeriksaan (misalnya: Diterima, Perlu Perbaikan,

		Terverifikasi, atau Selesai), sehingga memudahkan kontrol internal dan kepastian pelayanan. Penyelarasan Data & Sistem Integrasi: Mengintegrasikan data permohonan antara tingkat desa/kelurahan dengan pihak kecamatan untuk meminimalisasi duplikasi data atau persyaratan berulang.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Kepastian Layanan: Warga mendapatkan kepastian status berkas dengan cepat tanpa perlu bolak-balik hanya untuk mengecek alur verifikasi. Transparansi & Akuntabilitas: Seluruh histori verifikasi tercatat dalam sistem, meminimalisasi risiko manipulasi atau kelalaian pemeriksaan dokumen. Efisiensi Kerja ASN: Membantu petugas kecataman mengelola dan mengarsipkan dokumen pelayanan masyarakat secara rapi, hemat kertas (go green), dan terstruktur.

3.8.54 Sistem Informasi Data Kecamatan

Tabel 3.60 Profil Inovasi Sistem Informasi Data Kecamatan

1	**Nama Inovasi**	Sistem Informasi Data Kecamatan (SiDaTan)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan padang batung
3	**PIC/Narahubung**	Elly 082154017272
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SiDaTan (Sistem Informasi Data Kecamatan) merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang berfokus pada pengelolaan, integrasi, dan penyajian data statistik sektoral serta basis data wilayah di tingkat kecamatan. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) maupun beberapa daerah di Indonesia, inovasi SiDaTan umumnya dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan klasik birokrasi, yaitu tersebarnya data pembangunan dan kependudukan di berbagai seksi/desa tanpa adanya pusat data terpadu (satu-satunya sumber data resmi). Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan pemberian bantuan sosial di tingkat kecamatan sering kali terkendala oleh data yang tidak akurat, tidak up-to-date, atau tumpang-tindih antar-desa/kelurahan. Tujuan Utama: Mewujudkan basis data kecamatan yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses untuk mendukung perencanaan

		pembangunan wilayah, evaluasi program, serta penyediaan data statistik bagi masyarakat dan instansi pemerintah terkait. Fitur & Mekanisme Kerja Utama Pusat Database Terpadu (One Data Center): Mengumpulkan dan mengategorikan berbagai jenis data sektoral, seperti data potensi desa, demografi penduduk, fasilitas umum, penerima bantuan sosial, hingga data bidang kesehatan/pendidikan. Pembaruan Data Berbasis Aplikasi (Data Updating): Memuat fitur input dan pembaruan data secara berkala yang dapat dilakukan secara langsung oleh operator desa atau petugas kecamatan. Penyajian Data Visual & Statistik: Menyajikan data dalam bentuk grafik, peta tematik, atau tabel statistik yang intuitif sehingga memudahkan Camat, instansi teknis, maupun publik dalam membaca peta potensi dan kondisi wilayah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Data (Data-Driven Policy): Membantu Camat dan Pemerintah Daerah merumuskan kebijakan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan rill di lapangan. Transparansi & Kemudahan Akses: Memudahkan masyarakat, peneliti, maupun investor yang membutuhkan informasi/data profil statistik kecamatan. Efisiensi Kinerja: Memangkas waktu pengumpulan data manual saat dibutuhkan laporan berkas atau verifikasi program secara mendadak.

3.8.55 SIMKuDa

Tabel 3.61 Profil Inovasi SIMKuDa

1	**Nama Inovasi**	SIMKuDa (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Desa)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan padang batung
3	**PIC/Narahubung**	Elly 082154017272
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SIMKuDa (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Desa) merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di tingkat kecamatan dan kabupaten.

		Inovasi ini memosisikan pihak kecamatan sebagai pembina dan pengawas (supervisor) langsung terhadap siklus keuangan seluruh desa di wilayahnya. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Pengelolaan keuangan desa yang dinamis sering kali menghadapi kendala keterlambatan pelaporan, risiko penyimpangan anggaran, serta lambatnya proses verifikasi rekomendasi pencairan dana desa akibat alur penyampaian berkas LPJ fisik yang panjang. Tujuan Utama: Memulai pemantauan keuangan desa secara digital dan terintegrasi agar perencanaan, penyerapan, serta pertanggungjawaban APBDes dapat dipantau secara *real-time*, transparan, dan terukur. Fitur & Mekanisme Kerja Utama *Dashboard* Monitoring *Real-Time*: Menyajikan overview tingkat penyerapan anggaran, sisa anggaran, dan grafik progress pengerjaan fisik maupun non-fisik dari setiap desa di wilayah kecamatan. Verifikasi & Rekomendasi Pencairan Digital: Pemerintah desa dapat melampirkan usulan pencairan atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) melalui sistem. Tim verifikasi kecamatan kemudian melakukan pemeriksaan berkas secara sistematis sebelum menerbitkan rekomendasi pencairan. Peringatan Dini & Deteksi Kendala (Early Warning System): Sistem memberi penanda (alert) bagi desa yang mengalami keterlambatan dalam pelaporan, penyerapan anggaran yang tidak sesuai target, atau berkas pertanggungjawaban yang belum lengkap.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Akuntabilitas Keuangan Desa: Meminimalisasi risiko temuan administrasi dan potensi ketidaksesuaian penggunaan dana desa. Percepatan Penyerapan Anggaran: Memangkas birokrasi verifikasi berkas manual sehingga proses penerbitan rekomendasi pencairan menjadi jauh lebih cepat. Efisiensi Pembinaan Kecamatan: Pihak kecamatan dapat langsung memfokuskan pembinaan dan pendampingan khusus kepada desa-desa yang terdeteksi mengalami kendala pada *dashboard* monitoring.

3.8.56 SiSuKa PD

Tabel 3.62 Profil Inovasi SiSuKa PD

1	**Nama Inovasi**	SiSuKa PD (Administrasi Surat Keluar, SK dan Perjalanan Dinas)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan padang batung
3	**PIC/Narahubung**	Elly 082154017272
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SiSuKa PD (Administrasi Surat Keluar, SK, dan Perjalanan Dinas) merupakan inovasi berbasis aplikasi/sistem informasi digital yang dirancang untuk mengotomatisasi dan mempermudah tata kelola administrasi perkantoran, khususnya dalam pengelolaan surat keluar, Surat Keputusan (SK), serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Inovasi ini berfokus pada modernisasi kearsipan dan efisiensi alur birokrasi di internal instansi atau kecamatan/dinas pemerintah daerah. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Pengelolaan administrasi secara konvensional sering memicu masalah seperti penomoran surat yang ganda (overlapping), penumpukan penandatanganan dokumen fisik saat pimpinan tidak berada di tempat, sulitnya pelacakan arsip SK lama, serta kerumitan penyusunan berkas Perjalanan Dinas (SPPD, Surat Tugas, dan Rincian Biaya) secara berulang. Tujuan Utama: Mewujudkan sistem administrasi perkantoran yang tertib, cepat, hemat kertas (paperless), dan terpusat dalam satu pintu (one-stop administrative system). Fitur & Mekanisme Kerja Utama Pengelolaan Surat Keluar & Penomoran Otomatis: Sistem memberikan nomor surat keluar secara otomatis sesuai dengan tata naskah dinas, mengeliminasi risiko nomor ganda atau surat "susupan". Manajemen Surat Keputusan (SK) Digital: Penyusunan, pengarsipan, dan pencarian basis data SK instansi dilakukan secara elektronik, memudahkan pemantauan masa berlaku SK maupun penelusuran riwayat keputusan. Modul Integrasi Perjalanan Dinas (SPPD): Memungkinkan pencetakan Surat Tugas, SPPD, dan berkas pendukung perjalanan dinas secara otomatis hanya dengan memasukkan data personil, tujuan, serta tanggal kegiatan tanpa perlu menginput ulang data secara manual.

		Alur Verifikasi & Tanda Tangan Elektronik (TTE): Memungkinkan proses persetujuan (approval) berjenjang dari atasan langsung hingga penandatanganan pimpinan secara digital, kapan saja dan di mana saja.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Efisiensi Waktu & Biaya: Memangkas durasi pembuatan berkas SPPD dan pengurusan surat keluar dari hitungan jam/hari menjadi hitungan menit, serta menghemat penggunaan kertas (go green). Tertib Arsip & Akuntabilitas: Seluruh histori pembuatan surat keluar, SK, dan SPPD tersimpan rapi dalam basis data terpusat, memudahkan proses audit atau pemeriksaan internal. Kemudahan Akses: Pimpinan dan staf dapat memproses dan memantau status dokumen administrasi secara *real-time* tanpa terhalang jarak.

3.8.57 BAHANTAR

Tabel 3.63 Profil Inovasi BAHANTAR

1	**Nama Inovasi**	BAHANTAR
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kandangan Kota
3	**PIC/Narahubung**	Ipul +62 822-5077-9131
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	BAHANTAR (Bantuan Beras HSS Antar Sampai Ke Rumah) merupakan inovasi pelayanan sosial berbasis kepedulian masyarakat dan pelayanan publik langsung (direct service) yang dikembangkan di Kelurahan Kandangan Kota, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Inovasi ini mengusung pendekatan jemput bola untuk memastikan bantuan beras/pangan dari pemerintah daerah atau swadaya masyarakat benar-benar sampai secara langsung ke tangan warga penerma manfaat. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Sebagian warga penerima bantuan sosial—khususnya para lansia, penyandang disabilitas, serta warga sakit/kurang mampu—sering kali mengalami kesulitan fisik maupun keterbatasan biaya transportasi untuk mengambil jatah bantuan beras ke kantor kelurahan atau titik distribusi. Tujuan Utama: Memberikan kemudahan akses layanan sosial, memangkas biaya operasional warga penerima manfaat, serta memastikan

		penyaluran bantuan beras tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu tanpa membebani warga. Mekanisme Kerja & Keunggulan Utama Layanan Antar Sampai Pintu (Door-to-Door Delivery): Petugas kelurahan, didampingi oleh elemen masyarakat (seperti Ketua RT, Karang Taruna, atau relawan), mengantarkan langsung paket bantuan beras ke rumah masing-masing penerima manfaat. Pendataan & Verifikasi Langsung: Saat penyerahan bantuan di rumah warga, petugas sekaligus dapat memverifikasi kondisi rill lapangan penerima manfaat, memastikan penerima bantuan tepat sasaran sesuai kriteria. Sentuhan Humanis & Pemantauan Kondisi Warga: Proses pengantaran menjadi sarana komunikasi langsung antara pihak Kelurahan Kandangan Kota dengan masyarakat rentan, sehingga pemerintah setempat dapat sekaligus memantau kondisi kesehatan maupun kebutuhan sosial warga secara langsung.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Sangat Membantu Kelompok Rentan: Lansia, warga disabilitas, dan warga tidak mampu tidak perlu repot mengantre atau memikirkan ongkos transportasi. Transparansi & Akuntabilitas Penyaluran: Meminimalisasi risiko penyalahgunaan atau ketidaktepatan sasaran bantuan karena diserahkan dan didokumentasikan secara langsung di lokasi penerima. Meningkatkan Empati & Kehadiran Pemerintah: Mempererat hubungan emosional dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kelurahan Kandangan Kota.

3.8.58 JEMPOL PBB

Tabel 3.64 Profil Inovasi JEMPOL PBB

1	**Nama Inovasi**	JEMPOL PBB
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kandangan Kota
3	**PIC/Narahubung**	Ipul +62 822-5077-9131
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi JEMPOL PBB (Jemput Bola Pajak Bumi dan Bangunan) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui pendekatan pelayanan jemput bola yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi ini dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mempercepat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), mempermudah proses pembayaran PBB, serta memperbarui data objek dan subjek pajak secara berkala.

		Melalui pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan responsif, JEMPOL PBB diharapkan mampu meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Implementasi inovasi JEMPOL PBB (Jemput Bola Pajak Bumi dan Bangunan) telah menghasilkan perubahan nyata dalam penyelenggaraan pelayanan PBB-P2 di Kelurahan Kandangan Kota. Melalui pendekatan jemput bola, pelayanan yang sebelumnya berpusat di kantor menjadi lebih dekat dengan masyarakat sehingga akses terhadap pelayanan perpajakan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Inovasi ini juga meningkatkan efektivitas penyampaian SPPT, mempermudah konsultasi perpajakan, mempercepat proses pembayaran, serta mendukung pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkelanjutan. Dari sisi tata kelola, inovasi ini telah mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta memperkuat koordinasi antara kelurahan, RT/RW, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Pelaksanaan pelayanan yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadikan proses pelayanan lebih terstandar, akuntabel, dan mudah direplikasi oleh wilayah lain. Secara langsung, inovasi ini telah memberikan kemudahan pelayanan kepada 2.873 objek pajak di Kelurahan Kandangan Kota. Peningkatan kepatuhan pembayaran PBB berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas umum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

3.8.59 GasanKU = Gerakan Administrasi Santun Kandangan Utara

Tabel 3.65 Profil Inovasi GasanKU = Gerakan Administrasi Santun

1	**Nama Inovasi**	GasanKU = Gerakan Administrasi Santun Kandangan Utara
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	GasanKU (Gerakan Administrasi Santun Kandangan Utara) merupakan inovasi pelayanan publik dan budaya kerja birokrasi yang dikembangkan oleh Kelurahan/Kecamatan Kandangan Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini memadukan modernisasi administrasi dengan pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kesantunan, keramahan, dan kearifan lokal. GasanKU hadir untuk mengubah persepsi pelayanan tingkat kelurahan yang dulunya terkesan kaku dan lambat menjadi lebih humanis, cepat, dan responsif. Melalui inovasi ini, setiap pengurusan dokumen administrasi warga—seperti surat keterangan, rekomendasi, dan pengantar—dilayani dengan standar kesantunan yang terukur, alur transparan, serta kepastian waktu penyelesaian.

7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Melalui pendekatan yang ramah dan humanis, GasanKU membawa perubahan nyata pada kualitas pelayanan publik di Kandangan Utara. Bagi masyarakat, inovasi ini menciptakan pengalaman mengurus administrasi yang jauh lebih nyaman, cepat, dan transparan—memangkas waktu tunggu serta memberikan kepastian prosedur tanpa kerumitan birokrasi. Di sisi lain, Gerakan ini berhasil mentransformasi budaya kerja aparatur kelurahan menjadi lebih profesional, empatik, dan responsif. Berkurangnya hambatan komunikasi antara warga dan petugas tidak hanya meningkatkan ketertiban tata kelora administrasi, tetapi juga membangun kembali kepercayaan penuh masyarakat terhadap pemerintah setempat.

3.8.60 SIGMA KAMBOJA

Tabel 3.66 Profil Inovasi SIGMA KAMBOJA

1	**Nama Inovasi**	SIGMA KAMBOJA
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Ulama dan Umara memiliki peran tidak tergantikan dalam masyarakat. Ulama merupakan pewaris Nabi, berperaan menjalankan dakwah untuk terus menanamkan dan merawat ajaran islam agar terefleksi dalam diri setiap kaum muslim demi terciptanya kehidupan umat yang diridhoi Allah SWT. Sementara Umara, pemimpin, atau pejabat, menjadi pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan-kebijakan bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. keduanya menjalin hubungan sinergis yang ideal agar tugas dan peran masing-masing bisa berjalan beriringan. sinergi anatar umara dan ulama juga menjadi kunci keberhasilan dalam pembangunan. sehubungan dengan hal tersebut, salah satu sinergi yang dirintis pemerintah kelurahan kandangan utara adalah bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kecamatan Kandangan mengadakan kegiatan ceramah agama rutin bulanan dikantor MUI kecamatan Kandangan yang dilaksanakan setiap hari jum'at pertama tiap awal bulan. sekaligus memfasilitasi pelaku UMKM yang ada di kelurahan kandangan utara membuka lapak dagangan di sepanjang jalan kamboja, tempat domisili kantor MUI kecamataan Kandangan. permerintah kelurahan kandangan utara juga memfasilitasi pembagian voucher belanja gratis yang dibagikan kepada jamaah yang hadir pada saat kegiatan ceramah agama. Voucher belanja gratis dihimpun dari donasi dinas, kecamatan kandangan, perbankan, dan baznas. Para Ulama dalam kedudukannya sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat memiliki peran yang penting dan strategis. Mereka memperkokoh etika moral dan spiritual serta mencerahkan umat dengan ajaran nilai-nilai Islam. Dalam dunia modern, peran, fungsi, dan tanggung jawab ulama tidak akan pernah tergantikan.

		kegiatan ceramah agama rutin tiap bulan dan fasilitas pembukaan lapak UMKM tersebut oleh kelurahan kandangan utara dijadikan rintisan inovasi dengan nama sinergi ulama umara jalan kamboja (sigma Kamboja).
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Terjadi sinergi antara ulama dan umara dalam membangun dan mensejahterakan warga

3.8.61 e SURAT KETERANGAN PINDAH

Tabel 3.67 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN PINDAH

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KETERANGAN PINDAH
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.62 e SURAT KUASA KEPENGURUSAN

Tabel 3.68 Profil Inovasi e SURAT KUASA KEPENGURUSAN

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KUASA KEPENGURUSAN
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.63 e SURAT KETERANGAN BEDA NAMA

Tabel 3.69 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN BEDA NAMA

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KETERANGAN BEDA NAMA
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.64 e SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

Tabel 3.70 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KETERANGAN AHLI WARIS
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.65 ADEK PUAS MAS

Tabel 3.71 Profil Inovasi ADEK PUAS MAS

1	**Nama Inovasi**	ADEK PUAS MAS
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Untuk menjamin kualitas tersebut, diperlukan sistem evaluasi yang mampu menggambarkan sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan pemerintah. Salah satu instrumen yang digunakan adalah pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Namun, praktik pengukuran IKM di Kelurahan Kandangan Utara selama ini masih menghadapi berbagai kendala. Metode pengukuran yang dilakukan secara manual menyebabkan hasil yang diperoleh sering kali kurang representatif, tidak konsisten, dan sulit dijadikan dasar dalam merancang kebijakan perbaikan layanan. Survei manual juga membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak efisien untuk dilakukan secara rutin. Akibatnya, proses evaluasi pelayanan publik menjadi kurang optimal dan tidak dapat menangkap kondisi riil di lapangan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik masih relatif rendah. Banyak warga enggan menyampaikan kritik atau saran karena merasa tidak ada media yang praktis, aman, dan menjamin kerahasiaan identitas mereka. Hal ini membuat suara masyarakat yang seharusnya menjadi bahan evaluasi utama dalam perbaikan layanan publik tidak terserap secara maksimal. Padahal, masukan dari masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Melihat permasalahan tersebut, lahirlah inovasi ADEK PUAS MAS (Aplikasi Digital Evaluasi Kepuasan Masyarakat)

		sebagai solusi berbasis teknologi digital. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat dengan mudah memberikan penilaian langsung terhadap pelayanan yang mereka terima kapan saja dan di mana saja. Sistem ini dirancang lebih praktis, partisipatif, dan berbasis data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya. Dengan adanya ADEK PUAS MAS, proses pengumpulan data kepuasan masyarakat dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, hasil penilaian dapat langsung dianalisis secara digital untuk memberikan gambaran utuh tentang kualitas pelayanan publik di Kelurahan Kandangan Utara. Data yang terkumpul juga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis, penyusunan kebijakan, serta perbaikan berkelanjutan terhadap layanan publik. Dengan demikian, inovasi ini bukan hanya menjawab permasalahan teknis dalam pengukuran IKM, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan ADEK PUAS MAS memberikan berbagai manfaat nyata dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik. Inovasi ini memungkinkan pengumpulan data kepuasan masyarakat secara *real-time* dengan cara yang mudah dan tidak membebani masyarakat maupun petugas. Aplikasi ini mempermudah identifikasi area layanan yang membutuhkan perbaikan, serta menjadi dasar dalam evaluasi kinerja petugas secara objektif. Selain itu, penggunaan teknologi seperti QR Code dan link digital memudahkan masyarakat untuk mengakses survei dari berbagai perangkat tanpa harus hadir langsung atau mengisi formulir manual. Efisiensi dalam waktu, biaya, dan tenaga menjadi keunggulan penting dari sistem ini dibandingkan metode konvensional.

3.8.66 e SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Tabel 3.72 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (PRIBADI)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.67 e SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Tabel 3.73 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (LAIN-LAIN)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara

3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.68 e SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

Tabel 3.74 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN PENGHASILAN

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KETERANGAN PENGHASILAN
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.69 SI PETENISKU

Tabel 3.75 Profil Inovasi SI PETENISKU

1	**Nama Inovasi**	SI PETENISKU
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	E-goverment merupakan konsep program yang menerapkan sistem pelayanan pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis pemanfaatan teknologi informasi. program ini bertujuan untuk setiap layanan pemerintah berbasis online. untuk pemanfaatan teknologi informasi, kelurahan kandangan utara terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. salah satu langkah yang dibuat oleh kelurahan kandangan utara adalah membuat sistem layanan berupa *website* informasi pelayan yang ada di kelurahan kandangan utara. Pelayanan Publik Digital telah menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Transformasi ini menandai perubahan signifikan dari pendekatan konvensional pelayanan publik menjadi sebuah ekosistem yang mengintegrasikan teknologi digital untuk kepentingan masyarakat. Berikut adalah sejumlah faktor dan keunggulan yang terkait dengan pelayanan publik digital. Layanan publik digital mendorong keterlibatan

		masyarakat dalam proses pengembangan kebijakan dan pelaksanaan program. Melalui platform *online*, masyarakat dapat menyampaikan masukan, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif pemerintah. Ini menciptakan koneksi yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menggunakan teknologi digital, pemerintah dapat menghadirkan layanan yang lebih canggih dan inovatif. Mulai dari chatbot untuk layanan pelanggan hingga analisis data untuk memprediksi kebutuhan masyarakat, penerapan teknologi menghasilkan layanan yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik digital memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keterlibatan masyarakat, inisiatif ini membantu menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan efektif. Dalam perjalanannya, pemerintah perlu terus memperbaiki infrastruktur dan meningkatkan literasi digital untuk memastikan manfaat penuh dari layanan publik digital bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dapat di lakukan melalui berbagai aplikasi, seperti aplikasi *mobile*, *website*, dan media sosial. Aplikasi *mobile* memungkinkan masyarakat mengakses pelayanan publik kapan saja dan di mana saja. *Website* dapat di gunakan untuk memberikan informasi dan layanan publik yang terintegrasi. Media sosial dapat di gunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mempromosikan program pelayanan publik. dengan adanya layanan berbasis *website*, memudahkan warga untuk mengakses layanan, cukup dengan membuka *website* dan semua informasi layanan tersedia. untuk mendapatkan layanan yang dikehendaki, cukup dengan mengirimkan berkas persyaratan lewat email atau nomor whatsapp kelurahan. produk layanan akan dikiri balik melalui email atau whatsapp kelurahan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	MANFAAT INOVASI: Manfaat adanya SI PETENIS KU adalah: 1. pelayanan bebasis teknologi informasi 2. kemudahan pelayanan bagi warga di kelurahan kandangan utara 3. adanya transparansi pelayanan kelurahan

3.8.70 e SURAT KEMATIAN LAMA

Tabel 3.76 Profil Inovasi e SURAT KEMATIAN LAMA

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KEMATIAN LAMA
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.71 e SURAT KEMATIAN BARU

Tabel 3.77 Profil Inovasi e SURAT KEMATIAN BARU

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KEMATIAN BARU
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.72 BASTIK 3 AH

Tabel 3.78 Profil Inovasi BASTIK 3 AH

1	**Nama Inovasi**	BASTIK 3 AH
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Salah satu jenis sampah yang paling sulit terurai adalah sampah plastik. hanya 5% dari sampah plastik yang didaur ulang dengan efektif, sementara 40% lainnya berakhir di tempat pembungan akhir (TPA) dan sisanya berakhir di ekosistem seperti sungai, rawa, dan lautan. Sampah plastik dapat menimbulkan pencemaran, baik ditanah, air, maupun udara. pengelolan seperi penggunaan kembali (reuse) atau daur ulang plastik (recycle) saja tidak cukup. harus ada upaya untuk mengurangi penggunaan plastik. melihat besarnya dampak dari pencemaran plastik maka diperlukan peran aktif dari seluruh pihak. berbagai kegiatan dilingkungan pemerintah maupun masyarakat masih tidak bisa lepas dari penggunaan plastik, seperti penggunaan air mineral dari kemasan. hal ini menyebabkan jumlah sampah plastik yang dihasilkan cukup tinggi. sehingga dianggap perlu dilakukan sedukasi tentang pengurangan penggunaan plastik, perlakuan sampah plastik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan pemanfaatan sampah plastik agar bernilai ekonomis. adanya edukasi tentang pemanfaatan sampah plastik dan meningkatakan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga nantinya akan berpengaruh terhadap perilaku penggunaan plastik lebih bijak. salah satu upaya edukasi pemanfaatan sampah plastik dilingkungan kantor kelurahan kandangan utara adalah dengan menggagas gerakan menukarkab sampah plastik, berupa botol minuman atau gelas bekas air mineral dalam kemasan dengan hadiah berupa paket sembako, tumbler atau tottebag. maupun menukarkan botol minuman atau gelas bekas air mineral dalam kemasan dengan undian berhadiah dan atau botol minuman atau gelas bekas air mineral dalam

		kemasan dijadikan sebagai sedekah. Manfaat pengolahan sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran sampah bagi sebagian orang yang tidak mau berfikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam menlakukannya, sehingga terciptalah berbagai energy yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah di baik telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, termasuk kota-kota besar di Indonesia. Dengan kerjasama dengan berbagai pihak, Sebuah daerah dapat menemukan cara pengolahan sampah yang benar. Gerakan tersebut dinamakan: Bahurup sampah plastik dengan hadiah, atau undian berhadiah dan atau sedekah (BASTIK 3 AH) Kecamatan Kandangan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Adanya edukasi tentang pemanfaatan sampah plastik dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat sehingga akan berpengaruh terhadap perilaku pemanfaatan sampah plastik yang lebih baik.

3.8.73 e SURAT KETERANGAN JANDA/DUDA

Tabel 3.79 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN JANDA/DUDA

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KETERANGAN JANDA/DUDA
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.74 e SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH

Tabel 3.80 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.75 e SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH

Tabel 3.81 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH

2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.76 e SURAT KETERANGAN AHLI WARIS KEMATIAN

Tabel 3.82 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN AHLI WARIS KEMATIAN

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KETERANGAN AHLI WARIS KEMATIAN
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.77 e SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

Tabel 3.83 Profil Inovasi e SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG

1	**Nama Inovasi**	e SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.78 e SURAT PERNYATAAN JUAL BELI

Tabel 3.84 Profil Inovasi e SURAT PERNYATAAN JUAL BELI

1	**Nama Inovasi**	e SURAT PERNYATAAN JUAL BELI
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.79 e SURAT KETERANGAN HIBAH

Tabel 3.85 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN HIBAH

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KETERANGAN HIBAH
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.80 e SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA KANTOR

Tabel 3.86 Profil Inovasi e SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA KANTOR

1	**Nama Inovasi**	e SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA KANTOR
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Belum tercantum dalam rekap inovasi daerah.

3.8.81 ISMA BADASTARKU

Tabel 3.87 Profil Inovasi ISMA BADASTARKU

1	**Nama Inovasi**	ISMA BADASTARKU
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Isma Badastar adalah sistem informasi manajemen aset berbasis barcode matriks data dan instagram yang mampu memproses data yang masuk melalui scan barcode matriks data kemudian hyperlink ke Instagram menjadi suatu bentuk informasi penatausahaan aset yang baik, cepat, lengkap, tepat dan sesuai peraturan dan landasan hukum yang berlaku. Salah satu upaya dilaksanakannya sosialisasi ini adalah kita berharap agar sumber daya aparatur kita dapat semakin

		profesional dalam melakukan pengelolaan barang milik daerah sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah, yang akan menambah potensi meningkatkan PAD
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Manfaat dan Hasil yang diperoleh Dapat memastikan mutasi aset pada Simda BMD baik total maupun itemnya sesuai dengan data di bagian keuangan Memudahkan penatausahaan aset pada Kelurahan Kandangan Utara

3.8.82 SI-PIKAT

Tabel 3.88 Profil Inovasi SI-PIKAT

1	**Nama Inovasi**	SI-PIKAT
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kelurahan Kandangan Barat
3	**PIC/Narahubung**	Fatma
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SI-PIKAT (Sistem Pelayanan tanpa Sekat) merupakan inovasi pelayanan publik terpadu yang dirancang untuk meruntuhkan sekat-sekat birokrasi, jarak geografis, dan kerumitan administrasi dalam mengakses layanan pemerintah. Inovasi ini memadukan kemudahan akses digital dengan simplifikasi prosedur, sehingga masyarakat tidak lagi dihadapkan pada proses yang berbelit-belit atau persyaratan yang tumpang tindih antar-unit kerja. Melalui SI-PIKAT, seluruh alur pengusulan, pemrosesan, hingga penerbitan dokumen pelayanan publik dipusatkan dalam satu pintu yang ramah pengguna, transparan, dan dapat diakses kapan saja tanpa batasan ruang dan waktu.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan SI-PIKAT memberikan dampak nyata berupa peningkatan kesetaraan akses pelayanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga di kawasan terpencil maupun kelompok rentan. Inovasi ini secara signifikan memangkas waktu tunggu, jalur birokrasi, dan biaya operasional yang sebelumnya harus dikeluarkan warga saat mengurus administrasi. Dari sudut pandang tata kelola birokrasi, SI-PIKAT berhasil menciptakan budaya kerja yang transparan, responsif, dan akuntabel dengan mengeliminasi potensi percaloan serta praktik pungutan liar (zero pungli). Keterbukaan alur proses pada SI-PIKAT tidak hanya meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara berkelanjutan, tetapi juga menguatkan kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan warga.

3.8.83 Peduli Umpeg

Tabel 3.89 Profil Inovasi Peduli Umpeg

1	**Nama Inovasi**	Peduli Umpeg (Pengelolaan Dokumen Lingkup Bagian Umum dan Kepegawaian)

2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BBHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	PEDULI UMPEG (Pengelolaan Dokumen Lingkup Bagian Umum dan Kepegawaian) merupakan inovasi digital RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip dan administrasi kepegawaian. Inovasi ini hadir sebagai solusi atas banyaknya berkas kepegawaian ASN maupun tenaga kontrak yang sebelumnya masih disimpan secara fisik, sehingga memerlukan ruang penyimpanan yang luas, penggunaan map dan rak dalam jumlah besar, serta memiliki risiko tinggi mengalami kerusakan maupun kehilangan. Melalui aplikasi PEDULI UMPEG, seluruh dokumen kepegawaian dikelola secara digital sehingga dapat diakses dengan mudah kapan saja dan di mana saja oleh pegawai sesuai hak akses yang dimiliki. Sistem ini memudahkan proses penyimpanan, pencarian, pembaruan, dan pengelolaan dokumen secara lebih cepat, aman, serta terdokumentasi dengan baik. Selain mengurangi penggunaan arsip fisik, aplikasi ini juga mendorong setiap pegawai untuk memperbarui dan menjaga kelengkapan dokumennya secara mandiri. Dengan penerapan PEDULI UMPEG, pengelolaan arsip kepegawaian di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan menjadi lebih tertib, efisien, aman, dan berbasis digital. Inovasi ini mendukung terwujudnya tata kelola administrasi kepegawaian yang modern, meningkatkan efektivitas pelayanan internal, serta memperkuat implementasi transformasi digital di lingkungan rumah sakit.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dengan adanya Aplikasi Peduli Umpeg maka administrasi kepegawian dan penegelolaan berkas dapat diakses dimana saja, berbasis digital, tidak mudah hilang dan rusak serta user/pegawai yang bersangkutan yang akan menjaga datanya masing_x0002_masing untuk selalu update.

3.8.84 SI IDAH PEDALAMAN

Tabel 3.90 Profil Inovasi SI IDAH PEDALAMAN

1	**Nama Inovasi**	SI IDAH PEDALAMAN (Sistem Informasi Kemudahan Pelayanan dalam Genggaman)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BBHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

6	**Uraian Singkat**	Inovasi SI IDAH PEDALAMAN (Sistem Informasi Kemudahan Pelayanan Dalam Genggaman) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, mudah diakses, cepat, efektif, dan efisien melalui satu aplikasi (Super App) yang menghubungkan seluruh layanan digital RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan. Inovasi ini ditargetkan untuk meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan, mengurangi kompleksitas penggunaan berbagai aplikasi yang terpisah, mempercepat akses layanan digital, serta meningkatkan kualitas dan kepuasan pelayanan publik. Selain itu, SI IDAH PEDALAMAN mendukung transformasi digital rumah sakit, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan tata kelola pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi, serta mendukung terwujudnya Smart Hospital di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Target capaian inovasi adalah meningkatnya pemanfaatan layanan digital oleh masyarakat, terciptanya integrasi seluruh layanan digital rumah sakit dalam satu platform, meningkatnya efisiensi penyelenggaraan pelayanan, serta terwujudnya pelayanan publik yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan inovasi SI IDAH PEDALAMAN (Sistem Informasi Kemudahan Pelayanan Dalam Genggaman) memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan melalui tersedianya satu aplikasi terintegrasi yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan kesehatan secara cepat, mudah, dan efisien. Inovasi ini berhasil mengurangi kompleksitas penggunaan berbagai aplikasi yang sebelumnya berdiri sendiri, sehingga masyarakat cukup menggunakan satu Super App untuk memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan. Dampak lainnya adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan digital, mempercepat akses informasi layanan, memperkuat koordinasi antarunit melalui sistem yang terintegrasi, serta mendukung implementasi transformasi digital dan Smart Hospital. Tingginya pemanfaatan inovasi juga tercermin dari jumlah pengguna aplikasi yang telah mencapai lebih dari 10.000 pengguna berdasarkan data Google Play Store, menunjukkan bahwa SI IDAH PEDALAMAN diterima dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat sebagai sarana pelayanan kesehatan digital. Selain meningkatkan kepuasan masyarakat, inovasi ini juga mendukung terwujudnya tata kelola pelayanan publik yang lebih modern, responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat

3.8.85 e-RKBMD

Tabel 3.91 Profil Inovasi e-RKBMD

1	**Nama Inovasi**	e-RKBMD (ELEKTRONIK RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BBHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi

4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	e-RKBMD (Elektronik Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) merupakan inovasi digital RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Inovasi ini hadir sebagai solusi atas proses penyusunan RKBMD yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama, berisiko terjadi kesalahan, serta menyebabkan beberapa usulan kebutuhan barang tidak terakomodasi dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) maupun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) rumah sakit. Melalui aplikasi berbasis elektronik, proses penyusunan usulan RKBMD mulai dari tingkat Kuasa Pengguna Barang hingga Pengguna Barang dapat dilakukan secara terstruktur, terdokumentasi, dan terintegrasi. Sistem ini mempermudah pengajuan, pengkajian, verifikasi, serta pengendalian usulan kebutuhan barang dan pemeliharaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga seluruh kebutuhan dapat dipantau dan diproses secara lebih cepat dan akurat. Dengan penerapan e-RKBMD, perencanaan kebutuhan barang menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Inovasi ini membantu memastikan seluruh kebutuhan sarana dan prasarana, khususnya peralatan kesehatan, dapat teridentifikasi sejak tahap perencanaan, sehingga mendukung ketersediaan fasilitas pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit, serta mewujudkan tata kelola aset daerah yang lebih modern dan berbasis digital.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Inovasi e-RKBMD Elektonik Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara menjadikan dokumen usulan yang valid dan cepat di dapatkan sebagai dasar pembuatan RKA dan RBA

3.8.86 Aksi IPSRS

Tabel 3.92 Profil Inovasi Aksi IPSRS

1	**Nama Inovasi**	Aksi IPSRS (APLIKASI KINERJA DAN SISTEM INFORMASI INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BBHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

6	**Uraian Singkat**	Aksi IPSRS (Aplikasi Kinerja dan Sistem Informasi Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit) merupakan inovasi tata kelola operasional rumah sakit berbasis digital yang dirancang untuk memutakhirkan pemeliharaan, perbaikan, dan pengawasan aset medis maupun non-medis secara terpadu. Inovasi ini hadir menggantikan alur pelaporan kerusakan sarana-prasarana yang konvensional dan lambat. Melalui aplikasi ini, seluruh unit kerja di rumah sakit dapat melaporkan kerusakan sarana (work order), memantau status pemeliharaan berkas/alat, mendokumentasikan kalibrasi, hingga merekam riwayat kinerja teknisi IPSRS secara real-time dan transparan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan Aksi IPSRS memberikan dampak langsung terhadap percepatan waktu tanggap (response time) penanganan kerusakan fasilitas, sehingga potensi gangguan pada layanan kesehatan dan keselamatan pasien (patient safety) dapat diminimalisir. Inovasi ini memastikan alat medis dan fasilitas sarana pendukung senantiasa berada dalam kondisi laik pakai serta terkalibrasi dengan baik. Dari sisi manajemen dan akuntabilitas, Aksi IPSRS mendokumentasikan rekam jejak aset (asset tracking) dan biaya pemeliharaan secara digital. Hal ini mempermudah perencanaan peremajaan sarana, mencegah kehilangan/kerusakan parah pada alat rumah sakit, serta mengoptimalkan penilaian kinerja individu teknisi secara transparan, terukur, dan akuntabel.

3.8.87 Isma Badastar

Tabel 3.93 Profil Inovasi Isma Badastar

1	**Nama Inovasi**	Isma Badastar (Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis QR code Matrix Data dan Instagram)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BBHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	umlah item aset yang ada di RSUD Brig. Jend. H. Hasan Basry Kandangan sampai 31 Juni 2018 sebanyak 5.972. Jumlah ini akan semakin terus bertambah setiap tahunnya sehingga membutuhkan manajemen pengelolaan aset yang harus lebih baik dan penuh inovatif. Sebagian dari aset tersebut tergolong alat kesehatan yang berukuran kecil. Di dalam permendagri nomor 17 tahun 2007 disebutkan tentang kewajiban kodefikasi barang milik daerah. Alat kesehatan yang berukuran sangat kecil juga memiliki kodefikasi barang namun untuk pemasangan kodefikasi/pelabelan pada alat tersebut sesuai kode aset yang tertera pada SIMDA BMD sangat sulit bahkan mustahil untuk dilakukan. Melihat dari banyaknya jumlah barang yang ada di rumah sakit dan luasnya daerah kerja serta banyaknya ruangan di RSUD Brig. Jend. H. Hasan Basry di samping banyaknya aset yang berukuran kecil maka akan dapat menimbulkan permasalahan baik segi administrasi maupun permasalahan pelacakan

		barang dan permasalahan lainnya apabila tidak terkelola dengan baik apalagi bila di dalam proses audit pengurus barang tidak dapat membuktikan keberadaan maupun data-data aset yang tidak lengkap mengingat banyaknya data dukung yang juga harus disiapkan dan diarsipkan oleh pengurus barang. Melihat permasalahan di atas maka perlu kiranya dicarikan solusi permanen yang efisien (waktu, tenaga, pikiran, tempat dll), efektif, mudah diimplementasikan, lengkap dan selalu up to date. Sistem Informasi Manajemen Aset Berbasis Barcode Matriks Data (Isma Badastar) merupakan solusinya. Isma Badastar merupakan merupakan suatu sistem yang menggunakan teknologi QR barcode yang diyakini jenis terbaik menurut sebagian besar pengguna yaitu barcode jenis matriks data yang dikoneksikan/hyperlink dengan salah satu media terpopuler dan merupakan salah satu media sosial teraman dari hack dengan berbagai pengaturan, yaitu Instagram. Cara kerja dari Isma Badastar ini yaitu scan barcode yang sudah ditempel pada setiap aset/BMD yang kemudian akan disambungkan/hyperlink ke instagram kemudian semua data utama aset tersebut (data kartu inventaris barang pada SIMDABMD sesuai Permendagri 17 tahun 2007) beserta data dukung yang dibutuhkan akan muncul pada layar.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Inovasi ISMA BADASTAR memberikan manfaat yang signifikan dalam pengelolaan aset di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan. Melalui sistem berbasis barcode dan data digital, proses pencarian informasi aset menjadi sangat cepat, inventarisasi lebih efisien, serta pengawasan dan pengendalian aset menjadi lebih akurat. Sistem ini menyediakan informasi aset secara lengkap, mulai dari data inventaris, dokumen pendukung, foto dan video aset, lokasi berbasis peta dan titik koordinat, hingga riwayat pengelolaan aset. Selain itu, ISMA BADASTAR mendukung efisiensi biaya operasional karena tidak memerlukan server maupun jasa programmer, mudah diperbarui sesuai kebutuhan, serta mempercepat proses audit dengan data yang tertata rapi, aman, dan mudah diverifikasi. Bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, inovasi ini mendukung peningkatan kualitas tata kelola aset daerah, memperkuat akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), serta menjadi salah satu upaya dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara itu, bagi masyarakat, penerapan ISMA BADASTAR meningkatkan kepercayaan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, melalui pengelolaan aset yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

3.8.88 SIEVAK

Tabel 3.94 Profil Inovasi SIEVAK

1	**Nama Inovasi**	SIEVAK (SISTEM INFORMASI EVALUASI ASUHAN KEPERAWATAN)

2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BBHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Keperawatan modern merupakan suatu seni dan ilmu yang mencakup berbagai aktivitas konsep dan keterampilan yang berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu. Keperawatan sebagai suatu profesi yang unik karena keperawatan ditujukan ke berbagai respon individu dan keluarga terhadap masalah kesehatan yang dihadapi. Profesi keperawatan merupakan profesi yang kompleks dan beragam. Perawat berpraktik di berbagai tempat yang menuntut aspek keterampilan dan keahlian serta disiplin yang tinggi. Keahlian dalam keperawatan merupakan hasil dari pengetahuan dan pengalaman klinik yang dijalaninya. Keahlian diperlukan untuk menginterpretasikan situasi klinik dan membuat keputusan yang kompleks dalam rangka memberikan asuhan keperawatan yang profesional dan berkualitas. Profesi keperawatan berkembang karena adanya tuntutan masyarakat serta perubahan kebutuhan kesehatan dan berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan pelayanan kesehatan dan pelayanan keperawatan. Evaluasi Asuhan Keperawatan adalah proses penilaian pencapaian tujuan akhir dari pemberian asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan melakukan pengolahan terhadap data yang sudah terkumpul untuk mengukur hasil dari proses keperawatan dengan melibatkan perawat dan pasien dalam proses pengambilan datanya. Evaluasi Asuhan Keperawatan bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa asuhan keperawatan diberikan secara optimal, untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien, sebagai umpan balik untuk memperbaiki siklus dalam proses keperawatan serta menunjang tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelaksanaan proses asuhan keperawatan. Dari hasil pengamatan di lapangan dan data yang ada,pada saat ini proses evaluasi asuhan keperawatan masih belum optimal, sehingga Seksi Asuhan Keperawatan masih mengalami kesulitan dalam menilai efektivitas, efisiensi, dan produktifitas pelayanan asuhan keperawatan pada RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan. maka diperlukan terobosan proyek perubahan dengan judul " SIE-VAK " Sistem Informasi Evaluasi Asuhan Keperawatan Berbasis Android Pada Seksi Asuhan Keperawatan RSUD Brigjend H.Hasan Basry Kandangan. Dengan tersedianya data evaluasi pelayanan asuhan keperawatan yang lengkap dan valid, maka diharapkan dapat memudahkan seksi asuhan keperawatan dalam melakukan evaluasi pelayanan asuhan keperawatan. Dengan hadirnya inovasi ini membuat tersedianya data dan informasi yang mudah dipahami sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan dan Mendukung kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan dalam menjaga dan mempertahankan akreditasi Paripurna dan citra pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan sebagai rumah sakit rujukan serta rumah sakit

		terbaik sebanua anam serta Mendukung percepatan proses visitasi Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hassan Basry Kandangan sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan Satelit.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Hasil evaluasi internal menunjukkan bahwa inovasi ini memberikan dampak positif bagi rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Bagi RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, inovasi ini menyediakan data dan informasi yang mudah dipahami sebagai dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan, mendukung peningkatan mutu pelayanan, mempertahankan akreditasi Paripurna, memperkuat citra rumah sakit sebagai rumah sakit rujukan, serta mendukung proses visitasi sebagai Rumah Sakit Tipe B Pendidikan Satelit. Selain itu, inovasi ini juga mendorong partisipasi aktif pasien dalam upaya perbaikan layanan. Bagi perawat, inovasi ini menjadi sarana untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan produktivitas asuhan keperawatan, sekaligus sebagai umpan balik dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat tanggung jawab profesional dalam praktik keperawatan. Sementara itu, bagi masyarakat, inovasi ini meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan karena sesuai dengan standar, memberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, menjamin mutu asuhan keperawatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, mengurangi risiko malpraktik, serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima.

3.8.89 ES-KREM HASAN BASRY

Tabel 3.95 Profil Inovasi ES-KREM HASAN BASRY

1	**Nama Inovasi**	ES-KREM HASAN BASRY (Elektronik Slip Kompensasi dan Remunerasi)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BHHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi 08971117820
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	ES-KREM HASAN BASRY (Elektronik Slip Kompensasi dan Remunerasi) merupakan inovasi sistem informasi manajemen keuangan dan SDM berbasis digital yang dikembangkan di RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Inovasi ini mengalihkan proses pencetakan dan pendistribusian slip gaji, jasa pelayanan (jaspel), serta rincian remunerasi pegawai dari yang semula berbasis kertas (paper-based) menjadi portal/layanan elektronik mandiri (paperless digital self-service). Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang:

		Sebagai Rumah Sakit Daerah berbasis Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan ribuan tenaga medis, paramedis, dan non-medis, perhitungan kompensasi dan remunerasi memiliki variabel yang kompleks (gaji, tunjangan, insentif kinerja, jasa pelayanan, hingga potongan PPh/BPJS). Pencetakan slip fisik secara manual membutuhkan biaya kertas/tinta yang besar, berisiko terlambat sampai ke pegawai, serta rawan memicu kebocoran data privasi penghasilan. Tujuan Utama: Mewujudkan transparansi akuntansi remunerasi pegawai, menjaga kerahasiaan (privacy) data penghasilan individu, serta efisiensi anggaran operasional cetak di lingkungan RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan. Fitur & Mekanisme Kerja Utama Akses Slip Mandiri Berbasis Akun (Protected Self-Service Portal): Setiap pegawai (dokter, perawat, bidan, hingga staf administrasi) memiliki akun khusus terenkripsi (username & password/PIN) untuk mengakses dan mengunduh slip kompensasi secara mandiri dari smartphone atau komputer. Rincian Komponen Remunerasi Terperinci (Detailed Breakdown): Sistem menyajikan rincian pendapatan secara transparan dan terstruktur, mencakup: Gaji Pokok & Tunjangan Melekat Jasa Pelayanan (Jaspel) Medis / Penunjang / Non-Medis berdasarkan bobot kinerja Insentif Tambahan & Kompensasi Khusus Rincian Potongan (PPh 21, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, iuran/kewajiban organisasi, dll.) Penyimpanan Arsip Historis Digital (Digital Historic Archive): Pegawai dapat melacak dan mengunduh (download) PDF slip remunerasi dari bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya kapan saja dibutuhkan (misal: untuk persyaratan administrasi perbankan atau pelaporan SPT Pajak). Notifikasi & *Real-Time* Processing: Setiap kali hak remunerasi atau kompensasi disalurkan oleh Bagian Keuangan, sistem otomatis memperbarui data dan memberikan pemberitahuan kepada pegawai.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Efisiensi Biaya Operasional & Ramah Lingkungan (Paperless & Cost Reduction): Menghemat penggunaan ribuan lembar kertas, amplop, dan tinta cetak setiap bulannya secara berkelanjutan.

		Jaminan Kerahasiaan Data (Data Privacy & Security): Informasi besaran kompensasi tidak berpotensi tercecer atau terbaca oleh orang lain karena diakses secara langsung dan tertutup oleh pemilik akun sah. Keterbukaan & Akuntabilitas (Transparansi Jaspel): Meminimalisasi ketidakjelasan atau komplain pegawai mengenai perhitungan insentif/jaspel karena seluruh formula dan rincian penerimaan disajikan secara terbuka dan akurat. Kepraktisan Layanan Internal: Staf rumah sakit tidak perlu lagi mengantre atau mendatangi ruangan Bagian Keuangan/Bendahara hanya untuk meminta salinan slip gaji fisik.

3.8.90 SIPETI

Tabel 3.96 Profil Inovasi SIPETI

1	**Nama Inovasi**	SIPETI (Sistem Pelayanan Cuti)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BHHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi 08971117820
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SIPETI (Sistem Pelayanan Cuti) merupakan inovasi berbasis aplikasi/sistem informasi digital yang dikembangkan untuk mempermudah, mempercepat, dan mengotomatisasi tata kelola pengajuan serta penetapan izin cuti Aparatur Sipil Negara (ASN) dan staf di lingkungan instansi pemerintah. Inovasi ini mengalihkan proses pengajuan cuti yang sebelumnya berbasis kertas (paper-based) menjadi sistem pelayanan mandiri berbasis elektronik (self-service digital platform). Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Pengurusan permohonan cuti secara manual membutuhkan waktu yang relatif lama karena menggunakan formulir kertas (hardcopy), verifikasi berkas secara berjenjang yang sering tertunda saat pejabat penandatangan sedang tidak berada di tempat, serta risiko ketidaktepatan penghitungan sisa kuota cuti tahunan pegawai. Tujuan Utama: Mewujudkan tata kelola administrasi kepegawaian yang transparan, akuntabel, efisien, hemat kertas (paperless), serta memberikan kemudahan akses bagi seluruh pegawai dalam mengajukan hak cuti mereka secara *real-time*. Fitur & Mekanisme Kerja Utama

		Pengajuan Cuti Mandiri secara *Online* (Self-Service): Pegawai dapat mengajukan permohonan berbagai jenis cuti (Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan, Cuti Alasan Penting, dll.) secara langsung dari perangkat komputer atau smartphone tanpa perlu mengisi lembar kertas manual. Kalkulator & Rekapitulasi Kuota Cuti Otomatis: Sistem secara otomatis menghitung dan menampilkan sisa kuota cuti tahunan pegawai secara transparan, mengeliminasi potensi kesalahan hitung atau penyalahgunaan sisa hak cuti. Alur Persetujuan Berjenjang & Tanda Tangan Digital: Notifikasi permohonan cuti langsung masuk ke atasan/pejabat berwenang untuk disetujui (approve) atau ditolak secara elektronik, sehingga proses penetapan Surat Izin Cuti tidak terhambat oleh keberadaan fisik pimpinan di kantor. Pusat Data & Integrasi Manajemen Kepegawaian: Seluruh histori cuti pegawai tersimpan rapi dalam basis data terpusat yang terintegrasi dengan sistem informasi kepegawaian (SIMPEG) maupun sistem pemantauan presensi harian.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Efisiensi Waktu & Proses: Memangkas proses pengurusan izin cuti dari yang semula memakan waktu beberapa hari menjadi hanya beberapa menit/jam. Transparansi & Akuntabilitas Data: Baik pegawai, atasan, maupun bagian kepegawaian (BKPSDM/Subbag Umum) memiliki visibilitas yang sama terhadap rekam jejak dan sisa kuota cuti pegawai. Kemudahan Aksesibilitas: Proses verifikasi dan persetujuan cuti dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja oleh pimpinan yang sedang bertugas di luar kantor.

3.8.91 BERANAK

Tabel 3.97 Profil Inovasi BERANAK

1	**Nama Inovasi**	BERANAK (Berkas Lahir Untuk Anak)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BHHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi 08971117820
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	BERANAK (Berkas Lahir Untuk Anak) merupakan inovasi pelayanan publik terpadu yang dirancang untuk mempercepat dan mempermudah penerbitan paket dokumen administrasi kependudukan (Adduk) bagi bayi yang baru lahir secara langsung, cepat, dan tanpa biaya (free-of-charge).

		Inovasi ini mengusung pola kolaborasi lintas instansi antara dinas/kelurahan/kecamatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, atau Bidan Desa). Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Proses pengurusan dokumen kependudukan untuk anak yang baru lahir sering kali tertunda karena orang tua terfokus pada pemulihan pascamelahirkan atau terkendala waktu untuk mengurus berkas secara terpisah ke kantor kelurahan/kecamatan/Disdukcapil. Keterlambatan ini menyebabkan bayi belum memiliki identitas resmi, yang berpotensi menyulitkan pengurusan jaminan kesehatan (BPJS) maupun akses layanan publik dasar lainnya sejak dini. Tujuan Utama: Memastikan setiap bayi yang lahir langsung memiliki kepastian hukum dan identitas kependudukan sejak hari pertama kelahirannya melalui mekanisme layanan paket terpadu (one-stop service). Fitur & Mekanisme Kerja Utama Paket Layanan Terpadu (3-in-1 / 4-in-1): Hanya dengan satu kali pengajuan berkas pendaftaran kelahiran, keluarga langsung mendapatkan dokumen lengkap berupa: Akta Kelahiran Anak Kartu Identitas Anak (KIA) Kartu Keluarga (KK) Pembaruan (menambahkan nama bayi) Akses kepesertaan BPJS/JKN bagi bayi baru lahir (apabila terintegrasi) Integrasi Faskes & Petugas Adduk: Petugas medis di tempat melahirkan (Rumah Sakit/Puskesmas/Bidan) memverifikasi data persalinan dan mengunggah persyaratan dokumen ke sistem secara digital, sehingga proses diproses otomatis oleh petugas administrasi. Penyerahan Dokumen Langsung (On-the-Spot): Dokumen kependudukan yang sudah dicetak dapat langsung diserahkan kepada orang tua sebelum pasien/ibu pulih dan keluar dari fasilitas kesehatan.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Kemudahan & Kepraktisan: Orang tua tidak perlu datang atau mengantre di kantor dinas kependudukan/kecamatan usai proses persalinan.

		Perlindungan Hak Anak: Memastikan terpenuhinya hak sipil anak atas identitas resmi negara sejak dini. Akurasi & Cakupan Data Kependudukan: Meningkatkan cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) di wilayah secara signifikan serta menjamin pemutakhiran data kependudukan secara *real-time*.

3.8.92 E-Skakmat

Tabel 3.98 Profil Inovasi E-Skakmat

1	**Nama Inovasi**	E-Skakmat (Elektronik Surat KeterAngan keMATian)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kel . kandangan Utara
3	**PIC/Narahubung**	Oma Era081251112798
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kelurahan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	E-Skakmat (Elektronik Surat KeterAngan keMATian) merupakan inovasi berbasis aplikasi/layanan digital yang dikembangkan untuk mempermudah, mempercepat, dan mengintegrasikan proses penerbitan Surat Keterangan Kematian serta administrasi kependudukan terkait kematian secara otomatis. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Pelaporan dan pengurusan Surat Keterangan Kematian secara konvensional sering dianggap rumit oleh keluarga duka karena harus bolak-balik mengurus berkas fisik dari tingkat RT/Kelurahan/Desa, Puskesmas/Rumah Sakit, hingga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Keterlambatan pelaporan kematian ini juga berampak pada data kependudukan yang tidak akurat, potensi salah sasaran bantuan sosial, hingga kerawanan dalam daftar pemilih Pemilu. Tujuan Utama: Memberikan kemudahan bagi keluarga yang sedang berduka dengan memotong alur birokrasi, mengotomatisasi penerbitan dokumen kematian, serta memastikan data kependudukan (update status kematian) terbarui secara cepat dan akurat. Fitur & Mekanisme Kerja Utama Pelaporan & Input Digital: Pihak keluarga, fasilitas kesehatan (Puskesmas/Rumah Sakit), atau petugas desa/kelurahan dapat memasukkan data pelaporan kematian secara langsung melalui aplikasi E-Skakmat tanpa perlu membawa tumpukan berkas fisik. Penerbitan Surat Keterangan & Dokumen Terintegrasi: Setelah laporan diverifikasi secara sistematis, aplikasi langsung menerbitkan Surat Keterangan Kematian elektronik secara instan.

		Integrasi Terpadu (3-in-1 / Paket Layanan): Sistem terhubung langsung dengan basis data Disdukcapil, sehingga secara otomatis dapat langsung memproses: Surat Keterangan Kematian Elektronik Akta Kematian Kartu Keluarga (KK) baru bagi keluarga yang ditinggalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) status baru bagi pasangan yang ditinggalkan (menjadi Janda/Duda)
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Empati & Kemudahan Bagi Warga Duka: Warga tidak dibebani lagi dengan prosedur birokrasi yang rumit dan berulang saat sedang dalam suasana duka. Akurasi Data Kependudukan (Clean Data): Mencegah terjadinya data pemilih ganda, penyalahgunaan identitas orang yang telah meninggal, dan memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Efisiensi Waktu & Biaya: Memangkas waktu penerbitan dokumen dari hitungan hari/minggu menjadi hitungan jam atau menit.

3.8.93 SOPIA

Tabel 3.99 Profil Inovasi SOPIA

1	**Nama Inovasi**	SOPIA (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IN ANDROID)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BHHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi 08971117820
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SOPIA (Standar Operasional Prosedur in Android) merupakan inovasi berbasis aplikasi seluler (smartphone) yang memanfaatkan teknologi Android untuk menyajikan, mengelola, serta mendokumentasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) instansi secara digital dan terintegrasi. Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Dokumen SOP konvensional berbasis cetak (paper-based) sering kali menumpuk di lemari arsip, sulit diakses secara cepat oleh pegawai di lapangan, serta berisiko ketinggalan zaman (outdated) ketika ada pembaruan aturan. Hal ini berdampak pada potensi ketidaksesuaian prosedur kerja (human error) dalam pelayanan publik maupun tata kelola internal.

		Tujuan Utama: Memungkinkan seluruh jajaran pegawai/petugas mengakses seluruh dokumen alur kerja (SOP) resmi langsung dari genggaman (smartphone Android) secara *real-time*, transparan, serta ramah lingkungan (paperless). Fitur & Mekanisme Kerja Utama Pustaka SOP Digital (Digital SOP Library): Aplikasi menyediakan katalog lengkap seluruh SOP pelayanan/pekerjaan yang dapat dicari dengan cepat berdasarkan kata kunci, seksi/bidang, atau jenis layanan. Visualisasi Alur Kerja Intuitif: Penyajian SOP tidak hanya dalam bentuk teks/PDF, tetapi juga dilengkapi bagan alir (flowchart) interaktif, daftar periksa (checklist) persyaratan, hingga estimasi waktu pengerjaan (SLA). Pembaruan & Pemantauan *Real-Time*: Apabila ada perubahan aturan atau revisi prosedur, administrator dapat langsung memperbarui dokumen di sistem terpusat, sehingga seluruh pegawai secara otomatis mendapatkan versi SOP paling mutakhir (up-to-date). Modul Pengawasan / Evaluasi Kepatuhan: Memungkinkan pimpinan untuk memantau sejauh mana tingkat pemahaman dan penerapan SOP oleh staf di lapangan secara sistematis.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Kemudahan Akses Kapan Saja & di Mana Saja: Pegawai maupun petugas lapangan tidak perlu kembali ke meja kerja atau membuka bundel kertas fisik untuk memeriksa alur prosedur resmi. Meningkatkan Standarisasi Pelayanan: Meminimalisasi variasi atau penyimpangan prosedur pelayanan publik karena panduan kerja terstandar dengan jelas di aplikasi. Efisiensi Penghematan Anggaran: Menghemat penggunaan kertas (paperless) dan biaya cetak/penggandaan dokumen SOP secara signifikan.

3.8.94 ROKET

Tabel 3.100 Profil Inovasi ROKET

1	**Nama Inovasi**	ROKET (Registrasi *Online* Ke Rumah Sakit)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BHHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi 08971117820
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

6	**Uraian Singkat**	ROKET (Registrasi *Online* Ke Rumah Sakit) merupakan inovasi berbasis teknologi informasi yang dikembangkan oleh fasilitas kesehatan (seperti Rumah Sakit Umum Daerah/RSUD) untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran antrean berobat secara mandiri dari mana saja (*online*). Gambaran Umum Inovasi Latar Belakang: Sistem pendaftaran pasien secara manual sering kali menimbulkan penumpukan dan antrean panjang di loket pendaftaran rumah sakit sejak pagi hari. Hal ini menyita banyak waktu pasien/keluarga, berpotensi memicu kerumunan, serta memperlambat alur pelayanan medis secara keseluruhan. Tujuan Utama: Memangkas waktu tunggu pasien di rumah sakit, memberikan kepastian jam pelayanan/pemeriksaan dokter, serta menghadirkan alur pendaftaran berobat yang cepat, praktis, dan teratur. Fitur & Mekanisme Kerja Utama Pendaftaran Mandiri Berbasis Aplikasi/*Website*: Pasien cukup mengakses platform ROKET (baik via aplikasi Android/iOS, situs web, atau sistem pesan berbasis WhatsApp/QR Code) tanpa harus datang langsung ke rumah sakit sejak pagi. Pemilihan Dokter & Jadwal Berobat: Pasien dapat memilih poli spesialis yang dituju, memilih dokter yang bertugas, serta menentukan tanggal dan perkiraan jam kunjungan sesuai kuota yang tersedia. Integrasi Data Pasien & JKN/BPJS: Terhubung langsung dengan basis data rekam medis rumah sakit (SIMRS) serta sistem rujukan BPJS Kesehatan (V-Claim/*Mobile* JKN), sehingga proses verifikasi kepesertaan dapat berjalan otomatis. Penerbitan Nomor Antrean Digital: Setelah pendaftaran berhasil, sistem menerbitkan tiket/nomor antrean digital yang dapat ditunjukkan langsung saat kedatangan di rumah sakit tanpa perlu mengantre ulang di loket pendaftaran umum.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Dampak & Manfaat Inovasi Efisiensi Waktu Pasien: Memangkas durasi waktu tunggu hingga berjam-jam; pasien bisa datang mendekati estimasi jam pelayanan dokter (just-in-time). Mengurangi Kerumunan: Menciptakan suasana ruang tunggu rumah sakit yang lebih tertib, tenang, dan higienis karena tidak ada tumpukan antrean di loket.

		Kepastian Pelayanan: Memberikan kejelasan jadwal praktik dokter dan ketersediaan kuota pemeriksaan harian secara transparan kepada masyarakat.

3.8.95 SIBUNGA

Tabel 3.101 Profil Inovasi SIBUNGA

1	**Nama Inovasi**	SIBUNGA (Sistem Informasi Pembayaran Tunjangan dan Gaji)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BBHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	SIBUNGA hadir sebagai solusi digitalisasi tata kelola keuangan internal (khususnya penggajian dan pengusulan/penyaluran tunjangan) pada suatu instansi atau lembaga. Dengan mengalihkan proses manual ke sistem terintegrasi, SIBUNGA meminimalisir risiko kesalahan input data (human error), mempercepat proses rekapitulasi, serta memastikan perhitungan hak keuangan pegawai dilakukan secara presisi dan tepat waktu.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Penerapan SIBUNGA memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan instansi. Bagi pengelola keuangan, sistem ini memangkas birokrasi dan waktu pemrosesan dokumen gaji serta tunjangan, sehingga alur pencairan menjadi lebih cepat, teratur, dan terdokumentasi dengan baik. Bagi para pegawai, SIBUNGA memberikan kepastian serta transparansi rincian penghasilan yang diterima secara *real-time* dan akurat. Secara keseluruhan, inovasi ini menciptakan tata kelola administrasi keuangan yang modern, akuntabel, bebas manipulasi data, serta meningkatkan kepuasan dan kinerja pegawai.

3.8.96 ANNOR

Tabel 3.102 Profil Inovasi ANNOR

1	**Nama Inovasi**	ANNOR (Aplikasi Pelayanan Donor Darah)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BBHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

6	**Uraian Singkat**	ANNOR hadir sebagai solusi digital untuk merespons kebutuhan stok darah secara cepat dan akurat. Aplikasi ini menghubungkan masyarakat dengan fasilitas penyedia darah melalui berbagai fitur praktis, seperti pendaftaran donor secara *online*, jadwal kegiatan donor darah terdekat, pemantauan stok darah *real-time*, hingga riwayat donor pribadi. Dengan mengalihkan sistem pencatatan konvensional ke platform digital, ANNOR memangkas antrean dan meningkatkan efisiensi operasional pelayanan darah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Hadirnya ANNOR membawa dampak besar bagi ekosistem pelayanan kesehatan dan aksi kemanusiaan. Bagi masyarakat umum dan pendonor, aplikasi ini memberikan kemudahan luar biasa dalam mengakses informasi stok darah, mendaftar tanpa perlu mengantre lama, serta mendapatkan pengingat rutin jadwal donor berikutnya. Bagi petugas dan pengelola donor darah, ANNOR mentransformasi tata kelola pendataan menjadi lebih rapi, cepat, dan terintegrasi. Hal ini mempercepat proses pencarian pendonor pendamping di saat darurat, meminimalisir risiko kelangkaan stok darah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk saling bantu secara lebih masif dan terstruktur.

3.8.97 SILAKSA

Tabel 3.103 Profil Inovasi SILAKSA

1	**Nama Inovasi**	SILAKSA (Sistem Integrasi Link Akses Seluruh Aplikasi Inovasi)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	RSUD BBHB
3	**PIC/Narahubung**	Fahmi
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Rumah Sakit Daerah
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi portal pusat (*single sign-on* / sso-*gateway*) dan portal integrasi digital yang menyatukan seluruh tautan, akses, serta pemantauan aplikasi inovasi daerah dalam satu wadah terpadu. SILAKSA dirancang untuk menghilangkan fragmentasi aplikasi, mempermudah aparatur maupun masyarakat dalam menemukan dan mengakses berbagai inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, serta mengoptimalkan efisiensi ekosistem digital di lingkungan pemerintah daerah.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Satu Pintuk Akses Inovasi (One-Stop Access): Memudahkan masyarakat dan ASN dalam mengakses seluruh aplikasi inovasi daerah tanpa perlu menghafal banyak alamat domain/URL yang berbeda. Interoperabilitas & Efisiensi Layanan: Mengurangi duplikasi sistem, merapikan arsitektur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), serta meningkatkan efisiensi tata kelola teknologi informasi.

		Kemudahan Monitoring & Evaluasi: Memudahkan pimpinan dan Bappelitbangda/BRIDA dalam memantau tingkat keaktifan, pemanfaatan, serta kinerja seluruh inovasi digital daerah secara terpusat (*dashboard*). Meningkatkan Transparansi & Diseminasi Inovasi: Menjadi sarana etalase dan promosi inovasi daerah agar pemanfaatan hasil-hasil inovasi dapat dirasakan secara optimal dan meluas oleh publik.

3.8.98 SAPA QR

Tabel 3.104 Profil Inovasi SAPA QR

1	**Nama Inovasi**	SAPA QR (Survei Kepuasan Masyarakat Melalui QR Code)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Belum tercantum dalam rekap
3	**PIC/Narahubung**	-
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Belum Teridentifikasi
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Inovasi pelayanan publik digital berbasis kode QR (Quick Response Code) yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dan pengguna layanan dalam memberikan penilaian, ulasan, serta masukan terhadap kualitas pelayanan publik di unit kerja/instansi secara praktis, cepat, dan *real-time* melalui perangkat smartphone.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Memudahkan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat dapat memberikan umpan balik (feedback) atau penilaian layanan dengan mudah hanya dengan memindai kode QR tanpa perlu mengisi formulir kertas secara manual. Evaluasi Layanan Secara *Real-Time*: Memudahkan pimpinan dan pengelola layanan publik dalam memantau Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara transparan, cepat, dan akurat. Peningkatan Kualitas Birokrasi: Mempercepat tindak lanjut atas keluhan atau masukan masyarakat guna perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan publik secara berkelanjutan. Efisiensi & Paperless: Menghilangkan penggunaan kertas survei manual sehingga menghemat anggaran serta mendukung tata kelola birokrasi ramah lingkungan.

3.8.99 BUKU TAMU DIGITAL

Tabel 3.105 Profil Inovasi BUKU TAMU DIGITAL

1	**Nama Inovasi**	BUKU TAMU DIGITAL (DIGITAL GUESTBOOK)
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Loksado
3	**PIC/Narahubung**	Karmila
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan

5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Buku Tamu Digital merupakan inovasi transformasi dari pencatatan kedatangan atau kunjungan konvensional (berbasis kertas) menjadi sistem pencatatan berbasis data elektronik yang lebih efisien. Buku Tamu Digital Kecamatan Loksado menggunakan pemindaian kode QR Code untuk mencatat identitas pengunjung. Data diinput dalam basis data secara real time sehingga mengurangi penggunaan kertas dan risiko data hilang atau rusak.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum Kecamatan Loksado, Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas, Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Manajemen Data

3.8.100 LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu Pintu untuk Administrasi Keluarga Terpadu

Tabel 3.106 Profil Inovasi LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu

1	**Nama Inovasi**	LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu Pintu untuk Administrasi Keluarga Terpadu
2	**Perangkat Daerah/Unit Kerja**	Kecamatan Loksado
3	**PIC/Narahubung**	Karmila
4	**Sub-Klaster Kelembagaan**	Kecamatan
5	**Kategori Asta Cita**	Asta Cita 7 - Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
6	**Uraian Singkat**	Membantu masyarakat memiliki legalitas hukum yang kuat atas identitas mereka yang penting untuk akses pendidikan, kesehatan, dan perbankan serta menjamin penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat mendapatkan identitas resmi secara kolektif tanpa biaya perjalanan yang mahal.
7	**Manfaat/Dampak Inovasi**	inovasi ini memastikan bahwa "aliran" kinerja dari tingkat kabupaten hingga ke seksi di kecamatan (CKS) berjalan efektif karena hambatan geografis dan administratif warga berhasil dipangkas melalui layanan terpadu ini serta berkontribusi positif terhadap nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten HSS, yang merupakan salah satu poin penilaian penting dalam laporan kinerja pemerintah daerah (LPPD)

BAB 4
ANALISIS MASALAH

OPTIMALISASI INOVASI DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - PERSPEKTIF TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB IV
ANALISIS PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

4.1 Gambaran Umum Permasalahan

Analisis lintas-inovasi terhadap keenam inovasi fokus kajian menunjukkan bahwa permasalahan administrasi publik di Kabupaten HSS bersifat sistemik pada empat lapisan: permohonan dan verifikasi layanan (hulu), penerbitan dan publikasi capaian (hilirisasi), kapasitas SDM aparatur dan kelembagaan, serta saling terhubung antar-sistem infrastruktur sistem informasi.

4.2 Permasalahan Hulu: Permohonan dan Verifikasi Layanan

Permasalahan pada lapisan hulu terutama bersumber dari variasi tingkat digitalisasi antar-OPD dan kecamatan. Sementara E-SAKIP telah menerapkan verifikasi otomatis berbasis *Single Sign-On*, pengenalan wajah, dan geolokasi, sebagian besar inovasi pelayanan terpadu tingkat kecamatan masih mengandalkan verifikasi manual oleh petugas, sehingga waktu pemrosesan bervariasi signifikan antarwilayah.

4.3 Permasalahan Hilirisasi: Penerbitan, Publikasi, dan Keberlanjutan

Pada lapisan hilirisasi, permasalahan utama adalah rendahnya publikasi capaian kinerja secara terbuka. SAPA HSS dan SIMKuDa, misalnya, belum mempublikasikan data gabungan capaian (jumlah aduan yang diselesaikan, realisasi APBDes per desa) yang dapat diakses dan dipantau publik maupun DPRD, sehingga akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat) masih lebih lemah dibandingkan akuntabilitas vertikal (kepada atasan/instansi pembina).

4.4 Permasalahan SDM dan Kelembagaan Aparatur

Replikasi mandiri puluhan aplikasi pelayanan terpadu kecamatan tanpa standar teknis seragam menunjukkan keterbatasan koordinasi pengembangan sistem informasi tingkat kabupaten. Setiap kecamatan cenderung mengembangkan aplikasinya masing-masing, yang selain berisiko duplikasi anggaran, juga membutuhkan kapasitas SDM IT yang tersebar dan sulit dipertahankan secara konsisten dari sisi pemeliharaan jangka panjang.

4.5 Permasalahan Infrastruktur dan Interoperabilitas Sistem

Meskipun beberapa sistem unggulan telah terhubung dengan platform nasional masing-masing (E-Kinerja untuk E-SAKIP, SIAK untuk SILANTING, Siskeudes untuk SIMKuDa, SIKN/JIKN untuk Klinik Arsip), belum ditemukan bukti pertukaran data otomatis antar-sistem tersebut pada level kabupaten. Akibatnya, Bapperida masih perlu melakukan kompilasi manual lintas-sistem untuk kebutuhan evaluasi RKPD dan RPJMD.

4.6 Analisis Mendalam Enam Inovasi Prioritas

Subbab berikut menyajikan analisis mendalam terhadap masing-masing dari enam inovasi fokus kajian, mencakup deskripsi program, analisis kekuatan dan tantangan spesifik.

4.6.1 MPP One Stop Smart Service (MOSSS)

Tabel 4.1 MPP One Stop Smart Service (MOSSS)

Unit Pelaksana: *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) — Mal Pelayanan Publik Kabupaten HSS, Lantai III Pasar Losbatu Kandangan* *Website: https://mpp.hulusungaiselatankab.go.id/*

Gambar 4.1 Ilustrasi MPP One Stop Smart Service (MOSSS)

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan diresmikan melalui soft launching pada 17 Januari 2022 oleh Bupati H. Achmad Fikry, dan *grand launching* pada 31 Mei 2022 yang dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan serta perwakilan Kementerian PANRB, menjadikan HSS kabupaten ketiga di Kalimantan Selatan yang memiliki MPP. MPP HSS menyediakan 117 layanan dari

16 instansi pemerintah dalam satu lokasi, sejalan dengan konsep "pemerintahan yang melayani." MOSSS merupakan inovasi lanjutan yang menghadirkan solusi digital terpadu di atas fondasi MPP fisik tersebut, terintegrasi pula dengan MPP Digital Nasional yang diinisiasi Kementerian PANRB.

Tabel 4.2 MPP One Stop Smart Service (MOSSS) (Kekuatan)

Kekuatan	Tantangan/Kelemahan
• Telah beroperasi sejak 2022 dengan skala layanan besar (117 layanan, 16 instansi) • Mendapat pengakuan dan dukungan langsung dari Kementerian PANRB dan Pemerintah Provinsi • Terintegrasi dengan MPP Digital Nasional sebagai kerangka pengembangan lanjutan	• Interoperabilitas data antar-16 instansi dalam satu sistem digital tunggal belum sepenuhnya terwujud • Ketergantungan pada kehadiran fisik pemohon di lokasi MPP masih signifikan meski ada komponen digital • Data kuantitatif terbaru mengenai volume transaksi dan kepuasan pengguna MOSSS secara spesifik belum banyak dipublikasikan

4.6.1.1 Identitas Inovasi

Tabel 4.3 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	MPP One Stop Smart Service (MOSSS)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap; identitas visual mengacu pada dokumentasi MPP pada laporan ini.
Tahun Mulai	Soft launching 17 Januari 2022 oleh Bupati H. Achmad Fikry; grand launching 31 Mei 2022 dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan dan Kementerian PANRB.
SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) — Mal Pelayanan Publik Kabupaten HSS, Lantai III Pasar Losbatu Kandangan
Kategori Asta Cita	Asta Cita 7 - reformasi birokrasi dan pelayanan publik terpadu

4.6.1.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Menghadirkan solusi digital terpadu di atas fondasi Mal Pelayanan Publik fisik, mengintegrasikan 117 layanan dari 16 instansi dalam satu lokasi dan satu sistem, sejalan dengan konsep "pemerintahan yang melayani" serta terintegrasi dengan MPP Digital Nasional.

Sasaran Penerima Manfaat: Seluruh masyarakat Kabupaten HSS yang membutuhkan layanan perizinan dan non-perizinan dari 16 instansi pemerintah.

4.6.1.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

• Fasilitas fisik MPP di Lantai III Pasar Losbatu Kandangan.
• 117 jenis layanan dari 16 instansi pemerintah.
• Integrasi dengan MPP Digital Nasional Kementerian PANRB.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel 4.4 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
DPMPTSP	Mengelola operasional MPP dan mengoordinasikan 16 instansi penyedia layanan.
16 instansi pemerintah	Menyediakan layanan perizinan/non-perizinan masing-masing dalam satu lokasi.
Masyarakat pemohon	Mengakses layanan secara fisik di MPP dan/atau melalui komponen digital MOSSS.
Kementerian PANRB	Membina integrasi dengan MPP Digital Nasional.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Pemohon datang ke MPP atau mengakses layanan melalui komponen digital MOSSS.
- Langkah 2: Petugas dari instansi terkait melayani permohonan dalam satu lokasi terpadu (117 layanan, 16 instansi).
- Langkah 3: Layanan yang sudah terdigitalisasi diproses melalui sistem MOSSS yang terhubung dengan MPP Digital Nasional.
- Langkah 4: (Tahap yang belum sepenuhnya berjalan) Seluruh 16 instansi terhubung dalam satu sistem digital tunggal yang saling beroperasi (interoperabel).
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Data volume transaksi dan kepuasan pengguna MOSSS secara spesifik dipublikasikan secara berkala.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Fondasi fisik MPP yang sudah beroperasi sejak 2022 dengan skala besar (117 layanan, 16 instansi) menjadi kekuatan utama; komponen digital MOSSS terintegrasi dengan MPP Digital Nasional, namun interoperabilitas data antar-16 instansi dalam satu sistem digital tunggal belum sepenuhnya terwujud, dan ketergantungan pada kehadiran fisik pemohon masih signifikan.

e. Keluaran (Output)

117 layanan dari 16 instansi tersedia dalam satu lokasi terpadu, mendapat pengakuan dan dukungan langsung dari Kementerian PANRB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Masyarakat memperoleh layanan perizinan/non-perizinan tanpa berpindah-pindah kantor (jangka pendek); layanan sepenuhnya dapat diakses digital tanpa kehadiran fisik, dengan data transaksi dan kepuasan pengguna yang terpublikasi (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Interoperabilitas data antar-16 instansi dalam satu sistem digital tunggal belum sepenuhnya terwujud. Ketergantungan pada kehadiran fisik pemohon di lokasi MPP masih signifikan meski ada komponen digital. Data kuantitatif terbaru

mengenai volume transaksi dan kepuasan pengguna MOSSS secara spesifik belum banyak dipublikasikan.

4.6.1.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel 4.5 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Tim kajian memakai status agregat pada rekap SKPD; rincian dokumen per indikator berada pada instansi pengampu dan belum diverifikasi lapangan secara independen.
Ketersediaan dan Peran SDM	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Petugas 16 instansi penyedia layanan teridentifikasi aktif sejak 2022; rincian peran per personil belum dirinci dalam laporan ini.
Dukungan Anggaran	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Anggaran operasional dan pengembangan MOSSS belum dirinci dalam dokumen kajian.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Fasilitas fisik MPP dan komponen digital MOSSS menjadi alat kerja utama; interoperabilitas sistem digital tunggal masih dalam pengembangan.
Bimtek Inovasi	Ada Indikasi Awal	Dukungan langsung Kementerian PANRB menunjukkan adanya bimtek/pembinaan, namun frekuensi pastinya belum dirinci.
Integrasi dalam RKPD	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Program tercatat sebagai kegiatan DPMPTSP; halaman spesifik RKPD belum dikutip dalam laporan ini.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Sudah Lengkap" pada rekap SKPD (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel 4.6 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	**Target**	**Realisasi**	**Keterangan**
Jumlah layanan tersedia	Meningkat dari *baseline*	117 layanan dari 16 instansi	Skala layanan besar dan sudah berjalan sejak 2022.
Volume transaksi/permohonan	Meningkat dari *baseline*	Belum dipublikasikan secara spesifik	Kesenjangan data yang perlu ditutup.
Tingkat kepuasan pengguna	≥ 80% puas	Belum dipublikasikan secara spesifik	Perlu survei kepuasan berkala yang dipublikasikan.
Interoperabilitas data 16 instansi	Terintegrasi penuh dalam satu sistem	Belum sepenuhnya terwujud	Tantangan teknis utama yang diidentifikasi kajian.

4.6.1.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Sebagai inovasi dengan skala layanan terbesar dan pengakuan nasional tertinggi di antara enam inovasi prioritas, MOSSS justru menghadapi tantangan mendasar pada interoperabilitas teknis: 16 instansi belum sepenuhnya terhubung dalam satu sistem digital tunggal, sehingga potensi "pemerintahan yang melayani" belum sepenuhnya terwujud secara digital.

4.6.1.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan MPP One Stop Smart Service (MOSSS) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel 4.7 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 7)

1. Masalah yang Diselesaikan	Masyarakat harus mengunjungi banyak kantor instansi berbeda untuk mengurus perizinan dan layanan non-perizinan, menyulitkan dan memakan waktu.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Seluruh masyarakat Kabupaten HSS pemohon layanan perizinan/non-perizinan.
3. Titik Masuk	Kedatangan ke MPP di Lantai III Pasar Losbatu Kandangan atau akses komponen digital MOSSS.
4. Langkah-Langkah Kunci	Permohonan diajukan di satu lokasi → diproses oleh instansi terkait → (ke depan) diproses penuh melalui sistem digital terintegrasi.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Masyarakat merasakan langsung kemudahan tidak perlu berpindah-pindah kantor karena 117 layanan tersedia dalam satu lokasi; pemohon yang masih harus datang fisik meski ada komponen digital mungkin merasa manfaat digitalisasi belum sepenuhnya terasa dibanding janji "satu sistem terpadu".
6. Efek Terukur	117 layanan dari 16 instansi tersedia dalam satu lokasi terpadu (data volume transaksi dan kepuasan pengguna spesifik belum dipublikasikan).

7. Manfaat yang Lebih Luas	Pengakuan dan dukungan langsung dari Kementerian PANRB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menjadikan HSS kabupaten ketiga di Kalimantan Selatan yang memiliki MPP.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Layanan pemerintah Kabupaten HSS yang sepenuhnya terintegrasi secara digital, tanpa memerlukan kehadiran fisik untuk sebagian besar transaksi, terhubung penuh dengan MPP Digital Nasional.
Asumsi Kunci	16 instansi bersedia dan mampu mengintegrasikan sistem masing-masing; masyarakat mengadopsi komponen digital MOSSS; dukungan Kementerian PANRB berlanjut untuk pengembangan interoperabilitas.
Pemangku Kepentingan	DPMPTSP, 16 instansi pemerintah penyedia layanan, Kementerian PANRB, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, masyarakat pemohon.

4.6.1.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): mempublikasikan data volume transaksi dan tingkat kepuasan pengguna MOSSS secara berkala sebagai bukti kinerja layanan.
- Jangka menengah (6–18 bulan): mempercepat interoperabilitas data antar-16 instansi dalam satu sistem digital tunggal agar ketergantungan pada kehadiran fisik pemohon dapat dikurangi signifikan.
- Keterhubungan model: menjadi rujukan integrasi lintas-OPD bagi model tata kelola administrasi publik terpadu, khususnya bagi SILANTING dan Klinik Arsip yang juga berbasis layanan digital lintas instansi.

4.6.2 SILANTING (Sistem Layanan Terintegrasi secara Daring)

Tabel 4.8 SILANTING (Unit Pelaksana:)

Unit Pelaksana: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Hulu Sungai Selatan* *Webiste: https://silanting.hulusungaiselatankab.go.id/login*

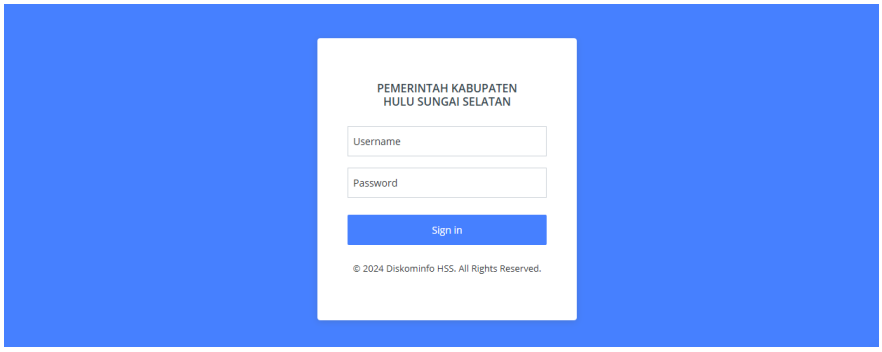

Gambar 4.2 Ilustrasi SILANTING

SILANTING merupakan sistem layanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan secara daring oleh Disdukcapil Kabupaten HSS. Bimbingan teknis (Bimtek) SILANTING dilaksanakan selama dua hari pada 9–10 September 2025 di aula Disdukcapil HSS, dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Dinas Dukcapil H. Tajiddin Noor, S.Sos., M.IP, dan dihadiri oleh Sekretaris serta seluruh Kepala Bidang, menandakan bahwa inovasi ini masih berada pada tahap awal penguatan kapasitas aparatur pelaksana.

Tabel 4.9 SILANTING (Kekuatan)

Kekuatan	Tantangan/Kelemahan
• Mendapat komitmen kepemimpinan dinas yang jelas (dibuka langsung oleh Plt. Kepala Dinas) • Sejalan dengan tren nasional digitalisasi layanan Disdukcapil (SIAK, Identitas Kependudukan Digital) • Berpotensi mengurangi kebutuhan tatap muka untuk layanan administrasi kependudukan dasar	• Bimtek pengoperasian baru dilaksanakan pada September 2025, menunjukkan tahap implementasi masih dini • Belum ada data publik mengenai jumlah pengguna, jenis layanan, dan tingkat penyelesaian permohonan • Kesiapan infrastruktur internet di desa-desa terpencil untuk mengakses layanan daring belum terkonfirmasi merata

4.6.2.1 Identitas Inovasi

Tabel 4.10 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	SILANTING (Sistem Layanan Terintegrasi secara Daring)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Bimtek pengoperasian dilaksanakan 9–10 September 2025, menandakan tahap awal penguatan kapasitas aparatur pelaksana.
SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	Asta Cita 7 - reformasi birokrasi dan pelayanan publik terpadu

4.6.2.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Menyelenggarakan layanan administrasi kependudukan secara daring, mengurangi kebutuhan tatap muka untuk layanan dasar sejalan dengan tren nasional digitalisasi Disdukcapil (SIAK, Identitas Kependudukan Digital).

Sasaran Penerima Manfaat: Masyarakat Kabupaten HSS pemohon layanan administrasi kependudukan.

4.6.2.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Sistem layanan daring SILANTING (https://silanting.hulusungaiselatankab.go.id/login).

- Bimbingan teknis dua hari bagi aparatur pelaksana (9–10 September 2025).

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel 4.11 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Disdukcapil	Mengoperasikan sistem dan melatih aparatur pelaksana.
Plt. Kepala Dinas Dukcapil	Memberikan komitmen kepemimpinan, membuka bimtek secara langsung.
Masyarakat pemohon	Mengajukan layanan administrasi kependudukan secara daring.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Aparatur pelaksana mengikuti bimtek pengoperasian sistem (dilaksanakan September 2025).
- Langkah 2: Masyarakat mengajukan permohonan layanan administrasi kependudukan melalui sistem daring.
- Langkah 3: Petugas memproses permohonan melalui SILANTING.
- Langkah 4: (Tahap yang belum berjalan) Publikasi data jumlah pengguna, jenis layanan, dan tingkat penyelesaian permohonan.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Pemetaan kesiapan infrastruktur internet di desa-desa terpencil untuk mengakses layanan daring.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Sistem daring menjadi alat kerja utama, sejalan dengan tren nasional digitalisasi Disdukcapil (SIAK, Identitas Kependudukan Digital); bimtek pengoperasian baru dilaksanakan September 2025 menunjukkan tahap implementasi masih dini, dan kesiapan infrastruktur internet di desa terpencil belum terkonfirmasi merata.

e. Keluaran (Output)

Sistem layanan administrasi kependudukan daring yang telah melalui bimtek pengoperasian bagi aparatur pelaksana.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Aparatur pelaksana memiliki kapasitas dasar mengoperasikan sistem (jangka pendek); masyarakat di seluruh wilayah, termasuk desa terpencil, dapat mengakses layanan kependudukan dasar tanpa tatap muka (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Bimtek pengoperasian baru dilaksanakan pada September 2025, menunjukkan tahap implementasi masih dini. Belum ada data publik mengenai jumlah pengguna, jenis layanan, dan tingkat penyelesaian permohonan. Kesiapan infrastruktur internet di desa-desa terpencil untuk mengakses layanan daring belum terkonfirmasi merata.

4.6.2.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel 4.12 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Tim kajian memakai status agregat pada rekap SKPD; rincian dokumen per indikator berada pada instansi pengampu dan belum diverifikasi lapangan secara independen.
Ketersediaan dan Peran SDM	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Aparatur pelaksana mengikuti bimtek September 2025 dengan kehadiran Sekretaris dan seluruh Kepala Bidang; peran spesifik per personil belum dirinci.
Dukungan Anggaran	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Anggaran pengembangan dan operasional sistem belum dirinci dalam dokumen kajian.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Sistem daring SILANTING menjadi alat kerja utama, baru pada tahap awal pengoperasian.
Bimtek Inovasi	Ada Indikasi Awal	Bimtek dua hari (9–10 September 2025) sudah terlaksana dengan komitmen kepemimpinan dinas yang jelas.
Integrasi dalam RKPD	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Program tercatat sebagai kegiatan Disdukcapil; halaman spesifik RKPD belum dikutip dalam laporan ini.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Sudah Lengkap" pada rekap SKPD (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), sejajar dengan PANTING MARENA, MENTANG-MENTANG V2, dan ANANDA BAJU DANSA dari dinas yang sama.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel 4.13 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah aparatur terlatih bimtek	Seluruh operator Disdukcapil	Bimtek dilaksanakan 9–10 September 2025	Tahap awal penguatan kapasitas sudah dimulai.

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah pengguna layanan daring	Meningkat tiap bulan	Belum dipublikasikan	Kesenjangan data utama yang perlu ditutup.
Tingkat penyelesaian permohonan	≥ 90% selesai tepat waktu	Belum dipublikasikan	Perlu SOP dan pelaporan waktu layanan.
Cakupan akses internet desa terpencil	Merata di seluruh desa	Belum terkonfirmasi merata	Prasyarat penting agar layanan daring benar-benar inklusif.

4.6.2.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Sebagai inovasi yang baru memasuki tahap penguatan kapasitas aparatur (bimtek September 2025), SILANTING memerlukan waktu untuk membuktikan dampak nyata; risiko utamanya adalah kesenjangan akses internet di desa terpencil yang dapat membuat layanan daring justru tidak inklusif bagi kelompok yang paling membutuhkan kemudahan.

4.6.2.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan SILANTING (Sistem Layanan Terintegrasi secara Daring) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel 4.14 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 14)

1. Masalah yang Diselesaikan	Masyarakat harus datang tatap muka ke kantor Disdukcapil untuk mengurus layanan administrasi kependudukan dasar, menyulitkan warga di wilayah jauh.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Masyarakat Kabupaten HSS pemohon layanan administrasi kependudukan, termasuk warga desa terpencil.
3. Titik Masuk	Bimbingan teknis pengoperasian sistem bagi aparatur pelaksana Disdukcapil.
4. Langkah-Langkah Kunci	Bimtek aparatur → pengajuan permohonan daring oleh masyarakat → pemrosesan oleh petugas melalui sistem.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Aparatur yang baru mengikuti bimtek merasa lebih siap mengoperasikan sistem berkat pembukaan langsung oleh Plt. Kepala Dinas yang menunjukkan dukungan pimpinan; masyarakat yang sudah mencoba layanan daring berpotensi merasa lebih praktis dibanding harus antre di kantor, namun warga desa terpencil dengan akses internet terbatas mungkin belum merasakan manfaat ini sama sekali.
6. Efek Terukur	Bimtek dua hari terlaksana bagi aparatur pelaksana (jumlah pengguna, jenis layanan, dan tingkat penyelesaian permohonan belum tersedia dalam data publik).

7. Manfaat yang Lebih Luas	Berpotensi mengurangi kebutuhan tatap muka untuk layanan administrasi kependudukan dasar, sejalan dengan tren nasional digitalisasi Disdukcapil.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Seluruh masyarakat Kabupaten HSS, termasuk di desa terpencil, dapat mengakses layanan kependudukan dasar secara daring tanpa hambatan infrastruktur.
Asumsi Kunci	Aparatur yang telah dilatih mampu menjalankan sistem secara konsisten; infrastruktur internet di desa terpencil ditingkatkan secara bertahap; masyarakat mengadopsi layanan daring.
Pemangku Kepentingan	Disdukcapil, aparatur pelaksana, masyarakat pemohon (termasuk warga desa terpencil), Kementerian Dalam Negeri (kerangka SIAK/Identitas Kependudukan Digital).

4.6.2.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): mempublikasikan data jumlah pengguna, jenis layanan, dan tingkat penyelesaian permohonan secara berkala.
- Jangka menengah (6–18 bulan): memetakan dan meningkatkan kesiapan infrastruktur internet di desa-desa terpencil agar layanan daring benar-benar inklusif.
- Keterhubungan model: melengkapi MOSSS sebagai kanal digital khusus layanan kependudukan dalam model tata kelola administrasi publik terpadu.

4.6.3 E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

Tabel 4.15 E-SAKIP (Unit Pelaksana:)

Unit Pelaksana: *Bapperida/Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan* *Website: https://sakp.hulusungaiselatankab.go.id/*

Gambar 4.3 Ilustrasi E-SAKIP

E-SAKIP HSS merupakan sistem digital untuk penetapan dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Sistem yang kini memasuki versi kedua (periode 2025–2029) ini terintegrasi langsung dengan Sistem Perencanaan, Sistem Keuangan, dan Sistem Elektronik Penilaian Kinerja (E-Kinerja), menggunakan otentikasi *Single Sign-On* (SSO) terpusat. E-Kinerja pendukungnya dilengkapi teknologi pengenalan wajah *(face recognition)* dan geolokasi berbasis *Machine Learning Kit Google*, serta bersifat *offline-first* untuk mendukung disiplin ASN di lokasi dengan akses internet terbatas.

Tabel 4.16 E-SAKIP (Kekuatan)

Kekuatan	Tantangan/Kelemahan
• Integrasi penuh antar-sistem perencanaan, keuangan, dan kinerja — paling matang secara teknis di antara enam inovasi fokus • Fitur verifikasi biometrik dan geolokasi meningkatkan akurasi dan mencegah manipulasi data kinerja • Desain *offline*-first mengakomodasi keterbatasan konektivitas di wilayah terpencil • Laporan kinerja (LKjIP) setiap OPD dipublikasikan secara terbuka pada portal resmi	• Efektivitas sistem sangat bergantung pada kedisiplinan input data oleh seluruh OPD secara konsisten • Evaluasi akuntabilitas kinerja (AKIP) oleh Inspektorat/Kemenpan RB bersifat periodik sehingga umpan balik tidak selalu *real-time* • Kompleksitas sistem memerlukan pelatihan berkelanjutan bagi operator di seluruh OPD

4.6.3.1 Identitas Inovasi

Tabel 4.17 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap; identitas visual mengacu pada dokumentasi sistem pada laporan ini.
Tahun Mulai	Kini memasuki versi kedua (periode 2025–2029); tidak tercantum tahun mulai versi pertama dalam metadata rekap.
SKPD/Instansi Pencetus	Bapperida/Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	Asta Cita 7 - reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja

4.6.3.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Menetapkan dan mengukur kinerja, mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, terintegrasi penuh dengan Sistem Perencanaan, Sistem Keuangan, dan E-Kinerja.

Sasaran Penerima Manfaat: Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten HSS sebagai pengelola dan pelapor kinerja instansi.

4.6.3.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Sistem digital E-SAKIP versi kedua (2025–2029) dengan otentikasi *Single Sign-On* (SSO) terpusat.
- E-Kinerja dengan teknologi pengenalan wajah (face recognition) dan geolokasi berbasis Machine Learning Kit Google.
- Data kinerja seluruh OPD.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel 4.18 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Bapperida/Bagian Organisasi Setda	Mengelola sistem dan mengintegrasikan data perencanaan, keuangan, dan kinerja.
Seluruh OPD	Menginput data kinerja secara konsisten melalui sistem.
ASN	Menggunakan E-Kinerja dengan verifikasi wajah dan geolokasi untuk pelaporan kinerja harian.
Inspektorat/Kemenpan RB	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja (AKIP) secara periodik.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: OPD menetapkan dan mengukur target kinerja pada sistem E-SAKIP.
- Langkah 2: ASN melaporkan kinerja harian melalui E-Kinerja dengan verifikasi wajah dan geolokasi (mendukung moda *offline*-first).
- Langkah 3: Sistem mengintegrasikan data perencanaan, keuangan, dan kinerja secara otomatis melalui SSO.
- Langkah 4: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tiap OPD dipublikasikan secara terbuka pada portal resmi.
- Langkah 5: Inspektorat/Kemenpan RB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja (AKIP) secara periodik.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Integrasi penuh antar-sistem perencanaan, keuangan, dan kinerja menjadikan E-SAKIP paling matang secara teknis di antara enam inovasi fokus; fitur verifikasi biometrik dan geolokasi meningkatkan akurasi dan mencegah manipulasi data kinerja; desain *offline*-first mengakomodasi keterbatasan konektivitas di wilayah terpencil.

e. Keluaran (Output)

LKjIP seluruh OPD dipublikasikan secara terbuka pada portal resmi; sistem E-Kinerja dengan verifikasi biometrik dan geolokasi beroperasi penuh.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Data kinerja ASN dan OPD yang lebih akurat dan sulit dimanipulasi (jangka pendek); budaya akuntabilitas kinerja yang mengakar di seluruh OPD dengan umpan balik yang lebih *real-time* (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Efektivitas sistem sangat bergantung pada kedisiplinan input data oleh seluruh OPD secara konsisten. Evaluasi akuntabilitas kinerja (AKIP) oleh Inspektorat/Kemenpan RB bersifat periodik sehingga umpan balik tidak selalu *real-time*. Kompleksitas sistem memerlukan pelatihan berkelanjutan bagi operator di seluruh OPD.

4.6.3.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel 4.19 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Tim kajian memakai status agregat pada rekap SKPD; rincian dokumen per indikator berada pada instansi pengampu dan belum diverifikasi lapangan secara independen.
Ketersediaan dan Peran SDM	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Operator di seluruh OPD teridentifikasi sebagai pengguna sistem; jumlah dan kualifikasi operator belum dirinci.
Dukungan Anggaran	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Anggaran pengembangan sistem versi kedua (2025–2029) belum dirinci dalam dokumen kajian.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Sistem SSO, face recognition, dan geolokasi menjadi alat kerja paling matang secara teknis di antara enam inovasi fokus.
Bimtek Inovasi	Ada Indikasi Awal	Kompleksitas sistem yang memerlukan pelatihan berkelanjutan mengindikasikan bimtek sudah dan terus dilaksanakan bagi operator OPD.

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Integrasi dalam RKPD	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Program tercatat sebagai kegiatan Bapperida/Bagian Organisasi Setda; halaman spesifik RKPD belum dikutip dalam laporan ini.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Sudah Lengkap" pada rekap SKPD (Bapperida), sejajar dengan LIWAR HSS dan SILAPIS dari SKPD yang sama.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel 4.20 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Integrasi sistem perencanaan-keuangan-kinerja	Terintegrasi penuh	Terintegrasi penuh via SSO	Paling matang secara teknis di antara enam inovasi fokus.
Publikasi LKjIP OPD	Seluruh OPD terpublikasi terbuka	Sudah dipublikasikan pada portal resmi	Capaian transparansi sudah terwujud.
Kedisiplinan input data OPD	100% OPD konsisten input	Bervariasi antar-OPD	Faktor risiko utama efektivitas sistem.
Skor kualitatif tim kajian (efisiensi, digitalisasi, kelembagaan, akuntabilitas)	Skor tertinggi di antara 6 inovasi	Skor komposit tertinggi bersama MOSSS	Berdasarkan analisis komparatif Gambar 4.1 laporan ini.

4.6.3.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Meskipun paling matang secara teknis, E-SAKIP tetap bergantung pada faktor manusia (kedisiplinan input data OPD) yang bervariasi; kompleksitas sistem yang tinggi juga berisiko menjadi hambatan adopsi bagi OPD dengan kapasitas SDM digital terbatas.

4.6.3.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel 4.21 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 21)

1. Masalah yang Diselesaikan	Pengukuran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah sebelumnya rawan manipulasi data dan tidak terintegrasi dengan sistem perencanaan dan keuangan.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Seluruh OPD dan ASN Kabupaten HSS.
3. Titik Masuk	Penetapan target kinerja OPD pada sistem E-SAKIP.
4. Langkah-Langkah Kunci	Pelaporan kinerja harian ASN via E-Kinerja (verifikasi wajah dan geolokasi) → integrasi otomatis data perencanaan-keuangan-kinerja → publikasi LKjIP → evaluasi AKIP periodik.

5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	ASN merasa lebih diakui kinerjanya karena tercatat otomatis dan akurat melalui verifikasi wajah, mengurangi kecurigaan manipulasi absensi/kinerja; pimpinan OPD merasa lebih mudah memantau kinerja unit kerjanya secara *real-time* tanpa menunggu laporan manual berjenjang; ASN di wilayah dengan sinyal lemah tetap terlayani berkat desain *offline*-first.
6. Efek Terukur	LKjIP seluruh OPD dipublikasikan terbuka pada portal resmi; sistem terintegrasi penuh via SSO (tingkat kedisiplinan input data bervariasi antar-OPD).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Data kinerja pemerintah daerah yang lebih akurat dan transparan, mendukung evaluasi AKIP oleh Inspektorat dan Kemenpan RB secara lebih andal.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Budaya akuntabilitas kinerja yang mengakar di seluruh instansi pemerintah Kabupaten HSS, dengan data kinerja *real-time* yang menjadi dasar pengambilan keputusan kebijakan.
Asumsi Kunci	Seluruh OPD konsisten menginput data; ASN terbiasa dengan verifikasi biometrik; pelatihan berkelanjutan bagi operator OPD terus tersedia.
Pemangku Kepentingan	Bapperida, Bagian Organisasi Setda, seluruh OPD, ASN, Inspektorat Daerah, Kementerian PANRB.

4.6.3.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): memperkuat pemantauan kedisiplinan input data OPD dengan mekanisme pengingat otomatis dan eskalasi bagi OPD yang tertinggal.
- Jangka menengah (6–18 bulan): mengembangkan mekanisme umpan balik yang lebih *real-time* (tidak hanya evaluasi AKIP periodik) serta memperluas pelatihan berkelanjutan bagi operator OPD.
- Keterhubungan model: menjadi tulang punggung data kinerja bagi seluruh model tata kelola administrasi publik terpadu, termasuk pemantauan capaian MOSSS, SILANTING, dan inovasi lain.

4.6.4 SAPA HSS (Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan)

Tabel 4.22 SAPA HSS (Unit Pelaksana:)

Unit Pelaksana: *Sekretariat Daerah/Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan* *Website: https://sapa.hulusungaiselatankab.go.id/*

Gambar 4.4 Ilustrasi SAPA HSS

SAPA HSS merupakan saluran pengaduan resmi bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tergolong dalam kategori Asta Cita reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Sebagai instrumen partisipasi publik, SAPA HSS melengkapi kanal pengaduan nasional LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat) yang juga tersedia bagi warga HSS. Dalam dokumen rekapitulasi, entri SAPA HSS tercatat sebagai nama program program tanpa uraian teknis mengenai kanal, mekanisme disposisi, maupun standar waktu penyelesaian aduan.

Tabel 4.23 SAPA HSS (Kekuatan)

Kekuatan	**Tantangan/Kelemahan**
• Menjadi instrumen akuntabilitas dan partisipasi publik yang relevan dengan prinsip *good governance* • Melengkapi kanal pengaduan nasional LAPOR! sebagai saluran khusus tingkat kabupaten • Berpotensi menjadi kanal deteksi dini keluhan masyarakat terkait pelayanan publik	• Dokumentasi program paling minim di antara enam inovasi fokus, sehingga mekanisme kerja teknis belum dapat dikaji • Belum ada informasi mengenai standar waktu penyelesaian aduan (SLA) yang dipublikasikan • Tingkat keterbukaan status tindak lanjut aduan kepada publik belum terkonfirmasi

4.6.4.1 Identitas Inovasi

Tabel 4.24 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	SAPA HSS (Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Sekretariat Daerah/Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tercatat pula pada rekap SKPD di bawah Inspektorat Daerah)
Kategori Asta Cita	Asta Cita 7 - reformasi politik, hukum, dan birokrasi

4.6.4.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Menyediakan saluran pengaduan resmi tingkat kabupaten sebagai instrumen partisipasi publik yang melengkapi kanal pengaduan nasional LAPOR!, mendukung prinsip *good governance*.

Sasaran Penerima Manfaat: Seluruh masyarakat Kabupaten HSS yang ingin menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik.

4.6.4.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

- Kanal pengaduan daring SAPA HSS (https://sapa.hulusungaiselatankab.go.id/).
- Keterhubungan konseptual dengan kanal pengaduan nasional LAPOR!.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel 4.25 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Sekretariat Daerah/Diskominfo	Mengelola kanal pengaduan (berdasarkan uraian narasi laporan).
Inspektorat Daerah	Tercatat sebagai pengampu pada rekap SKPD IGA 2025.
Masyarakat	Menyampaikan aduan terkait pelayanan publik.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Masyarakat menyampaikan aduan melalui kanal SAPA HSS.
- Langkah 2: (Mekanisme selanjutnya belum terdokumentasi) Aduan diterima dan didisposisikan ke instansi terkait.
- Langkah 3: (Belum terdokumentasi) Instansi terkait menindaklanjuti aduan sesuai standar waktu penyelesaian.
- Langkah 4: (Belum terdokumentasi) Status tindak lanjut aduan dipublikasikan kembali kepada pelapor/publik.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Kanal pengaduan daring sudah tersedia sebagai alat kerja dasar; namun dalam dokumen rekapitulasi, entri SAPA HSS tercatat sebagai nama program tanpa uraian teknis mengenai kanal, mekanisme disposisi, maupun standar waktu penyelesaian aduan — dokumentasi program paling minim di antara enam inovasi fokus.

e. Keluaran (Output)

Kanal pengaduan resmi tingkat kabupaten yang melengkapi LAPOR! tersedia bagi masyarakat.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Masyarakat memiliki saluran resmi menyampaikan keluhan pelayanan publik (jangka pendek, belum terverifikasi tingkat pemanfaatannya); SAPA HSS

menjadi kanal deteksi dini keluhan masyarakat yang terdokumentasi dengan standar waktu penyelesaian yang jelas dan transparan (jangka menengah-panjang, memerlukan penguatan dokumentasi mendesak).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Dokumentasi program paling minim di antara enam inovasi fokus, sehingga mekanisme kerja teknis belum dapat dikaji. Belum ada informasi mengenai standar waktu penyelesaian aduan (SLA) yang dipublikasikan. Tingkat keterbukaan status tindak lanjut aduan kepada publik belum terkonfirmasi.

4.6.4.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel 4.26 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Belum Ada Bukti	Kolom status pada rekap SKPD belum diisi/tercatat "Belum Ada" oleh instansi pengampu sehingga kesiapan indikator ini belum dapat dinilai dari dokumen rekap.
Ketersediaan dan Peran SDM	Belum Ada Bukti	Pengelola/petugas penanggung jawab kanal pengaduan belum didokumentasikan dalam rekap.
Dukungan Anggaran	Belum Ada Bukti	Alokasi anggaran pengelolaan kanal pengaduan belum tercantum.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Kanal pengaduan daring sudah tersedia sebagai alat kerja dasar, meski minim dokumentasi mekanisme kerja.
Bimtek Inovasi	Belum Ada Bukti	Frekuensi bimtek pengelola kanal pengaduan belum tercatat.
Integrasi dalam RKPD	Belum Ada Bukti	Keterangan program dalam RKPD belum teridentifikasi pada dokumen rekap yang tersedia.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Belum Ada" pada rekap SKPD (tercatat di bawah Inspektorat Daerah bersama SEHATI dan PETA SI APIP), konsisten dengan temuan kajian ini bahwa dokumentasi program SAPA HSS paling minim di antara enam inovasi fokus.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel 4.27 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Jumlah aduan diterima	Tercatat dan dipublikasikan	Belum dipublikasikan	Dokumentasi program paling minim di antara 6 inovasi fokus.
Standar waktu penyelesaian aduan (SLA)	Ditetapkan dan dipatuhi	Belum tersedia	Kesenjangan utama yang teridentifikasi kajian.
Tingkat transparansi status tindak lanjut	Terbuka bagi publik	Belum terkonfirmasi	Perlu mekanisme pelaporan balik ke pelapor.
Skor kualitatif tim kajian (4 dimensi evaluatif)	Setara inovasi lain	Skor terendah di antara 6 inovasi fokus	Berdasarkan analisis komparatif Gambar 4.1 laporan ini.

4.6.4.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

SAPA HSS memperoleh skor terendah pada hampir seluruh dimensi evaluatif kajian (efisiensi, digitalisasi, kelembagaan/SOP, keterbukaan), mengonfirmasi bahwa inovasi ini memerlukan penguatan dokumentasi dan standar kinerja secara mendesak sebelum dapat dinilai efektivitasnya secara memadai.

4.6.4.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan SAPA HSS (Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel 4.28 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 28)

1. Masalah yang Diselesaikan	Masyarakat belum memiliki saluran pengaduan resmi tingkat kabupaten yang terdokumentasi jelas untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik, di luar kanal nasional LAPOR!.
2. Sasaran/Audiens Kunci	Seluruh masyarakat Kabupaten HSS.
3. Titik Masuk	Penyampaian aduan melalui kanal SAPA HSS.
4. Langkah-Langkah Kunci	Penyampaian aduan → (mekanisme disposisi dan tindak lanjut belum terdokumentasi secara publik).
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Masyarakat yang mengetahui dan memakai SAPA HSS mungkin merasa memiliki saluran resmi tingkat kabupaten, namun tanpa kejelasan standar waktu penyelesaian dan status tindak lanjut, pelapor berisiko merasa aduannya "menghilang" tanpa kepastian, yang justru dapat menurunkan kepercayaan terhadap kanal ini.
6. Efek Terukur	Kanal pengaduan tersedia dan dapat diakses masyarakat (jumlah aduan, waktu penyelesaian, dan status tindak lanjut belum terdokumentasi dan dipublikasikan).

7. Manfaat yang Lebih Luas	Menjadi instrumen akuntabilitas dan partisipasi publik yang relevan dengan prinsip *good governance*, melengkapi kanal pengaduan nasional LAPOR! sebagai saluran khusus tingkat kabupaten.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	SAPA HSS menjadi kanal deteksi dini keluhan masyarakat yang tepercaya, dengan SLA yang jelas dan status tindak lanjut yang transparan, menjadi instrumen utama perbaikan pelayanan publik berkelanjutan.
Asumsi Kunci	Masyarakat mengetahui keberadaan kanal ini; instansi terkait menindaklanjuti aduan yang masuk secara konsisten; dokumentasi mekanisme kerja segera dilengkapi.
Pemangku Kepentingan	Sekretariat Daerah/Diskominfo, Inspektorat Daerah, seluruh instansi tujuan disposisi aduan, masyarakat pelapor.

4.6.4.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): melengkapi dokumentasi mekanisme kerja SAPA HSS (kanal, alur disposisi, penanggung jawab) sebagai prioritas mendesak mengingat skor evaluasi terendah di antara enam inovasi fokus.
- Jangka menengah (6–18 bulan): menetapkan dan mempublikasikan standar waktu penyelesaian aduan (SLA) serta mekanisme transparansi status tindak lanjut kepada pelapor.
- Keterhubungan model: menjadi kanal deteksi dini keluhan yang idealnya terhubung dengan E-SAKIP untuk memantau dampaknya terhadap kinerja OPD yang diadukan.

4.6.5 Klinik Arsip

Tabel 4.29 Klinik Arsip (Unit Pelaksana:)

Unit Pelaksana: *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Hulu Sungai Selatan* *Website: https://dispersip.hulusungaiselatankab.go.id/*

Gambar 4.5 Ilustrasi Klinik Arsip

Klinik Arsip merupakan inovasi layanan konsultasi tata kelola arsip bagi instansi pemerintah yang diselenggarakan Dispersip Kabupaten HSS, didukung payung regulasi kuat berupa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis. Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten HSS meraih prestasi terbaik nasional dalam Jaringan Simpul Kearsipan Nasional, dengan komitmen mengunggah target 1.000 arsip foto setiap tahun ke Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), serta melaksanakan pameran arsip *virtual* minimal dua kali per tahun.

Tabel 4.30 Klinik Arsip (Kekuatan)

Kekuatan	Tantangan/Kelemahan
• Meraih prestasi terbaik nasional Jaringan Simpul Kearsipan Nasional 2025 — capaian eksternal yang terverifikasi • Payung regulasi kearsipan paling lengkap dan mutakhir (Perda 2015, Perbup 2023) di antara enam inovasi fokus • Terintegrasi dengan sistem nasional SIKN/JIKN dengan target unggahan tahunan yang terukur	• Cakupan alih media arsip vital dan arsip lama di seluruh OPD masih berjalan bertahap • Layanan konsultasi Klinik Arsip bagi OPD lain belum memiliki data jumlah instansi yang telah dilayani secara terbuka • Kapasitas SDM kearsipan di tingkat OPD dan desa masih memerlukan pelatihan berkelanjutan

4.6.5.1 Identitas Inovasi

Tabel 4.31 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	Klinik Arsip
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Didukung Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023; meraih prestasi terbaik nasional Jaringan Simpul Kearsipan Nasional pada 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kategori Asta Cita	Asta Cita 7 - reformasi birokrasi dan tata kelola kearsipan

4.6.5.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Memberikan layanan konsultasi tata kelola arsip bagi instansi pemerintah, didukung payung regulasi kuat, guna meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan daerah hingga meraih pengakuan nasional.

Sasaran Penerima Manfaat: Instansi pemerintah (OPD) se-Kabupaten HSS yang membutuhkan konsultasi tata kelola arsip.

4.6.5.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

• Payung regulasi: Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Perbup Nomor 5 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.
• Tenaga konsultan kearsipan Dispersip.
• Target unggahan 1.000 arsip foto per tahun ke SIKN/JIKN.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel 4.32 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
Dispersip	Menyediakan layanan konsultasi, mengelola alih media arsip, dan mengunggah arsip ke SIKN/JIKN.
OPD lain	Menerima layanan konsultasi tata kelola arsip dari Klinik Arsip.
Jaringan Simpul Kearsipan Nasional	Memberikan pengakuan dan pembinaan tingkat nasional.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: OPD yang membutuhkan konsultasi tata kelola arsip menghubungi Klinik Arsip.
- Langkah 2: Dispersip memberikan konsultasi sesuai payung regulasi (Perda 2015, Perbup 2023).
- Langkah 3: Dispersip melaksanakan alih media arsip vital dan arsip lama secara bertahap di seluruh OPD.
- Langkah 4: Arsip foto diunggah ke SIKN dan JIKN dengan target 1.000 arsip per tahun.
- Langkah 5: Pameran arsip virtual dilaksanakan minimal dua kali per tahun.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Payung regulasi kearsipan paling lengkap dan mutakhir (Perda 2015, Perbup 2023) di antara enam inovasi fokus menjadi kekuatan utama; integrasi dengan sistem nasional SIKN/JIKN dengan target unggahan tahunan yang terukur; namun cakupan alih media arsip vital dan arsip lama di seluruh OPD masih berjalan bertahap.

e. Keluaran (Output)

Prestasi terbaik nasional Jaringan Simpul Kearsipan Nasional 2025 (capaian eksternal terverifikasi); target unggahan 1.000 arsip foto per tahun ke SIKN/JIKN; pameran arsip virtual minimal dua kali per tahun.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

OPD memperoleh tata kelola arsip yang lebih baik melalui konsultasi (jangka pendek); seluruh arsip vital dan arsip lama di semua OPD teralihmediakan dan terdokumentasi dalam sistem nasional (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Cakupan alih media arsip vital dan arsip lama di seluruh OPD masih berjalan bertahap. Layanan konsultasi Klinik Arsip bagi OPD lain belum memiliki data jumlah instansi yang telah dilayani secara terbuka. Kapasitas SDM kearsipan di tingkat OPD dan desa masih memerlukan pelatihan berkelanjutan.

4.6.5.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel 4.33 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Tim kajian memakai status agregat pada rekap SKPD; rincian dokumen per indikator berada pada instansi pengampu dan belum diverifikasi lapangan secara independen.
Ketersediaan dan Peran SDM	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Tenaga konsultan kearsipan Dispersip teridentifikasi aktif; rincian jumlah dan peran personil belum dirinci dalam laporan ini.
Dukungan Anggaran	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Anggaran layanan konsultasi dan alih media arsip belum dirinci dalam dokumen kajian.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Integrasi dengan SIKN/JIKN dan target unggahan 1.000 arsip/tahun menjadi alat kerja utama yang terukur.
Bimtek Inovasi	Ada Indikasi Awal	Kapasitas SDM kearsipan OPD/desa yang disebut masih memerlukan pelatihan berkelanjutan mengindikasikan bimtek sudah berjalan namun perlu diperluas.
Integrasi dalam RKPD	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Program tercatat sebagai kegiatan Dispersip; halaman spesifik RKPD belum dikutip dalam laporan ini.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): “Data Dukung Sudah Lengkap” pada rekap SKPD (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), sejajar dengan Kelas Komputer Dasar dari SKPD yang sama.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel 4.34 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Prestasi Jaringan Simpul Kearsipan Nasional	Meraih penghargaan	Terbaik nasional 2025	Capaian eksternal terverifikasi, satu-satunya di antara 6 inovasi fokus.
Unggahan arsip foto ke SIKN/JIKN	1.000 arsip/tahun	Target ditetapkan 1.000/tahun	Perlu publikasi realisasi tahunan untuk verifikasi capaian.
Pameran arsip virtual	Minimal 2 kali/tahun	Target ditetapkan 2 kali/tahun	Perlu publikasi realisasi pelaksanaan.
OPD yang dilayani konsultasi Klinik Arsip	Seluruh OPD	Belum tersedia dalam angka	Kesenjangan data yang perlu ditutup.

4.6.5.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Meskipun memiliki payung regulasi paling lengkap dan prestasi nasional yang terverifikasi, Klinik Arsip menghadapi tantangan implementasi klasik: proses alih media arsip yang bertahap dan keterbatasan kapasitas SDM kearsipan di tingkat OPD/desa, menunjukkan kesenjangan antara kekuatan kelembagaan-regulasi dengan kecepatan eksekusi teknis di lapangan.

4.6.5.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan Klinik Arsip disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel 4.35 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 35)

1. Masalah yang Diselesaikan	Instansi pemerintah di Kabupaten HSS menghadapi tata kelola arsip yang belum tertata, berisiko kehilangan arsip vital dan tidak sejalan dengan standar kearsipan nasional.
2. Sasaran/Audiens Kunci	OPD se-Kabupaten HSS yang membutuhkan konsultasi tata kelola arsip.
3. Titik Masuk	Konsultasi OPD ke Klinik Arsip Dispersip.
4. Langkah-Langkah Kunci	Konsultasi tata kelola arsip → alih media arsip vital dan arsip lama → unggahan ke SIKN/JIKN → pameran arsip virtual.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	OPD yang berkonsultasi merasa lebih terarah menata arsipnya karena mengikuti payung regulasi yang jelas (Perda dan Perbup), bukan menerka-nerka standar sendiri; masyarakat yang mengakses pameran arsip virtual merasakan kemudahan menikmati warisan dokumentasi daerah tanpa perlu datang fisik ke kantor arsip.

6. Efek Terukur	Prestasi terbaik nasional Jaringan Simpul Kearsipan Nasional 2025; target 1.000 arsip foto/tahun ke SIKN/JIKN dan pameran virtual minimal dua kali/tahun (realisasi tahunan belum dipublikasikan rinci).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Payung regulasi kearsipan paling lengkap dan mutakhir di antara enam inovasi fokus, serta integrasi penuh dengan sistem kearsipan nasional (SIKN/JIKN).
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Seluruh arsip vital dan arsip lama OPD se-Kabupaten HSS teralihmediakan dan terdokumentasi penuh dalam sistem nasional, dengan kapasitas SDM kearsipan yang merata hingga tingkat desa.
Asumsi Kunci	OPD secara aktif memanfaatkan layanan konsultasi Klinik Arsip; proses alih media arsip mendapat dukungan sumber daya yang memadai; pelatihan SDM kearsipan berkelanjutan tersedia bagi OPD dan desa.
Pemangku Kepentingan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, seluruh OPD, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI, pembina SIKN/JIKN), pemerintah desa.

4.6.5.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): mempublikasikan data jumlah OPD yang telah menerima layanan konsultasi Klinik Arsip dan realisasi tahunan unggahan arsip ke SIKN/JIKN.
- Jangka menengah (6–18 bulan): mempercepat cakupan alih media arsip vital di seluruh OPD dan memperluas pelatihan SDM kearsipan hingga tingkat desa.
- Keterhubungan model: menjadi rujukan praktik baik tata kelola berbasis regulasi kuat bagi SIMKuDa dan SAPA HSS yang masih memerlukan penguatan payung kebijakan.

4.6.6 SIMKuDa (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Desa)

Tabel 4.36 SIMKuDa (Unit Pelaksana:)

Unit Pelaksana: *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan*

SIMKuDa merupakan sistem informasi untuk memantau perencanaan dan realisasi keuangan desa (APBDes) di Kabupaten HSS, selaras dengan kerangka nasional Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP. Sistem ini penting bagi transparansi pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD, mengingat Kabupaten HSS memiliki 148 desa/kelurahan yang masing-masing mengelola anggaran desa secara mandiri di bawah pembinaan kecamatan dan DPMD.

Tabel 4.37 SIMKuDa (Kekuatan)

Kekuatan	Tantangan/Kelemahan
• Berbasis kerangka nasional Siskeudes yang telah teruji dan didukung BPKP • Relevan langsung dengan transparansi pengelolaan dana desa di 148 desa/kelurahan • Berpotensi menjadi basis data penting bagi pengawasan APBDes oleh DPMD dan Inspektorat	• Dokumentasi program dalam rekapitulasi inovasi daerah minim, hanya berupa nama program tanpa uraian teknis • Publikasi capaian realisasi APBDes per desa kepada masyarakat belum merata • Kapasitas operator keuangan desa dalam mengoperasikan sistem bervariasi antar-desa

4.6.6.1 Identitas Inovasi

Tabel 4.38 Identitas Inovasi (Nama Inovasi)

Nama Inovasi	SIMKuDa (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Desa)
Logo/Identitas Visual	Belum ada berkas logo terpisah dari dokumen rekap.
Tahun Mulai	Tidak tercantum dalam metadata rekap IGA 2025.
SKPD/Instansi Pencetus	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tercatat pula pada rekap SKPD Kecamatan Telaga Langsat)
Kategori Asta Cita	Asta Cita 7 - reformasi birokrasi dan transparansi keuangan desa

4.6.6.2 Tujuan Inovasi dan Sasaran Penerima Manfaat

Tujuan Inovasi: Memantau perencanaan dan realisasi keuangan desa (APBDes), selaras dengan kerangka nasional Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Kementerian Dalam Negeri dan BPKP, guna mendukung transparansi pengelolaan dana desa.

Sasaran Penerima Manfaat: 148 desa/kelurahan se-Kabupaten HSS yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara mandiri.

4.6.6.3 Rancang Bangun Inovasi

a. Masukan (Input)

• Kerangka nasional Siskeudes (Kementerian Dalam Negeri dan BPKP).
• Data APBDes dari 148 desa/kelurahan.
• Operator keuangan desa di tiap desa/kelurahan.

b. Aktor Pelaksana dan Peran

Tabel 4.39 Rancang Bangun Inovasi (Aktor)

Aktor	Peran Utama
DPMD/Kecamatan (pembinaan)	Membina dan mengawasi operator keuangan desa dalam menjalankan sistem.
Operator keuangan desa	Menginput dan mengelola data APBDes desa masing-masing.
BPKP	Membina kerangka nasional Siskeudes yang menjadi basis sistem.

Aktor	Peran Utama
Inspektorat	Berpotensi menggunakan data SIMKuDa untuk pengawasan APBDes.

c. Alur Kerja/Proses

- Langkah 1: Operator keuangan desa menginput data perencanaan dan realisasi APBDes melalui sistem berbasis Siskeudes.
- Langkah 2: Kecamatan dan DPMD membina operator keuangan desa dalam mengoperasikan sistem.
- Langkah 3: Data APBDes terkumpul dari 148 desa/kelurahan untuk dipantau secara terpusat.
- Langkah 4: (Tahap yang belum berjalan) Publikasi capaian realisasi APBDes per desa kepada masyarakat secara merata.
- Langkah 5: (Tahap yang belum berjalan) Pemanfaatan data SIMKuDa oleh DPMD dan Inspektorat sebagai basis pengawasan APBDes yang sistematis.

d. Sistem dan Infrastruktur Pendukung

Berbasis kerangka nasional Siskeudes yang telah teruji dan didukung BPKP menjadi kekuatan utama; namun dokumentasi program dalam rekapitulasi inovasi daerah masih minim (hanya nama program tanpa uraian teknis), dan kapasitas operator keuangan desa bervariasi antar-desa.

e. Keluaran (Output)

Sistem pemantauan APBDes berbasis Siskeudes yang relevan bagi 148 desa/kelurahan di Kabupaten HSS.

f. Hasil yang Diharapkan (*Outcome*)

Data keuangan desa yang lebih tertib dan dapat dipantau terpusat (jangka pendek); transparansi penuh pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pengawasan sistematis oleh DPMD/Inspektorat (jangka menengah-panjang).

g. Kesenjangan Rancang Bangun

Dokumentasi program dalam rekapitulasi inovasi daerah minim, hanya berupa nama program tanpa uraian teknis. Publikasi capaian realisasi APBDes per desa kepada masyarakat belum merata. Kapasitas operator keuangan desa dalam mengoperasikan sistem bervariasi antar-desa.

4.6.6.4 Capaian Inovasi (*Dashboard* Capaian terhadap IKU)

Dashboard berikut memakai enam indikator kesiapan inovasi daerah pada instrumen Inovatif Government Award (IGA) 2025 sebagai proksi Indikator Kinerja Utama (IKU) inovasi, dilengkapi *dashboard* capaian keluaran/*outcome* yang relevan bagi inovasi ini.

a. Status Kesiapan per Indikator IGA 2025

Tabel 4.40 Capaian Inovasi

Indikator IGA 2025	Status	Keterangan
Regulasi Inovasi Daerah	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Tim kajian memakai status agregat pada rekap SKPD; rincian dokumen per indikator berada pada instansi pengampu dan belum diverifikasi lapangan secara independen.
Ketersediaan dan Peran SDM	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Operator keuangan desa di 148 desa/kelurahan teridentifikasi sebagai pengguna utama; kapasitas bervariasi antar-desa.
Dukungan Anggaran	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Anggaran pembinaan dan operasional sistem belum dirinci dalam dokumen kajian.
Alat Kerja	Ada Indikasi Awal	Sistem berbasis kerangka nasional Siskeudes menjadi alat kerja utama yang sudah teruji secara nasional.
Bimtek Inovasi	Sebagian Tersedia (Belum Lengkap)	Pembinaan operator keuangan desa kemungkinan berjalan, namun frekuensi bimtek spesifik belum dirinci dalam dokumen kajian.
Integrasi dalam RKPD	Tercatat Lengkap (agregat SKPD)	Program tercatat sebagai kegiatan pada rekap SKPD; halaman spesifik RKPD belum dikutip dalam laporan ini.

Status Data Dukung (rekap SKPD, agregat): "Data Dukung Sudah Lengkap" pada rekap SKPD (tercatat di bawah Kecamatan Telaga Langsat bersama SiDaTan dan SiSuKa PD), meski narasi laporan menyebut DPMD sebagai unit pelaksana — perbedaan atribusi SKPD ini perlu diklarifikasi.

b. *Dashboard* Capaian Indikator Keluaran/*Outcome*

Tabel 4.41 Capaian Inovasi

Indikator Keluaran/*Outcome*	Target	Realisasi	Keterangan
Cakupan desa menggunakan SIMKuDa	148 desa/kelurahan	Belum dipublikasikan dalam angka	Prasyarat dasar sebelum evaluasi dampak transparansi.
Publikasi realisasi APBDes per desa	Merata di seluruh desa	Belum merata	Kesenjangan transparansi utama yang teridentifikasi kajian.
Kapasitas operator keuangan desa	Merata dan kompeten	Bervariasi antar-desa	Perlu pemetaan dan pelatihan bertarget.
Pemanfaatan data oleh DPMD/Inspektorat untuk pengawasan	Sistematis dan rutin	Berpotensi, belum terkonfirmasi	Peluang penguatan fungsi pengawasan berbasis data.

4.6.6.5 Kendala dan Tantangan Implementasi

Perbedaan atribusi SKPD pengampu antara narasi laporan (DPMD) dan rekap SKPD IGA 2025 (Kecamatan Telaga Langsat) menunjukkan kemungkinan fragmentasi kepemilikan program antar-tingkat pemerintahan yang perlu diklarifikasi agar tata kelola dan akuntabilitas SIMKuDa jelas penanggung jawabnya.

4.6.6.6 Visi dan Teori Perubahan (*Theory of Change*)

Teori perubahan SIMKuDa (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Desa) disusun mengikuti kerangka *Theory of Change* (DIY Toolkit) yang dimulai dari perumusan masalah menuju perubahan jangka panjang, dilengkapi uraian dampak yang dirasakan langsung oleh pengguna.

Tabel 4.42 Visi dan Teori Perubahan (ToC) (Bagian 42)

1. Masalah yang Diselesaikan	Pengelolaan APBDes di 148 desa/kelurahan Kabupaten HSS berisiko tidak transparan dan sulit dipantau tanpa sistem informasi yang terpusat dan terstandardisasi.
2. Sasaran/Audiens Kunci	148 desa/kelurahan se-Kabupaten HSS beserta operator keuangan desa.
3. Titik Masuk	Input data perencanaan dan realisasi APBDes oleh operator keuangan desa melalui sistem berbasis Siskeudes.
4. Langkah-Langkah Kunci	Input data APBDes → pembinaan operator oleh kecamatan/DPMD → pemantauan terpusat → (perlu ditambah) publikasi kepada masyarakat dan pengawasan sistematis.
5. Dampak yang Dirasakan Pengguna	Operator keuangan desa yang sudah terampil merasa lebih mudah menyusun laporan APBDes karena mengikuti kerangka Siskeudes yang sudah teruji nasional, bukan format yang berbeda-beda tiap desa; namun operator dengan kapasitas terbatas mungkin masih kesulitan, dan masyarakat desa belum tentu merasakan manfaat transparansi karena publikasi realisasi APBDes belum merata.
6. Efek Terukur	Sistem pemantauan APBDes berbasis Siskeudes relevan bagi 148 desa/kelurahan (cakupan penggunaan aktual dan publikasi realisasi belum tersedia dalam angka).
7. Manfaat yang Lebih Luas	Mendukung transparansi pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN dan APBD, serta berpotensi menjadi basis data penting bagi pengawasan APBDes oleh DPMD dan Inspektorat.
8. Perubahan Jangka Panjang (Visi)	Seluruh 148 desa/kelurahan Kabupaten HSS mengelola dan mempublikasikan APBDes secara transparan dan konsisten, dengan pengawasan sistematis berbasis data yang mengurangi risiko penyimpangan dana desa.

Asumsi Kunci	Operator keuangan desa di seluruh desa memiliki kapasitas memadai; DPMD dan kecamatan konsisten membina; masyarakat desa memiliki akses untuk memantau publikasi realisasi APBDes.
Pemangku Kepentingan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kecamatan (termasuk Kecamatan Telaga Langsat), pemerintah desa/kelurahan, BPKP, Inspektorat Daerah, masyarakat desa.

4.6.6.7 Rekomendasi Pengembangan Lanjutan

- Jangka pendek (0–6 bulan): mengklarifikasi kepemilikan dan penanggung jawab program antara DPMD dan kecamatan agar tata kelola SIMKuDa jelas, serta melengkapi dokumentasi teknis program.
- Jangka menengah (6–18 bulan): mempublikasikan realisasi APBDes per desa secara merata kepada masyarakat dan memetakan kebutuhan pelatihan operator keuangan desa yang masih tertinggal.
- Keterhubungan model: menjadi basis data bagi DPMD dan Inspektorat dalam pengawasan sistematis APBDes lintas 148 desa/kelurahan.

4.7 Analisis Komparatif Enam Inovasi

Dalam analisis ini memperoleh gambaran pembanding yang transparan, tim kajian menyajikan kembali penilaian kualitatif berskala 1 (rendah) hingga 5 (tinggi) terhadap empat dimensi evaluatif yang telah digunakan sebagai dasar skoring pada Bab III: efisiensi proses layanan, tingkat digitalisasi, kejelasan kelembagaan/SOP, dan keterbukaan/akuntabilitas publik.

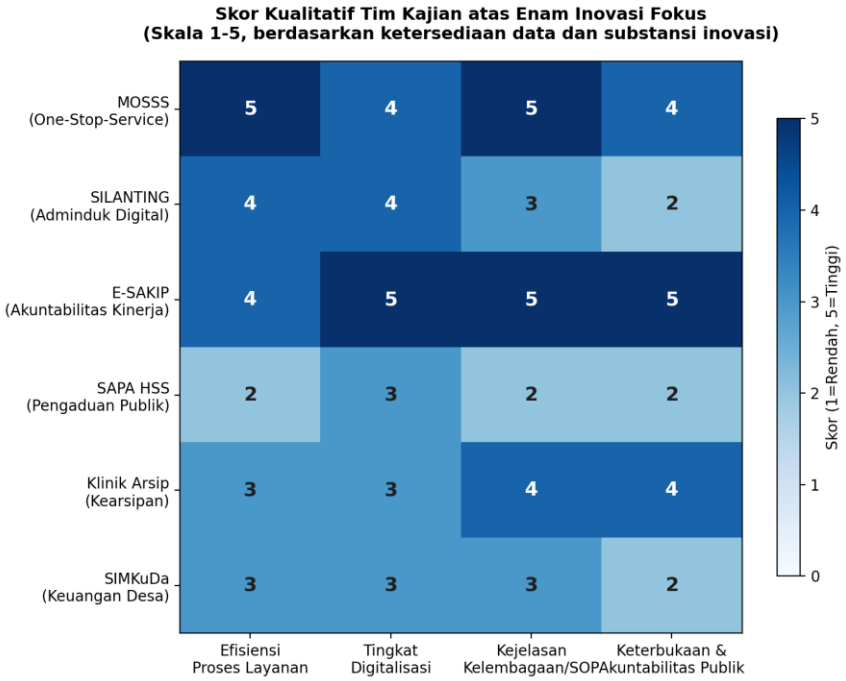

Gambar 4.6 Skor Kualitatif Tim Kajian atas Enam Inovasi Fokus

Hasil pemetaan menunjukkan E-SAKIP dan MOSSS memperoleh skor komposit tertinggi, didukung oleh integrasi sistem yang matang dan skala layanan yang besar. Sebaliknya, SAPA HSS memperoleh skor terendah pada hampir seluruh dimensi, mengonfirmasi temuan pada subbab 4.6.4 bahwa inovasi ini memerlukan penguatan dokumentasi dan standar kinerja secara mendesak. Klinik Arsip menunjukkan pola menarik: skor kelembagaan dan akuntabilitas relatif tinggi (didukung regulasi kuat dan prestasi nasional) namun skor digitalisasi masih moderat karena proses alih media arsip yang bertahap.

4.8 Analisis SWOT Gabungan

Analisis SWOT disusun secara keseluruhan terhadap keseluruhan portofolio enam inovasi fokus kajian, untuk melihat pola kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang berlaku lintas-inovasi sebagai basis perumusan strategi pada Bab V.

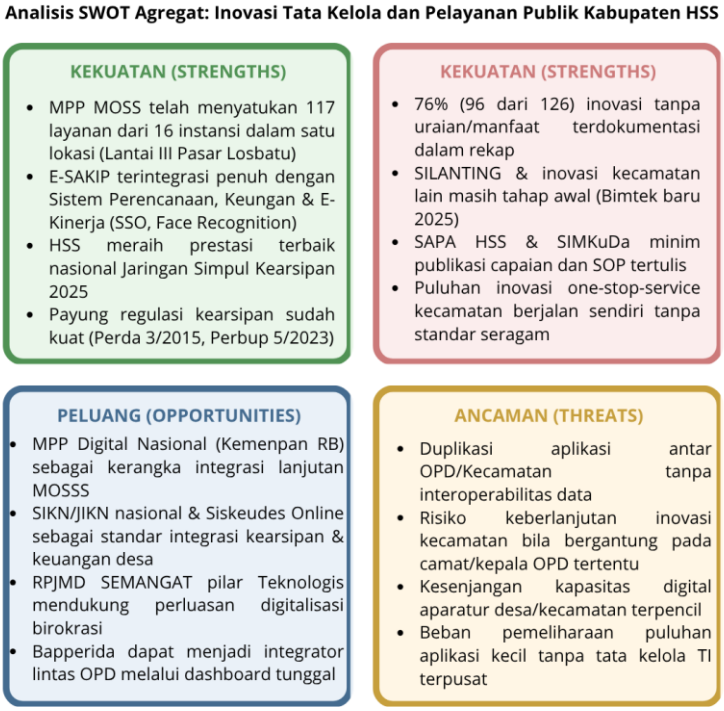

Gambar 4.7 Analisis SWOT Gabungan Inovasi Tata Kelola dan Pelayanan

Analisis SWOT menegaskan bahwa kekuatan utama portofolio inovasi terletak pada capaian eksternal yang telah diraih (prestasi nasional kearsipan, dukungan Kementerian PANRB untuk MPP) dan tingkat kesiapan teknis pada inovasi flagship tertentu (E-SAKIP), namun kelemahan struktural pada dokumentasi dan fragmentasi sistem antar-kecamatan menjadi penghambat utama optimalisasi. Peluang terbesar terletak pada kerangka integrasi nasional yang sudah tersedia (MPP Digital Nasional, SIKN/JIKN, Siskeudes), sementara ancaman

utama adalah duplikasi aplikasi tanpa saling terhubung antar-sistem dan beban pemeliharaan sistem yang tersebar.

4.9 Rangkuman Pemeriksaan kondisi

Rangkuman dari keseluruhan analisis pada Bab IV menunjukkan bahwa tantangan utama penguatan administrasi publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bukan terletak pada ketiadaan inovasi — 100 inovasi telah menjangkau hampir seluruh fungsi administrasi pemerintahan — melainkan pada fragmentasi sistem antar-OPD dan kecamatan, minimnya dokumentasi dan publikasi capaian, serta belum optimalnya saling terhubung antar-sistem data lintas-sistem. Temuan ini menjadi basis perumusan visi dan arah strategis pada Bab V, serta desain model tata kelola terpadu pada Bab VI, yang secara khusus akan menempatkan Bapperida sebagai integrator kebijakan lintas-OPD.

BAB 5
VISI DAN ARAH

OPTIMALISASI INOVASI DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - PERSPEKTIF TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB V
VISI DAN ARAH PENGUATAN ADMINISTRASI PUBLIK 2026–2030

5.1 Arah Umum Penguatan Administrasi Publik

Berdasarkan rangkuman pemeriksaan kondisi pada Bab IV, arah umum penguatan administrasi publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2026–2030 diarahkan pada tiga agenda besar: (1) standardisasi dan saling terhubung antar-sistem sistem informasi lintas-OPD dan kecamatan, (2) penguatan dokumentasi dan publikasi capaian kinerja, dan (3) penguatan peran Bapperida sebagai integrator kebijakan inovasi daerah.

5.2 Visi Penguatan Administrasi Publik 2030

"Terwujudnya Hulu Sungai Selatan sebagai kabupaten dengan tata kelola administrasi publik yang efisien, terintegrasi, dan akuntabel, sebagai fondasi perencanaan pembangunan daerah yang berbasis bukti."

Visi ini dirumuskan selaras dengan pilar Teknologis dan Mengayomi dalam visi RPJMD Kabupaten HSS "SEMANGAT," serta menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari banyaknya aplikasi yang diluncurkan, tetapi dari sejauh mana sistem-sistem tersebut terintegrasi, terukur, dan memberikan basis data yang andal bagi perencanaan pembangunan yang diampu Bapperida.

5.3 Prinsip Pengembangan

- Efisien: setiap inovasi mengurangi waktu dan biaya transaksi layanan publik secara terukur;
- Terintegrasi (interoperable): sistem informasi antar-OPD dan kecamatan dapat saling bertukar data tanpa duplikasi input;
- Akuntabel: capaian setiap inovasi dipublikasikan dan dapat diverifikasi oleh publik dan DPRD;
- Partisipatif: masyarakat memiliki kanal pengaduan dan umpan balik yang responsif;
- Berkelanjutan: setiap inovasi memiliki payung kelembagaan dan pembiayaan yang terjamin lintas tahun anggaran, serta terintegrasi dalam dokumen perencanaan resmi.

5.4 Strategi per Sub-Klaster Tematik

Tabel 5.1 Strategi Penguatan per Sub-Klaster Tematik

Sub-Klaster Tematik	Strategi Utama 2026–2030
Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Standardisasi platform aplikasi kecamatan; integrasi dengan MOSSS dan MPP Digital Nasional
E-Government & Adminduk Digital	Percepatan adopsi SILANTING; integrasi dengan Identitas Kependudukan Digital nasional
Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja	Perluasan integrasi E-SAKIP ke seluruh siklus perencanaan-anggaran-kinerja OPD
Pengaduan, Partisipasi & Informasi Publik	Penetapan SLA SAPA HSS; integrasi dengan kanal LAPOR! nasional
Manajemen Kearsipan & Perpustakaan	Percepatan alih media arsip vital; perluasan target unggahan SIKN/JIKN
Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian	Publikasi terbuka realisasi APBDes melalui SIMKuDa di seluruh 148 desa

5.5 Model Pengembangan Terpadu

Model pengembangan yang diusulkan kajian ini adalah sistem tata kelola administrasi publik terintegrasi tiga tingkat: tingkat kecamatan dan OPD teknis sebagai pelaksana layanan langsung, tingkat perangkat daerah pengampu sebagai penetap standar SOP dan evaluasi kinerja per urusan, serta tingkat Bapperida dan Sekretariat Daerah sebagai integrator kebijakan dan sinkronisasi RPJMD/RKPD. Model ini dijabarkan lebih lanjut pada Bab VI.

5.6 Tahapan Pengembangan

5.6.1 Fase I (2026–2027): Standardisasi dan Dokumentasi

Fase I difokuskan pada perbaikan dokumentasi 100 inovasi, penetapan standar SOP dan SLA pada inovasi dengan kelembagaan lemah (SAPA HSS, SIMKuDa), serta pemetaan awal kebutuhan saling terhubung antar-sistem data antar-sistem.

5.6.2 Fase II (2028–2030): Integrasi dan Konsolidasi

Fase II difokuskan pada pengembangan *dashboard* pemantauan terpadu (SIMONEV INOVASI), konsolidasi aplikasi pelayanan kecamatan ke platform standar, serta pembentukan Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO).

5.7 Dampak yang Diharapkan

- Meningkatnya efisiensi waktu dan biaya layanan administratif di seluruh 11 kecamatan;
- Menurunnya duplikasi aplikasi dan anggaran pengembangan sistem informasi antar-OPD/kecamatan;
- Meningkatnya kepercayaan publik melalui keterbukaan data capaian kinerja instansi pemerintah;
- Tersedianya basis data terintegrasi yang mendukung fungsi sinkronisasi RPJMD dan RKPD oleh Bapperida.

5.8 Integrasi Kebijakan Daerah (Kesesuaian dengan RPJMD)

5.8.1 Visi "SEMANGAT", Misi Pembangunan, dan Keterkaitan dengan Administrasi Publik

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2025, dan mengusung visi "Membangun Desa, Menata Kota, untuk Mewujudkan Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis (SEMANGAT)." Visi ini diterjemahkan ke dalam 5 (lima) misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

- Misi 1 — Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal;
- Misi 2 — Membangun Masyarakat yang Berdaya, Sejahtera, dan Inklusif;
- Misi 3 — Mewujudkan Pembangunan SDM yang Unggul dan Berkarakter;
- Misi 4 — Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital;
- Misi 5 — (misi pelengkap terkait kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang melayani dan kondusif, yang unsurnya turut terdistribusi ke dalam keempat misi pembangunan di atas).

Misi 4 — Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Digital — merupakan misi yang paling langsung relevan dengan kategori Asta Cita 7 yang menjadi fokus kajian ini. Misi ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Tujuan 4: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)," yang selaras dengan pokok visi Mengayomi dan Teknologis.

5.8.2 Pemetaan Enam Inovasi Fokus terhadap Sasaran dan Indikator Kinerja Misi 4 RPJMD

Penelusuran terhadap dokumen RPJMD menemukan bahwa Tujuan 4 dijabarkan ke dalam serangkaian sasaran dan indikator kinerja yang dari sisi isinya sejalan dengan keenam inovasi fokus kajian ini, meskipun RPJMD tidak mencantumkan nama nama program inovasi (MOSSS, SILANTING, E-SAKIP, SAPA HSS, Klinik Arsip, SIMKuDa) secara jelas. Tabel 5.2 menyajikan pemetaan tersebut beserta kondisi awal (data awal 2024) dan target akhir periode RPJMD sebagaimana tercantum pada Tabel IV-3 Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2025–2030.

Tabel 5.2 Pemetaan Enam Inovasi Fokus terhadap Sasaran dan Indikator

Inovasi	Sasaran RPJMD Terkait	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target Akhir Periode
E-SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah	Nilai SAKIP	84,07 (2024)	95,25 (2030)
E-SAKIP (meta-akuntabilitas)	Tujuan 4: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	93,39 (2024)	105,00 (2030)
MOSSS	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	98,13 (2024)	98,40 (2030)
MOSSS / SILANTING	Terwujudnya Pemerintahan Digital yang Terintegrasi dan Efektif	Indeks Pemerintahan Digital	N/A (2024)	2,45 (2030)
SILANTING	Meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan publik yang terintegrasi	Persentase layanan publik yang terintegrasi	—	—
SAPA HSS	Meningkatnya keterbukaan dan kemudahan akses informasi publik bagi masyarakat	Persentase informasi yang mudah diakses	—	—
Klinik Arsip	Meningkatnya Ketersediaan, Keberadaan dan Keutuhan Arsip; Meningkatnya Digitalisasi Arsip	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip; Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip	—	—
SIMKuDa	Akselerasi Peningkatan Kapasitas Ekonomi dan Kemandirian Desa (Misi 2)	Persentase Desa Mandiri	32,64% (2024)	64,58% (2030)

(Sumber: Perda Kabupaten HSS Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029, Tabel III-6 dan Tabel IV-3)

Data pada Tabel 5.2 menegaskan bahwa keenam inovasi fokus kajian ini bukan sekadar inisiatif OPD yang berdiri sendiri, melainkan alat pelaksana yang berkontribusi langsung terhadap capaian indikator kinerja utama RPJMD, khususnya Indeks Reformasi Birokrasi (ditargetkan naik dari 93,39 pada 2024 menjadi 105,00 pada akhir periode) dan Nilai SAKIP (ditargetkan naik dari 84,07 menjadi 95,25). Dengan demikian, penguatan tata kelola keenam inovasi sebagaimana direkomendasikan pada Bab VI kajian ini secara langsung mendukung pencapaian target-target tersebut.

5.8.3 Pemetaan Enam Inovasi Fokus terhadap Pilar Visi SEMANGAT

Sebagai pelengkap pemetaan pada subbab 5.8.2, Tabel 5.3 menyajikan kembali pemetaan keenam inovasi terhadap kelima pokok visi SEMANGAT, sebagaimana telah disusun pada kajian awal, yang kini diperkuat dengan rujukan Perda RPJMD Nomor 4 Tahun 2025.

Tabel 5.3 Pemetaan Enam Inovasi Fokus terhadap Pilar Visi SEMANGAT

Pilar Visi	Makna Kebijakan	Inovasi Terkait
Sejahtera	Efisiensi layanan meningkatkan kesejahteraan warga	MOSSS, SILANTING
Mandiri	Kemandirian fiskal desa melalui pengelolaan keuangan transparan	SIMKuDa
Agamis	Tata kelola yang jujur dan bertanggung jawab	E-SAKIP (nilai integritas kinerja)
Mengayomi	Pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan warga	MOSSS, SAPA HSS
Teknologis	Transformasi digital birokrasi	SILANTING, E-SAKIP, MOSSS, Klinik Arsip

5.8.4 Catatan Kesenjangan dan Peluang Penguatan

- Berdasarkan penelusuran terhadap RPJMD Kabupaten HSS Nomor 4 Tahun 2025, keenam inovasi fokus belum dicantumkan namanya secara jelas (by name) dalam matriks sasaran dan indikator kinerja RPJMD, meskipun dari sisi isinya sasaran dan indikatornya — Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Pemerintahan Digital, dan Persentase Desa Mandiri — telah selaras penuh dengan kinerja yang diharapkan dari keenam inovasi tersebut;
- Peluang penguatan utama terletak pada pencantuman jelas nama keenam inovasi sebagai program atau kegiatan pendukung (supporting program/activity) pada indikator-indikator tersebut dalam Renstra Perangkat

Daerah dan Renja Perangkat Daerah periode 2025–2029, sehingga keterkaitannya dapat ditelusuri secara langsung oleh Bapperida maupun Inspektorat pada setiap siklus evaluasi RKPD;

- Bapperida dapat menjadikan Tabel 5.2 dan Tabel 5.3 kajian ini sebagai salah satu masukan teknokratis dalam forum konsultasi publik penyusunan RKPD tahunan, khususnya untuk memastikan pagu indikatif program prioritas "Pemantapan Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi", "Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Prima", dan "Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Keuangan Daerah" (sebagaimana tercantum pada RPJMD) turut mengalokasikan sumber daya bagi penguatan saling terhubung antar-sistem data lintas-OPD yang direkomendasikan pada Bab VI kajian ini.

BAB 6
DESAIN MODEL

OPTIMALISASI INOVASI DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - PERSPEKTIF TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB VI
DESAIN MODEL TATA KELOLA TERPADU

6.1 Model Sistem Tata Kelola Administrasi Publik Terpadu

Berangkat dari model pengembangan yang dirumuskan pada Bab V, desain model tata kelola terpadu disusun dalam tiga tingkat yang saling terhubung: tingkat kecamatan dan OPD teknis sebagai pelaksana layanan langsung, tingkat perangkat daerah pengampu sebagai penetap standar SOP dan evaluasi kinerja, serta tingkat Bapperida dan Sekretariat Daerah sebagai integrator kebijakan.

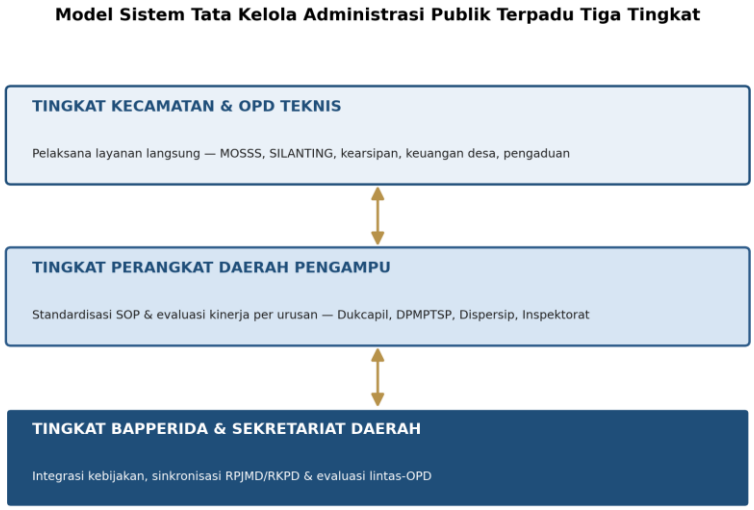

Gambar 6.1 Model Sistem Tata Kelola Administrasi Publik Terpadu Tiga

Model tiga tingkat ini menjadi kerangka payung yang menaungi model optimalisasi masing-masing dari enam inovasi fokus kajian, sebagaimana dijabarkan pada subbab 6.2.

6.2 Model Optimalisasi per Inovasi

Setiap model optimalisasi disajikan dalam bentuk alur proses (*process flow*) lima tahap yang menggambarkan siklus ideal dari permohonan layanan hingga evaluasi dan publikasi capaian, dilengkapi rekomendasi aksi prioritas yang konkret.

6.2.1 Model Optimalisasi MOSSS

Model optimalisasi MOSSS mengusulkan penguatan integrasi data digital antar-16 instansi yang telah bernaung dalam satu lokasi fisik MPP, sehingga interaksi antarloket tidak lagi memerlukan verifikasi manual berulang, serta memperkuat komponen evaluasi berbasis survei kepuasan yang telah berjalan.

Gambar 6.2 Ilustrasi Model Optimalisasi MOSSS

Model Alur Optimalisasi — Model Optimalisasi MOSSS

Penanggung jawab implementasi: *DPMPTSP selaku pengelola MPP bersama 16 instansi mitra layanan, didukung Diskominfo untuk integrasi sistem digital.*

Tabel 6.1 Model Optimalisasi MOSSS

Rekomendasi Aksi Prioritas → Mengembangkan basis data tunggal (*single database*) yang menghubungkan seluruh 16 instansi dalam MPP untuk verifikasi silang otomatis; → Memperluas integrasi dengan MPP Digital Nasional agar sebagian layanan dapat diajukan sepenuhnya daring tanpa kehadiran fisik; → Mempublikasikan data gabungan bulanan (jumlah pemohon, jenis layanan terbanyak, waktu rata-rata layanan) secara terbuka; → Menjadikan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai dasar evaluasi berkala kinerja MPP.

6.2.2 Model Optimalisasi SILANTING

Model optimalisasi SILANTING mengusulkan percepatan pasca-Bimtek September 2025 menuju operasional penuh, dengan penguatan sinkronisasi data ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) nasional serta pemantauan tingkat adopsi oleh masyarakat & perangkat desa.

Gambar 6.3 Ilustrasi Model Optimalisasi SILANTING

Model Alur Optimalisasi — Model Optimalisasi SILANTING

Penanggung jawab implementasi: *Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama seluruh kecamatan dan Dinas Kominfo untuk dukungan infrastruktur jaringan.*

Tabel 6.2 Model Optimalisasi SILANTING (Bagian 2)

Rekomendasi Aksi Prioritas → Menyusun jadwal pendampingan lanjutan pasca-Bimtek untuk memastikan seluruh operator kecamatan/desa mahir mengoperasikan SILANTING; → Mengukur dan mempublikasikan tingkat adopsi (jumlah permohonan daring vs tatap muka) setiap triwulan; → Memastikan sinkronisasi data SILANTING dengan SIAK nasional berjalan otomatis dan konsisten; → Menjangkau desa dengan konektivitas terbatas melalui skema pendampingan berkala oleh operator kecamatan.

6.2.3 Model Penguatan E-SAKIP

Model penguatan E-SAKIP mengusulkan perluasan integrasi sistem ke seluruh OPD secara konsisten, penguatan pemanfaatan data E-Kinerja berbasis biometrik untuk evaluasi kinerja individu ASN, serta percepatan siklus evaluasi AKIP agar umpan balik perbaikan kinerja dapat diberikan lebih responsif.

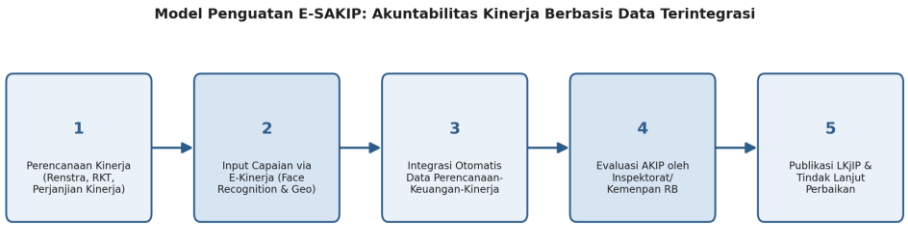

Gambar 6.4 Ilustrasi Model Penguatan E-SAKIP

Model Alur Optimalisasi — Model Penguatan E-SAKIP

Penanggung jawab implementasi: *Bapperida dan Bagian Organisasi Setda bersama seluruh Perangkat Daerah sebagai pengguna sistem.*

Tabel 6.3 Model Penguatan E-SAKIP (Bagian 3)

Rekomendasi Aksi Prioritas → Memastikan seluruh OPD menginput data kinerja secara konsisten dan tepat waktu pada setiap siklus triwulanan; → Memanfaatkan data E-Kinerja (*face recognition* dan geolokasi) sebagai dasar evaluasi kinerja individu ASN secara objektif; → Mempercepat siklus evaluasi internal (*self-assessment* AKIP) sebelum evaluasi eksternal oleh Inspektorat/Kemenpan RB; → Menjadikan E-SAKIP sebagai basis data utama Bapperida dalam menyusun evaluasi RKPD tahunan.

6.2.4 Model SAPA HSS

Model optimalisasi SAPA HSS mengusulkan penguatan mekanisme disposisi aduan ke perangkat daerah terkait dengan batas waktu penyelesaian yang jelas (*service level agreement*), integrasi dengan kanal LAPOR! nasional, serta publikasi status tindak lanjut aduan kepada publik.

Gambar 6.5 Ilustrasi Model SAPA HSS

Model Alur Optimalisasi — Model SAPA HSS

Penanggung jawab implementasi: *Dinas Komunikasi dan Informatika bersama Bagian Organisasi Setda dan seluruh OPD sebagai unit penerima disposisi.*

Tabel 6.4 Model SAPA HSS (Bagian 4)

Rekomendasi Aksi Prioritas
→ Menetapkan dan mempublikasikan standar waktu penyelesaian aduan (SLA) untuk setiap kategori aduan; → Mengintegrasikan SAPA HSS dengan kanal LAPOR! nasional agar aduan warga tercatat pada dua sistem yang saling terhubung; → Membangun *dashboard* status aduan yang dapat dipantau publik secara daring; → Melakukan survei kepuasan pelapor secara berkala untuk mengevaluasi responsivitas tindak lanjut.

6.2.5 Model Klinik Arsip

Model optimalisasi Klinik Arsip mengusulkan percepatan alih media arsip vital di seluruh OPD, perluasan layanan konsultasi kearsipan secara terjadwal, serta mempertahankan momentum prestasi nasional 2025 melalui konsistensi target unggahan SIKN/JIKN.

Gambar 6.6 Ilustrasi Model Klinik Arsip

Model Alur Optimalisasi — Model Klinik Arsip

Penanggung jawab implementasi: *Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bersama seluruh Perangkat Daerah pemilik arsip.*

Tabel 6.5 Model Klinik Arsip (Bagian 5)

Rekomendasi Aksi Prioritas → Menyusun jadwal alih media arsip vital per-OPD dengan target tahunan yang terukur; → Memperluas jadwal layanan konsultasi Klinik Arsip secara berkala ke seluruh OPD dan kecamatan; → Mempertahankan dan meningkatkan target unggahan 1.000 arsip/tahun ke SIKN/JIKN sebagai indikator kinerja utama; → Mendokumentasikan capaian Klinik Arsip dalam basis data rekapitulasi inovasi daerah secara lebih rinci.

6.2.6 Model SIMKuDa

Model optimalisasi SIMKuDa mengusulkan penguatan pembinaan operator keuangan desa, integrasi penuh dengan Siskeudes *Online*, serta publikasi transparansi realisasi APBDes kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas horizontal.

Gambar 6.7 Ilustrasi Model SIMKuDa

Model Alur Optimalisasi — Model SIMKuDa

Penanggung jawab implementasi: *Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Camat selaku pembina wilayah dan pemerintah desa.*

Tabel 6.6 Model SIMKuDa (Bagian 6)

Rekomendasi Aksi Prioritas → Menyelenggarakan pelatihan berkala bagi operator keuangan desa di seluruh 148 desa/kelurahan; → Memastikan integrasi penuh SIMKuDa dengan Siskeudes *Online* untuk kemudahan pelaporan dan audit; → Mempublikasikan realisasi APBDes per desa secara terbuka melalui portal desa digital; → Menjadikan capaian transparansi APBDes sebagai salah satu indikator kinerja DPMD yang dievaluasi tahunan.

6.3 Skema Kelembagaan Lintas OPD

Implementasi model tata kelola terpadu memerlukan kejelasan pembagian peran antar-perangkat daerah. Tabel 6.1 menyajikan skema kelembagaan yang diusulkan untuk mendukung koordinasi lintas-OPD dalam penguatan administrasi publik.

Tabel 6.7 Skema Peran Kelembagaan Lintas OPD

Perangkat Daerah	Peran Utama dalam Model Terpadu
Bapperida	Integrator kebijakan, sinkronisasi RPJMD/RKPD, dan pengelola *dashboard* SIMONEV INOVASI
DPMPTSP	Pengelola MPP dan MOSSS sebagai simpul pelayanan terpadu lintas-instansi
Disdukcapil	Penyedia layanan adminduk digital (SILANTING) dan integrasi SIAK nasional
Bagian Organisasi Setda	Pengelola E-SAKIP dan evaluasi akuntabilitas kinerja OPD
Diskominfo	Pengelola kanal pengaduan (SAPA HSS) dan koordinator saling terhubung antar-sistem sistem (FIDO)
Dispersip	Pengelola Klinik Arsip dan kepatuhan terhadap SIKN/JIKN nasional
DPMD	Pengelola SIMKuDa dan pembinaan keuangan desa di 148 desa/kelurahan

6.4 Rekomendasi Inovasi Baru

Kajian ini mengidentifikasi dua kesenjangan struktural yang memerlukan pengembangan inovasi baru: (1) tidak adanya instrumen pemantauan lintas-inovasi terintegrasi yang dapat diakses Bapperida, dan (2) minimnya forum teknis untuk standardisasi saling terhubung antar-sistem data antar-sistem OPD.

6.4.1 SIMONEV INOVASI: Sistem Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Terpadu

SIMONEV INOVASI diusulkan sebagai *dashboard* digital yang dikelola Bapperida untuk memantau status, tingkat tingkat kesiapan, dan keterkaitan RPJMD/RKPD dari seluruh 214 inovasi daerah, termasuk 100 inovasi pada kategori Asta Cita 7. *Dashboard* ini melengkapi SENADA PLUS dengan lapisan analitik kebijakan yang lebih mendalam.

- Fitur utama: status aktif/tidak aktif setiap inovasi, skor tingkat kesiapan berdasarkan empat dimensi (efisiensi, digitalisasi, kelembagaan, akuntabilitas), dan pemetaan keterkaitan terhadap indikator RPJMD/RKPD;
- Manfaat strategis: memberikan basis data tunggal bagi Bapperida dalam evaluasi RKPD tahunan dan mencegah duplikasi pengembangan aplikasi antar-OPD;
- Kesesuaian RPJMD: mendukung pilar Teknologis secara langsung sebagai instrumen tata kelola berbasis data.

6.4.2 Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO)

FIDO diusulkan sebagai forum teknis berkala yang mempertemukan administrator sistem informasi dari seluruh OPD (SIAK, Siskeudes, E-Kinerja, SIKN, dan sistem pelayanan kecamatan) untuk menyepakati standar pertukaran data (API) lintas-sistem, sehingga data yang telah diinput pada satu sistem dapat dimanfaatkan sistem lain tanpa input berulang.

- Fitur utama: pertemuan teknis triwulanan, penyusunan standar data bersama, dan dokumentasi API antar-sistem OPD;
- Manfaat strategis: mengurangi beban kerja input data berulang, meningkatkan akurasi data lintas-sistem, dan mempercepat proses evaluasi kinerja terintegrasi;
- Kesesuaian RPJMD: mendukung pilar Teknologis dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

BAB 7
RENCANA AKSI

OPTIMALISASI INOVASI DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - PERSPEKTIF TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB VII
RENCANA AKSI DAN MATRIKS IMPLEMENTASI

7.1 Program Fase I (2026–2027): Standardisasi dan Dokumentasi

Program Fase I difokuskan pada langkah-langkah berbiaya relatif rendah namun berdampak tinggi terhadap akuntabilitas dan efisiensi layanan, sebagai fondasi sebelum integrasi sistem dilakukan pada Fase II.

- P1 — Perbaikan dokumentasi 100 inovasi, khususnya SAPA HSS dan SIMKuDa;
- P2 — Penetapan standar waktu tanggap (SLA) untuk SAPA HSS dan publikasi capaian SIMKuDa;
- P3 — Pendampingan lanjutan operator SILANTING pasca-Bimtek;
- P4 — Pemetaan awal kebutuhan saling terhubung antar-sistem data antar 6 inovasi fokus.

7.2 Program Fase II (2028–2030): Integrasi dan Konsolidasi

Program Fase II difokuskan pada pengembangan sistem digital terpadu dan konsolidasi aplikasi yang membutuhkan waktu persiapan dan investasi lebih besar.

- P5 — Konsolidasi platform aplikasi pelayanan terpadu kecamatan ke standar seragam;
- P6 — Pembentukan Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO);
- P7 — Pengembangan dan peluncuran *dashboard* SIMONEV INOVASI;
- P8 — Integrasi penuh MOSSS dengan MPP Digital Nasional dan seluruh sistem OPD terkait.

7.3 Peta Jalan Implementasi

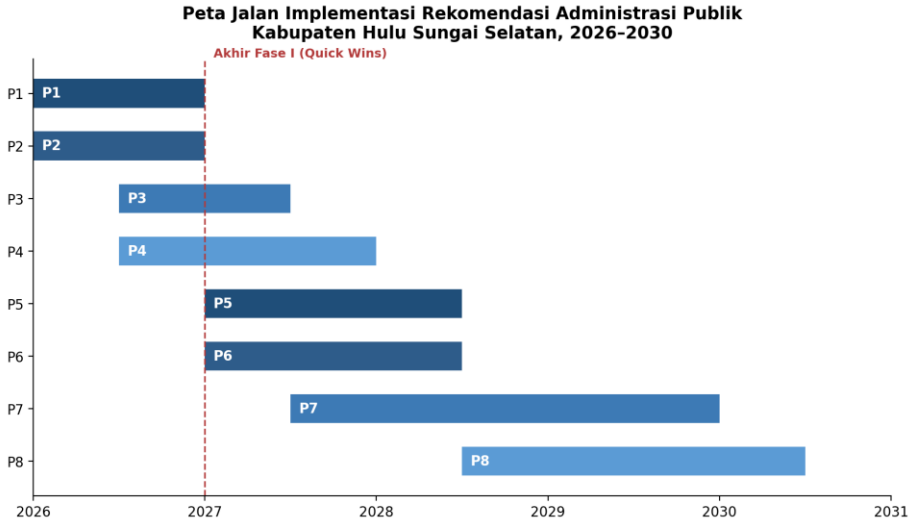

Gambar 7.1 Peta Jalan Implementasi Rekomendasi Administrasi Publik

Tabel 7.1 Legenda Program pada Peta Jalan Implementasi

Kode	Program
P1	Perbaikan Dokumentasi 126 Inovasi (SAPA HSS & SIMKuDa)
P2	Standar Waktu Tanggap (SLA) SAPA HSS & Publikasi SIMKuDa
P3	Pendampingan Lanjutan Operator SILANTING
P4	Pemetaan Kebutuhan Interoperabilitas Data
P5	Konsolidasi Platform Pelayanan Terpadu Kecamatan
P6	Pembentukan Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO)
P7	Pengembangan *Dashboard* SIMONEV INOVASI
P8	Integrasi Penuh MOSSS dengan MPP Digital Nasional

7.4 Matriks Prioritas Implementasi

Tabel 7.2 Matriks Prioritas Implementasi Rekomendasi

Rekomendasi	Urgensi	Kompleksitas	Jangka Waktu
Perbaikan dokumentasi SAPA HSS & SIMKuDa	Tinggi	Rendah	Pendek (0–6 bulan)
Standar waktu tanggap (SLA) SAPA HSS	Tinggi	Sedang	Pendek (0–6 bulan)
Pendampingan lanjutan SILANTING	Tinggi	Sedang	Pendek (0–6 bulan)
Konsolidasi platform kecamatan	Sedang	Tinggi	Panjang (1–2 tahun)

Rekomendasi	Urgensi	Kompleksitas	Jangka Waktu
Pengembangan SIMONEV INOVASI	Sedang	Tinggi	Panjang (1–2 tahun)
Pembentukan FIDO	Sedang	Rendah	Menengah (6–12 bulan)

7.5 Risiko dan Mitigasi Implementasi

Tabel 7.3 Risiko dan Strategi Mitigasi

Risiko	Strategi Mitigasi
Resistensi OPD/kecamatan terhadap konsolidasi aplikasi yang telah mereka kembangkan sendiri	Pendekatan bertahap dengan melibatkan pengembang aplikasi kecamatan dalam penyusunan standar bersama
Keterbatasan anggaran untuk pengembangan SIMONEV INOVASI	Memanfaatkan platform SENADA PLUS yang sudah tersedia sebagai basis pengembangan
Keterbatasan konektivitas internet di desa untuk SILANTING dan SIMKuDa	Skema pendampingan berkala oleh operator kecamatan dan desain sistem yang mendukung mode luring sebagian
Kurangnya komitmen politik untuk mengintegrasikan rekomendasi ke Renstra/RKPD	Advokasi Bapperida melalui forum konsultasi publik penyusunan RKPD tahunan
Pergantian operator sistem mengganggu keberlanjutan input data	Penyusunan SOP tertulis dan mekanisme alih pengetahuan yang terdokumentasi di setiap OPD

BAB 8
PROYEKSI DAMPAK

OPTIMALISASI INOVASI DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - PERSPEKTIF TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB VIII
PROYEKSI DAMPAK DAN KEBERLANJUTAN

8.1 Pendahuluan

Bab ini menyajikan proyeksi dampak implementasi rekomendasi kajian secara kualitatif-skenario, mengingat keterbatasan data kuantitatif historis (*time-series)* capaian keenam inovasi yang terdokumentasi secara terbuka pada saat kajian disusun. Proyeksi disusun dalam bentuk pita kualitatif dan tiga skenario keberlanjutan, bukan dalam bentuk angka persentase definitif, untuk menjaga akurasi dan kehati-hatian metodologis kajian.

8.2 Proyeksi Dampak terhadap Efisiensi Layanan Publik

Apabila rekomendasi Fase I dan Fase II diimplementasikan secara konsisten, kajian ini memproyeksikan peningkatan efisiensi layanan publik pada tiga dimensi utama: pengurangan waktu pemrosesan melalui saling terhubung antar-sistem data (MOSSS, SILANTING), pengurangan duplikasi aplikasi dan anggaran pengembangan sistem melalui konsolidasi platform kecamatan, dan peningkatan akurasi evaluasi kinerja melalui integrasi penuh E-SAKIP.

8.3 Proyeksi Dampak Kelembagaan dan Interoperabilitas

Tabel 8.1 Proyeksi Dampak Kelembagaan (Pita Kualitatif)

Dimensi	**Kondisi Saat Ini**	**Proyeksi Pasca-Implementasi (2030)**
Interoperabilitas Data Lintas-Sistem	Rendah (silo data antar-OPD)	Tinggi (terhubung melalui FIDO & SIMONEV INOVASI)
Keterbukaan Capaian Publik	Rendah–Sedang (sebagian besar belum terpublikasi)	Sedang–Tinggi (*dashboard* terbuka & laporan berkala)
Standardisasi Aplikasi Kecamatan	Terfragmentasi (puluhan aplikasi mandiri)	Terkonsolidasi (platform standar seragam)
Basis Data bagi Evaluasi RKPD	Manual & tersebar	Terintegrasi melalui *dashboard* tunggal Bapperida

8.4 Kontribusi terhadap RPJMD, RKPD, dan SAKIP Kabupaten

Implementasi rekomendasi kajian ini diproyeksikan berkontribusi terhadap capaian visi RPJMD "SEMANGAT," khususnya pilar Teknologis, melalui peningkatan digitalisasi dan saling terhubung antar-sistem layanan. Secara khusus,

penguatan E-SAKIP dan SIMONEV INOVASI diproyeksikan meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP Kabupaten HSS pada penilaian Kemenpan RB, mengingat akurasi dan konsistensi data kinerja menjadi salah satu komponen penilaian utama dalam evaluasi AKIP.

Dalam rangka untuk memperkuat proyeksi kualitatif pada subbab 8.3, Tabel 8.1 berikut menyajikan target kuantitatif indikator kinerja utama RPJMD yang paling relevan dengan keenam inovasi fokus kajian, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029.

Tabel 8.2 Target Kuantitatif IKU RPJMD yang Relevan dengan Enam Inovasi

Indikator Kinerja Utama RPJMD	Kondisi Awal 2024	Target Akhir 2030	Inovasi Pendukung
Indeks Reformasi Birokrasi	93,39	105,00	E-SAKIP
Nilai SAKIP	84,07	95,25	E-SAKIP
Indeks Kepuasan Masyarakat	98,13	98,40	MOSSS, SAPA HSS
Indeks Pemerintahan Digital	N/A	2,45	MOSSS, SILANTING
Indeks Sistem Merit	267,5	360	E-SAKIP (tata kelola SDM aparatur)
Persentase Desa Mandiri	32,64%	64,58%	SIMKuDa

(Sumber: Perda Kabupaten HSS Nomor 4 Tahun 2025, Tabel IV-3 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025–2030)

Pencapaian target-target tersebut menuntut konsistensi input data dan keberlanjutan operasional keenam inovasi fokus, sehingga penguatan tata kelola sebagaimana direkomendasikan pada Bab VI kajian ini menjadi prasyarat penting bagi tercapainya kondisi akhir RPJMD tahun 2030, khususnya pada Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP yang secara langsung dipengaruhi oleh konsistensi pelaporan kinerja melalui E-SAKIP.

8.5 Skenario Keberlanjutan

Tabel 8.3 Skenario Keberlanjutan Implementasi Rekomendasi

Skenario	Asumsi Utama	Dampak
Optimis	Seluruh rekomendasi Fase I & II diintegrasikan ke Renstra/RKPD dengan dukungan anggaran memadai	Kabupaten HSS menjadi rujukan tata kelola administrasi publik terintegrasi di Kalimantan Selatan

Skenario	Asumsi Utama	Dampak
Moderat	Sebagian rekomendasi Fase I diimplementasikan; Fase II tertunda karena keterbatasan anggaran/SDM	Perbaikan dokumentasi dan SLA tercapai, namun konsolidasi platform dan saling terhubung antar-sistem berjalan lambat
Pesimis	Rekomendasi tidak diintegrasikan ke dokumen perencanaan resmi; setiap OPD/kecamatan berjalan sendiri	Fragmentasi aplikasi berlanjut, duplikasi anggaran TI meningkat, dan basis data Bapperida tetap tersebar

Kajian ini merekomendasikan skenario Optimis sebagai target capaian, dengan skenario Moderat sebagai data awal realistis apabila keterbatasan sumber daya daerah menjadi kendala utama.

8.6 Ringkasan Dampak Utama

- Peningkatan efisiensi layanan publik melalui saling terhubung antar-sistem data dan pengurangan verifikasi manual berulang,
- Penurunan duplikasi anggaran pengembangan aplikasi antar-kecamatan melalui konsolidasi *platform*,
- Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui perluasan integrasi E-SAKIP,
- Tersedianya basis data tunggal (SIMONEV INOVASI) yang mendukung fungsi sinkronisasi RPJMD dan RKPD oleh Bapperida,
- Kontribusi positif terhadap capaian visi RPJMD SEMANGAT dan penilaian SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB 9
PENUTUP

OPTIMALISASI INOVASI DAERAH SEBAGAI INSTRUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN - PERSPEKTIF TATA KELOLA DAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

BAB IX
KESIMPULAN DAN SARAN

9.1 Kesimpulan

- Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki populasi 100 inovasi daerah pada kategori Asta Cita 7 (46,7% dari total 214 inovasi daerah), dengan distribusi terbesar pada sub-klaster Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur (24,6%), *E-Government* & Adminduk Digital (19,8%), dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (18,3%);
- Melalui matriks penilaian berbobot yang memprioritaskan efisiensi proses dan kejelasan kelembagaan, enam inovasi fokus kajian — MOSSS, SILANTING, E-SAKIP, SAPA HSS, Klinik Arsip, dan SIMKuDa — terkonfirmasi merepresentasikan pilar-pilar utama administrasi publik, dengan E-SAKIP dan MOSSS menempati peringkat tertinggi;
- Analisis permasalahan menunjukkan tantangan sistemik pada empat lapisan: permohonan dan verifikasi (hulu), penerbitan dan publikasi (hilirisasi), SDM dan kelembagaan aparatur, serta saling terhubung antar-sistem infrastruktur sistem, dengan analisis SWOT gabungan menegaskan bahwa kelemahan struktural utama terletak pada dokumentasi (76% inovasi tanpa uraian) dan fragmentasi sistem antar-kecamatan;
- Keenam inovasi tersebut secara konseptual selaras dengan visi RPJMD Kabupaten HSS 2025–2029 "SEMANGAT," khususnya pilar Teknologis dan Mengayomi, namun keselarasan tersebut belum sepenuhnya terformalisasi dalam dokumen perencanaan dan indikator kinerja resmi;
- Model tata kelola terpadu tiga tingkat (kecamatan/OPD teknis – perangkat daerah pengampu – Bapperida/Setda) dirumuskan sebagai kerangka payung bagi enam model optimalisasi spesifik, disertai dua usulan inovasi baru: SIMONEV INOVASI sebagai *dashboard* pemantauan terpadu bagi Bapperida, dan Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO);
- Rencana aksi disusun dalam dua fase (2026–2027 dan 2028–2030) dengan delapan program prioritas, dilengkapi matriks urgensi-kompleksitas dan strategi mitigasi risiko implementasi;
- Proyeksi dampak menunjukkan potensi peningkatan efisiensi layanan, penurunan duplikasi anggaran TI, dan penguatan basis data bagi sinkronisasi RPJMD/RKPD, dengan skenario keberlanjutan yang sangat bergantung pada integrasi formal rekomendasi ke dalam dokumen perencanaan daerah.

9.2 Saran

9.2.1 Bagi Bapperida Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- Menjadikan hasil kajian ini sebagai salah satu masukan teknokratis dalam forum konsultasi publik penyusunan RKPD tahunan;
- Mempertimbangkan pengembangan SIMONEV INOVASI sebagai prioritas jangka menengah untuk memperkuat basis data pemantauan inovasi daerah secara menyeluruh;
- Menginisiasi pembentukan Forum Interoperabilitas Data Lintas OPD (FIDO) sebagai mekanisme koordinasi teknis lintas-sistem;
- Mendorong pencantuman jelas keenam inovasi fokus dalam Renstra Perangkat Daerah terkait periode 2025–2029.

9.2.2 Bagi Perangkat Daerah Pengampu Inovasi

- DPMPTSP agar memperkuat integrasi data digital antar-16 instansi dalam MOSSS dan memperluas keterhubungan dengan MPP Digital Nasional;
- Disdukcapil agar mempercepat pendampingan lanjutan SILANTING pasca-Bimtek dan memantau tingkat adopsi secara berkala;
- Bagian Organisasi Setda agar memastikan konsistensi input data E-SAKIP oleh seluruh OPD sebagai basis evaluasi kinerja yang andal;
- Diskominfo agar menetapkan SLA SAPA HSS dan mengintegrasikannya dengan kanal LAPOR! nasional;
- Dispersip agar mempertahankan momentum prestasi nasional kearsipan 2025 melalui konsistensi target unggahan SIKN/JIKN;
- DPMD agar memperkuat pembinaan operator SIMKuDa dan mendorong publikasi transparansi APBDes di seluruh 148 desa.

9.2.3 Bagi Penelitian Lanjutan

- Diperlukan kajian lanjutan dengan akses terhadap dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah secara utuh untuk memperdalam analisis kesesuaian kebijakan pada level sasaran dan indikator kinerja;
- Diperlukan audit teknis terhadap seluruh sistem informasi OPD untuk memetakan kebutuhan saling terhubung antar-sistem data secara lebih presisi, guna mendukung perancangan teknis SIMONEV INOVASI dan FIDO secara lebih matang.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2026). Rekap Inovasi Per Kategori Asta Cita [Dokumen rekapitulasi 214 inovasi daerah menurut delapan kategori Asta Cita].

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2022). Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2022). Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2015). Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2023). Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2022). Soft Launching dan Grand Launching Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2022). Kalimantan Selatan Segera Miliki MPP Ketiga. menpan.go.id.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Bimtek SILANTING (Sistem Layanan Terintegrasi Secara Daring).

E-SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2026). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah V2 (2024–2026). esakip.hulusungaiselatankab.go.id.

Sistem Elektronik Penilaian Kinerja (E-Kinerja) Kabupaten Hulu Sungai Selatan. ekinerja.hulusungaiselatankab.go.id.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Proses Pemkab HSS Meraih Prestasi Terbaik Nasional Jaringan Simpul Kearsipan Nasional Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Sekda HSS Buka Pelatihan Pengelolaan Arsip Statis Tahun 2025.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. dispersip.hulusungaiselatankab.go.id.

Siskeudes *Online*. Sistem Keuangan Desa Terintegrasi. siskeudes.*online*.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. LAPOR! Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat. sipp.menpan.go.id.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2024). Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. (2025). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025.

SENADA PLUS. Sistem Informasi Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Lengkap 100 Inovasi kategori Asta Cita 7

Sub-klaster tematik ditentukan berdasarkan pembacaan tematik tim kajian atas nama/nama program program dan kategori Asta Cita asal, mengingat 76% entri (96 dari 126) tidak memiliki uraian dan manfaat yang terdokumentasi dalam rekapitulasi asli.

Tabel 8.4 Lampiran 1. Rekapitulasi Lengkap 100 Inovasi kategori Asta

No	Nama Inovasi	Sub-Klaster Tematik
1	MAS R.R (Melayani Aksi Sigap teRpadu Rehabilitasi & rekonstruksi)	Kamtibmas Kewilayahan
2	Kolam Kaca (Koordinasi Laporan Keamanan Kecamatan Angkinang)	Kamtibmas Kewilayahan
3	GOFO AMAN TERTIB (Pelaporan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui Google Form)	Kamtibmas Kewilayahan
4	KETUMBARKU (KELOMPOK TUMPAS BANJIR KANDANGAN UTARA)	Kamtibmas Kewilayahan
5	Si Wajaseta	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
6	Si IJAK	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
7	MAK HAJI (Manajemen Aset Kesehatan melalui Harmonisasi Aplikasi ASPAK dan Integrasi Data)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
8	Seruni Pintar	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
9	Gemar Bu Resti (Gerakan Masyarakat Peduli Resiko Tinggi Ibu Hamil)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
10	BESTIE ASI (Berikan dukungan, edukasi dan pendampingan pada tiga fase ASI Eksklusif)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
11	PESONA BUMIL CANTIK (Pemantauan, Edukasi, dan Solusi Ibu Hamil Berisiko Tinggi Melalui Chatting untuk Menurunkan BBLR dan Mencegah Stunting)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
12	Bidadari Idaman (Bidan Siap Jemput, Dampingi dan Layani, Diantar Post Melahirkan, Rujuk Bila Resti, Ibu dan Bayi Sehat, Misi Puskesmas Bayanan),	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
13	SI ROKET GIGI	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
14	ANTER CATIN MANIS (Pelayanan Terpadu Calon Pengantin Menuju Pernikahan Sehat dan Harmonis)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
15	GAPURI (Gerakan Pelayanan Kunjungan Rumah Terintegrasi)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
16	SIMPEN BU RESTI	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur

No	Nama Inovasi	Sub-Klaster Tematik
17	OJEK PELITA	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
18	Lahatan Sayang Sidak Scabies (Layanan Kesehatan Hewan Kesayangan Siap Scan Scabies	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
19	AMPUNKU (ANTAR JEMPUT PASIEN KANDANGAN UTARA)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
20	E-Rekam Medis RSUD BHHB	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
21	Perawat Yang Selalu Senyum, Empati, Humanis, Aman, Terampil dan Islami (PERAWAT SEHATI)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
22	SISTEM PELAYANAN STROKE TERPADU (STROKE CORNER)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
23	SILAPAT (Laporan Pelayanan dan Analisa Terpadu)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
24	TAS UMBUY (Tarif Administrasi paSien UMum, Bpjs selisih Untuk di baYar)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
25	JEMPOL ENJOI (JEMPut bOLa pENgunJung pOli)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
26	HSS Semangat (Service Excellent Mobil Antar Pulang Pasien Sehat Gratis)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
27	SIFARIS (Sistem Farmasi Pintar Terintegrasi)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
28	LAWASI : Layanan sAlon peraWAtan dan relaksaSI	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
29	JEMPOL IGD (Jejak Monitoring Pelayanan *Online* IGD)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
30	SI LUKA CARE	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
31	Sekolah Koperasi Desa Hulu Sungai Selatan	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
32	Kelas Komputer Dasar	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
33	SI IRWAN (Sistem Informasi Kepegawaian)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
34	BINGKISAN IBU HAMIL (KISMIL)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
35	SABTU CERDAS (Servis Akses Bacaan Terpadu untuk Umum dan Digital pada Hari Sabtu)	Kesehatan, Pendidikan & SDM Aparatur
36	SiOPEN HSS (Sistem Order Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan)	Ketenagakerjaan & Ekonomi Lokal
37	DETAK PJU+	Ketenagakerjaan & Ekonomi Lokal
38	PETA DASEL (Pemetaan Potensi Ekonomi Desa Daha Selatan)	Ketenagakerjaan & Ekonomi Lokal

No	Nama Inovasi	Sub-Klaster Tematik
39	SI LOWIS (Aplikasi Lapor Wisata)	Ketenagakerjaan & Ekonomi Lokal
40	SI TIMELINE RS BHHB (SIstem aplikasi daftar kErja *online* RS BHHB)	Ketenagakerjaan & Ekonomi Lokal
41	PENDAMPINGAN PENYALURAN BANSOS CEPAT TANGGAP (PEPENABAT)	Pemerataan Ekonomi Desa
42	TIM Pemantau dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri	Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja
43	SIMKERDA (Sistem Inovasi Kerja Sama Daerah	Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja
44	Si EKKa	Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja
45	Lakasilah Tuan Hudah Gerah	Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja
46	KETUPAT SETDA (Kesatuan Tugas Pelaporan Terintegrasi Sekretariat Daerah)	Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja
47	ePropemperda	Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja
48	SAPA HSS (Saluran Pengaduan Hulu Sungai Selatan)	Pengaduan, Partisipasi & Informasi Publik
49	PANTING MARENA (PERCEPATAN AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL MELALUI PERANGKAT DESA DIKANTOR DESA KABUPATEN)	*E-Government* & Adminduk Digital
50	MENTANG-MENTANG (MELAHIRKAN TENANG, DOKUMEN DATANG) V2	*E-Government* & Adminduk Digital
51	DIAJAK MESRA (Difasilitasi Antar Jemput Akta Kematian Melalui Serikat Kematian)	*E-Government* & Adminduk Digital
52	INOVASI SILANTING (SISTEM LAYANAN TERINTEGRASI SECARA DARING) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	*E-Government* & Adminduk Digital
53	PAPI ALIN	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
54	KAPAS BARA	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
55	SITERANG PPID HSS	Pengaduan, Partisipasi & Informasi Publik
56	MPP One Stop Smart Service (MOSSS)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
57	KLINIK ARSIP	Manajemen Kearsipan & Perpustakaan
58	SIMFONI ARSIP (SISTEM INFORMASI PEMBINAAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI KINERJA ARSIP)	Manajemen Kearsipan & Perpustakaan

No	Nama Inovasi	Sub-Klaster Tematik
59	JAGOAN ARSIP	Manajemen Kearsipan & Perpustakaan
60	ARTIS PD (AKUISISI ARSIP STATIS PERANGKAT DAERAH)	Manajemen Kearsipan & Perpustakaan
61	AKSI SEKOLAH LITERAT (Akselerasi Standar dan Inovasi Akreditasi Perpustakaan Sekolah Dasar)	Manajemen Kearsipan & Perpustakaan
62	SINERGI AKSI PUSTAKA (Sistem Pembinaan Terintegrasi Perpustakaan Umum dan Khusus Menuju Standar Nasional Perpustakaan)	Manajemen Kearsipan & Perpustakaan
63	LIWAR HSS	Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja
64	E-SAKIP	Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja
65	SI KETUPAD (SISTEM INFORMASI KEUANGAN TERPADU PAJAK DAERAH)	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian
66	SIP-CORPU HSS	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian
67	Kula Upik Angkinang	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
68	SI JULAKK SANI Kec. Angkinang (Sistem Informasi Jemput Bola Kecamatan - KUA Dispensasi Nikah Kecamatan Angkinang)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
69	SIAP KADARAT (Sistem Informasi Administrasi Pelayanan Kecamatan Daha Barat)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
70	KOPER DESA (KOORDINASI DAN PENDAMPINGAN PEMERINTAHAN DESA)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
71	SEWARGA DASEL (SERAP ASPIRASI WARGA) KECAMATAN DAHA SELATAN	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
72	OPTIMALISASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DAHA SELATAN MELALUI SIPOLA (SISTEM PELAYANAN *ONLINE* LANGSUNG AMBIL)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
73	SIPADI (SISTEM ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS)	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian
74	SI UTARA (SISTEM INFORMASI DAN PELAYANAN TERPADU KECAMATAN DAHA UTARA)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
75	Sistem Informasi Pengelolaan Administrasi dan Inovasi PKK Kecamatan Kalumpang (SIPATIN KECAPANG)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
76	SISTEM UNGGAH ADMINISTRASI DESA TAHUN 2026 (SI GADIS 2026)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
77	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat berbasis Digital (PADUMASAL)	Pengaduan, Partisipasi & Informasi Publik
78	Master Data Admistrasi SPPD (Mr.SPPD)	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian

No	Nama Inovasi	Sub-Klaster Tematik
79	SURVEY KEPUASAN LAYANAN INTRNAL (SUSAN LAINTEN)	Pengaduan, Partisipasi & Informasi Publik
80	LAMANK Kec. Kandangan (Layanan Mandiri Antar Berkas Gratis) Kecamatan Kandangan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
81	REKAN SI MAMET (REKomendasi PencairAN SelesaI liMA MeniT)	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian
82	SISTER (Sistem Input Surat Tugas Terpadu)	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian
83	KASI AMBIL (BERKAS SELESAI, BARU DIAMBIL)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
84	AKSI MONALISA (APLIKASI MONITORING DAN EVALUASI DESA)	Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja
85	SISTEM VERIFIKASI ELEKTRONIK LAYANAN ADMINISTRASI MASYARAKAT SUNGAI RAYA (SELARAS)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
86	Sistem Informasi Data Kecamatan (SiDaTan)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
87	SIMKuDa (Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan Desa)	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian
88	SiSuKa PD (Administrasi Surat Keluar, SK dan Perjalanan Dinas)	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian
89	BAHANTAR	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
90	JEMPOL PBB	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
91	GasanKU = Gerakan Administrasi Santun Kandangan Utara	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
92	SIGMA KAMBOJA	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
93	e SURAT KETERANGAN PINDAH	*E-Government* & Adminduk Digital
94	e SURAT KUASA KEPENGURUSAN	*E-Government* & Adminduk Digital
95	e SURAT KETERANGAN BEDA NAMA	*E-Government* & Adminduk Digital
96	e SURAT KETERANGAN AHLI WARIS	*E-Government* & Adminduk Digital
97	ADEK PUAS MAS	*E-Government* & Adminduk Digital
98	e SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (PRIBADI)	*E-Government* & Adminduk Digital
99	e SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (LAIN-LAIN)	*E-Government* & Adminduk Digital
100	e SURAT KETERANGAN PENGHASILAN	*E-Government* & Adminduk Digital

No	Nama Inovasi	Sub-Klaster Tematik
101	SI PETENISKU	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
102	e SURAT KEMATIAN LAMA	*E-Government* & Adminduk Digital
103	e SURAT KEMATIAN BARU	*E-Government* & Adminduk Digital
104	BASTIK 3 AH	*E-Government* & Adminduk Digital
105	e SURAT KETERANGAN JANDA/DUDA	*E-Government* & Adminduk Digital
106	e SURAT KETERANGAN BELUM MENIKAH	*E-Government* & Adminduk Digital
107	e SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH	*E-Government* & Adminduk Digital
108	e SURAT KETERANGAN AHLI WARIS KEMATIAN	*E-Government* & Adminduk Digital
109	e SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH	*E-Government* & Adminduk Digital
110	e SURAT PERNYATAAN JUAL BELI	*E-Government* & Adminduk Digital
111	e SURAT KETERANGAN HIBAH	*E-Government* & Adminduk Digital
112	e SURAT KETERANGAN DOMISILI LEMBAGA KANTOR	*E-Government* & Adminduk Digital
113	ISMA BADASTARKU	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
114	SI-PIKAT	Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja
115	Peduli Umpeg (Pengelolaan Dokumen Lingkup Bagian Umum dan Kepegawaian)	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian
116	SI IDAH PEDALAMAN (Sistem Informasi Kemudahan Pelayanan dalam Genggaman)	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One-Stop-Service*)
117	e-RKBMD (ELEKTRONIK RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH)	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian
118	ES-KREM HASAN BASRY (Elektronik Slip Kompensasi dan Remunerasi)	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian
119	SIPETI (Sistem Pelayanan Cuti)	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian
120	E-Skakmat (Elektronik Surat KeterAngan keMATian)	*E-Government* & Adminduk Digital
121	SOPIA (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR IN ANDROID)	Reformasi Birokrasi & Akuntabilitas Kinerja
122	SIBUNGA (Sistem Informasi Pembayaran Tunjangan dan Gaji)	Keuangan Daerah, Aset & Kepegawaian

No	Nama Inovasi	Sub-Klaster Tematik
123	ANNOR (Aplikasi Pelayanan Donor Darah)	Pengaduan, Partisipasi & Informasi Publik
124	BUKU TAMU DIGITAL (DIGITAL GUESTBOOK)	Pengaduan, Partisipasi & Informasi Publik
125	LOKSADO INKLUSIF: Layanan Kolektif Satu Pintu untuk Administrasi Keluarga Terpadu	*E-Government* & Adminduk Digital
126	GALA SAJADAH DUNIA AKHIRAT (Gerakan Layanan Sampah jadi Ibadah Dunia Akhirat)	Lingkungan & Toleransi

Lampiran 2. Instrumen Penilaian Kualitatif Enam Inovasi

- Dimensi 1 – Efisiensi Proses Layanan: skala 1 (proses berlarut-larut/tidak jelas) hingga 5 (proses cepat dan efisien);
- Dimensi 2 – Tingkat Digitalisasi: skala 1 (sepenuhnya manual) hingga 5 (terintegrasi sistem informasi digital penuh);
- Dimensi 3 – Kejelasan Kelembagaan/SOP: skala 1 (tidak ada uraian mekanisme kerja) hingga 5 (mekanisme kerja terstandardisasi dan terdokumentasi lengkap);
- Dimensi 4 – Keterbukaan & Akuntabilitas Publik: skala 1 (tidak ada data capaian yang dipublikasikan) hingga 5 (capaian dipublikasikan secara berkala dan dapat diverifikasi);
- Bobot kriteria untuk skoring komposit (Bab III): Efisiensi Proses Layanan 30%, Kejelasan Kelembagaan/SOP 30%, Tingkat Digitalisasi 20%, Keterbukaan & Akuntabilitas Publik 20%.

PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

BAPPERIDA

HASNUR CENTRE
Bakti untuk Banua
Bakti untuk Bangsa

HRP
HAFECS
Research &
Publication

2026
LAPORAN KAJIAN